

**Kebijakan Editorial Lembaga Penyiaran Publik TVRI  
(Analisis Framing Pemberitaan LPP TVRI terhadap Isu Kenaikan BBM dan  
Konversi Minyak Tanah ke Gas)**



**TESIS**

**Novi Nurrani Putri  
0706184885**

**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Kebijakan Editorial Lembaga Penyiaran Publik TVRI  
(Analisis Framing Pemberitaan LPP TVRI terhadap Isu Kenaikan BBM dan  
Konversi Minyak Tanah ke Gas)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master**

**Novi Nurrani Putri  
0706184885**

**Kekhususan Manajemen Komunikasi  
Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Indonesia  
Jakarta, 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Novi Nurrani Putri

NPM : 0706184885

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Juni 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Novi Nurrani Putri  
NPM : 0706184885  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Kekhususan : Manajemen Komunikasi  
Judul Tesis : Kebijakan Editorial Lembaga Penyiaran Publik  
(Analisis Framing Pemberitaan LPP TVRI  
terhadap isu Kenaikan BBM dan kebijakan  
Konversi Minyak Tanah ke Gas)

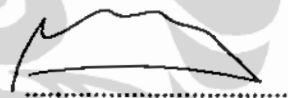
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Pinkey Triputra, MSc



Penguji Ahli : Dr. Udi Rusadi, MS



Ketua Sidang : Prof. Andre Hardjana, Ph.D



Sekretaris Sidang : Drs. Eduard Lukman, MA



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Juli 2009

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Tanda Persetujuan Pembimbing Tesis**

Nama : Novi Nurrani Putri  
NPM : 0706184885  
Program Studi : Manajemen Komunikasi  
Judul Tesis : Kebijakan Editorial Lembaga Penyiaran Publik  
(Analisis Framing Pemberitaan LPP TVRI terhadap Isu  
Kenaikan BBM dan Konversi Minyak Tanah ke Gas)

Dosen Pembimbing



Dr. Pinkey Triputra, M.Si

## KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur, Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Jurusan Manajemen Komunikasi Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Staff pengajar di program studi Manajemen Komunikasi dan Manajemen Komunikasi Politik yang telah membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan;
2. Bapak Dr. Pinkey Triputra, MS, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. Yuddy Chrisnandi yang bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini dan memberikan informasi melalui wawancara dengan penulis;
4. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
5. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakart, 4 Juni 2009

Penulis

## ABSTRAK

Nama : Novi Nurrani Putri  
Program Studi : Manajemen Komunikasi  
Judul : Kebijakan Editorial Lembaga Penyiaran Publik  
(Analisis Framing Pemberitaan LPP TVRI terhadap Isu  
Kenaikan BBM dan Konversi Minyak Tanah ke Gas)

Tesis ini membahas bagaimana dinamika dan perubahan yang terjadi pada kebijakan redaksional atau editorial TVRI setelah berubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik terutama terkait dengan suatu kebijakan yang diambil pemerintah dan berdampak pada kepentingan masyarakat melalui pembingkai isu Kenaikan Bahan Bakar Minyak pada Mei 2008 dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas pada masa pemerintahan SBY-JK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa perubahan kebijakan editorial TVRI setelah berubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik dalam hal pemberitaan. Dalam membingkai isu kenaikan BBM dan Konversi Minyak Tanah ke Gas, LPP TVRI cenderung ingin memberikan pemahaman melalui pemberitaannya kepada masyarakat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang rasional dan logis serta ditujukan guna kepentingan rakyat di masa mendatang.

Kata kunci:

Kebijakan Editorial, Lembaga Penyiaran Publik, Kenaikan BBM, Konversi Minyak Tanah ke Gas

## ABSTRACT

Name : Novi Nurrani Putri  
Study Program : Management of Communication  
Title : Editorial Policy Public Broadcasting Institution  
(News Framing Analyze Public Broadcasting Institution  
TVRI to BBM increasement and Conversion of Crude Oil to  
Liquid Petroleum Gas)

The focus of this study is content and explain how is dynamic and changing occurs in editorial policy of TVRI after changing its status to Public Broadcasting Institution especially related to government policy and affected on public interest through issues framing rise of fuel prices on May 2008 and Conversion of Crude Oil to Liquid Petroleum Gas (LPG) in SBY-JK government. This research is qualitative with research paradigm constructivist. The research result appears there is several changes on editorial policy especially on news. To frame rise of fuel prices and Conversion of Crude Oil to Liquid Petroleum Gas (LPG), Public Broadcasting Institution TVRI tends to give understanding to society through its news that government policy is rational and logic policy, towards public interest in the next future.

Key Words : Editorial policy, Public Broadcasting Institution, Rise of fuel prices, Conversion of Crude Oil to LPG

## DAFTAR ISI

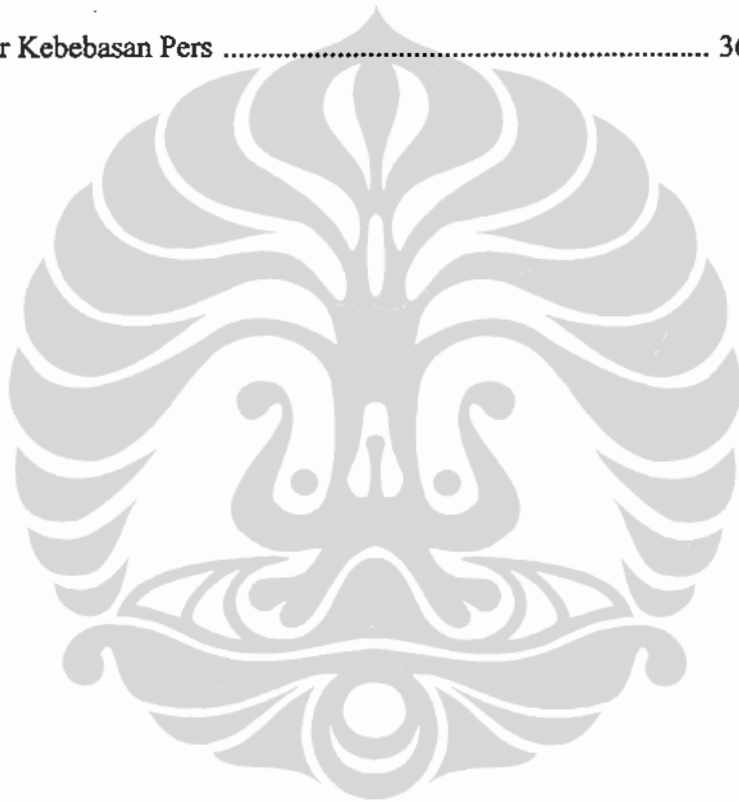
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PEGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.1.1 Kebijakan Editorial LPP TVRI (Editorial Policy).....	2
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Signifikansi Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....</b>	<b>10</b>
2.1 Fungsi Komunikasi dan Karakteristik Media Massa .....	10
2.2 Teori Tentang Media Massa .....	11
2.3 Teori Media dan Hubungan Masyarakat .....	13
2.3.1 Hubungan antara Media dengan Institusi lain .....	13
2.3.2 Hubungan antara Organisasi Media dengan Publik .....	14
2.3.3 Teori Pengaruh dalam Isi Media .....	14
2.3.4 Teori Konstruksi Berita .....	17
2.3.5 Pembentukan opini publik dan Konstruksi realitas berita politik.....	22
2.3.6 Konsep Kebijakan Editorial .....	29
2.3.7 Konsep Independensi .....	33
2.3.8 Kebebasan Pers .....	34
2.3.9 Konsep Lembaga Penyiaran Publik .....	38
2.3.10 Teori Pers .....	42
2.3.10.1 Authoritarian Theory (Teori Otoriter) .....	43
2.3.10.2 Libertarian Theory ( Teori Liberal ) .....	44
2.3.10.3 Soviet Communist Theory ( Teori Komunis Soviet) .....	46
2.3.10.4 Social Responsibility Theory (Teori Tanggung Jawab Sosial) .....	47
2.3.11 Teori Gate Keeper .....	50
2.3.12 Teori Agenda Setting .....	52
2.3.13 Analisis Isi Media .....	54
2.3.14 Analisis Framing.....	55



<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
3.1 Sifat Penelitian .....	63
3.2 Fokus Penelitian .....	63
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	63
3.4 Teknik Analisis Data .....	66
3.4.1 Teknik Analisis Framing .....	67
3.5 Tahapan Penelitian dan Kerangka Kerja Penelitian .....	69
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
4.1 Konstruksi Realitas Kenaikan BBM dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke gas di LPP TVRI .....	73
4.1.1 Sorotan terhadap peran pemerintah .....	76
4.1.1.1 Define Problem (Pendefinisian Masalah) .....	76
4.1.1.2 Diagnose Cause (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) .....	80
4.1.1.3 Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) .....	84
4.1.1.4 Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) .....	90
4.1.2 Sorotan terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat .....	93
4.1.2.1 Define Problem (Pendefinisian Masalah) .....	93
4.1.2.2 Diagnose Cause (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) .....	95
4.1.2.3 Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral) .....	96
4.1.2.4 Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) .....	98
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran Terhadap Proyeksi LPP TVRI ke Depan .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

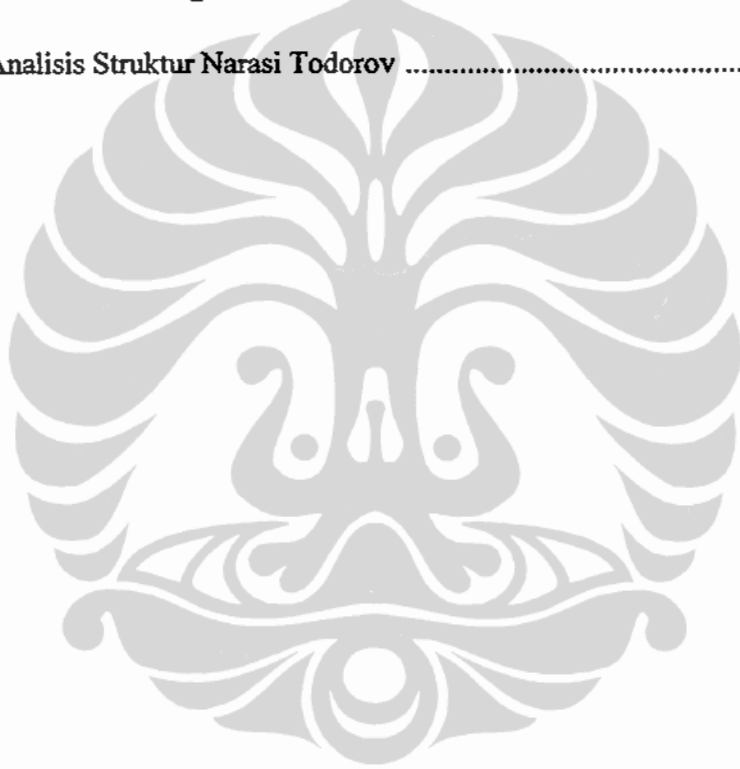
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Tingkatan Pengaruh Rutinitas Media terhadap Isi Media .....	15
Gambar 2.2: Karakteristik Liputan Peristiwa Politik .....	24
Gambar 2.3: Kerangka Pemikiran .....	25
Gambar 2.4: Indikator Kebebasan Pers .....	36



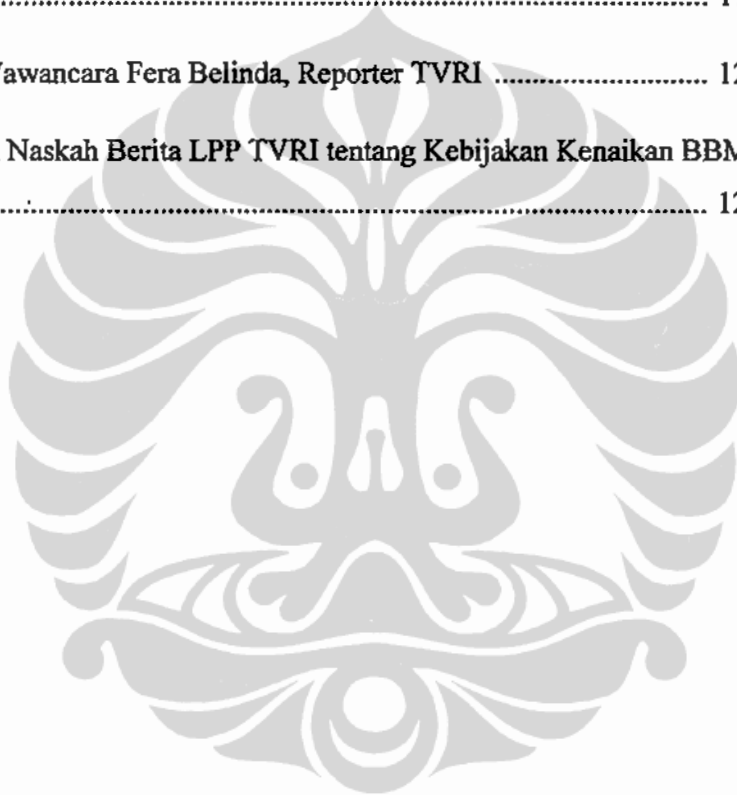
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Nilai Berita .....	18
Tabel 2.2: Kategori Berita .....	19
Tabel 3.1: Penampangan Level Analisis Wacana .....	62
Tabel 3.2 : Model Analisis Framing Robert N. Entman .....	68
Tabel 3.3: Model Analisis Struktur Narasi Todorov .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara Purnama Suwardi, General Manajer Berita LPP TVRI .....	111
Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan mantan Manajer Pemberitaan LPP TVRI, Sukirman .....	116
Lampiran 3 : Hasil Wawancara Fera Belinda, Reporter TVRI .....	121
Lampiran 4 : Contoh Naskah Berita LPP TVRI tentang Kebijakan Kenaikan BBM .....	125



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Studi tentang televisi publik selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan televisi publik di setiap negara memiliki peranan dalam mengontrol kekuasaan negara. Meski seringkali televisi publik diidentikan dengan televisi milik pemerintah, seiring dengan era kebebasan pers di negara demokratis, fungsi televisi publik bergeser menjadi televisi yang memperjuangkan hak-hak publik.

Anggiat (2001) menyebutkan di Indonesia, pasca reformasi 1998, pers dalam menyampaikan pesan dan informasi mulai terlihat keterbukaan dan kebebasan yang pada masa lalu tidak mungkin dilakukan karena pemerintah dominan dan berkuasa sehingga pemerintah juga berperan untuk menentukan mana berita yang layak disiarkan dan mana yang tidak layak.

Struktur politik otoriter yang berlangsung selama tiga puluh dua tahun telah membuat masyarakat Indonesia tidak memiliki ruang yang cukup terhadap asas demokrasi seperti kebebasan berpendapat. Kebebasan pers pada masa Orde Baru sangat terkekang dimana pemerintahan sangat dominan untuk menentukan apa yang dapat disiarkan oleh media televisi. Keterbelakangan pers ditunjukkan dengan adanya pembredelan media seperti Tempo, Detik dan Editor. Pada saat itu media tidak bebas untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan yang mereka ketahui. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28.

Pasca reformasi, kran kebebasan pers mulai dibuka, sejumlah media mulai menyajikan informasi dan berita yang kompherensif, berimbang dan tidak memihak. Tetapi tidak jarang, informasi yang diberikan melewati batas kode etik jurnalistik sehingga merugikan nama baik seseorang.

Dinamika dan proses panjang perubahan status yang turut merubah peranan dan fungsi sebuah stasiun televisi di Indonesia dapat kita lihat dari perkembangan sejarah Televisi Republik Indonesia. Perjalanan panjang TVRI melakukan perubahan dari televisi yang hanya menjadi corong pemerintah hingga menjadi

televisi publik, dengan memperhatikan orientasi pemberitaan terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan publik merupakan hal yang menarik untuk dikaji.

### 1.1.1 Kebijakan Penyiaran LPP TVRI (Editorial Policy)

Sesuai dengan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum, seluruh kegiatan penyiaran TVRI dan kegiatan terkaitnya, didedikasikan untuk kesejahteraan publik melalui pengembangan masyarakat sipil, khususnya dalam mendukung nilai-nilai publik, hukum, moral, dan struktur masyarakat demokratis yang menghormati martabat dan hak-hak kemanusiaan.

Oleh karena itu, siaran LPP TVRI secara terintegrasi ditujukan untuk mengikat kesadaran pemirsa terhadap arti penting pluralisme dalam mencapai kesejahteraan bersama. Untuk itu program siaran TVRI difungsikan sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan komunikasi pluralistik untuk setiap orang dan kelompok.

Selain itu, siaran TVRI juga ditujukan sebagai referensi bagi publik dan salah satu faktor perekat sosial serta integrasi individu, kelompok dan masyarakat melalui program siaran yang beraneka-ragam, inovatif, dan variatif dengan memperhatikan standar mutu serta etika.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka siaran TVRI secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi budaya, gender, agama, serta segala bentuk perbedaan suku/ras, dan strata sosial seraya memberi akses dan memperhatikan kepentingan kelompok minoritas. Oleh karena itu siaran TVRI mencerminkan keberagaman filosofi dan agama dalam masyarakat yang majemuk dengan tujuan mempertinggi pemahaman dan rasa saling menghormati antar anggota masyarakat dalam rangka memupuk semangat kebangsaan dan kerukunan hidup.

Dalam kaitan demokratisasi informasi, kebijakan penyiaran TVRI mencerminkan peran serta TVRI dalam jaringan penyiaran nasional dan global, khususnya dalam mengkampanyekan identitas bangsa dan meng-ageni perubahan-perubahan mendasar masyarakat. Karenanya, siaran TVRI diarahkan kepada pewujudan masyarakat informasi melalui penyediaan informasi dan komentar

yang benar, relevan dan seimbang serta netral, sehingga dapat menjadi forum diskusi dan wacana publik yang mendorong terselenggaranya debat publik yang sehat dan bertanggung jawab.

Standar kualitas program siaran TVRI juga disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan publik, tanpa harus mengorbankan kualitas hanya demi pemuasan permintaan pasar.

Selain mengetahui Kebijakan Penyiaran atau Editorial Policy, LPP TVRI juga memiliki sepuluh komitmen idealisme redaksional pemberitaan, yakni :

1. Jurnalisme TVRI mengungkapkan kebenaran dan menegakkan objektivitas.
2. Jurnalisme TVRI memperjuangkan tegaknya hukum dan terwujudnya Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Jurnalisme TVRI bebas dari tekanan politik, kekuasaan dan komersial.
4. Jurnalisme TVRI memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan menolak tayangan yang bersifat sadisme, sensasional, mistik dan pornografi serta tidak menyiarkan hal-hal yang mempertentangkan SARA.
5. Jurnalisme TVRI netral, berimbang, santun, kompherensif, proporsional dan menjadi sumber referensi publik.
6. Jurnalisme TVRI mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan berita bagi publik.
7. Jurnalisme TVRI melakukan kontrol sosial yang konstruktif.
8. Jurnalisme TVRI ikut mendorong tumbuh kembangnya daya nalar dan kreativitas masyarakat.
9. Jurnalisme TVRI peduli terhadap persoalan bangsa dan persoalan sosial kemasyarakatan.
10. Jurnalisme TVRI bersandar pada kekuatan hati nurani setiap jurnalisnya.

Setiap media memiliki kecenderungan ataupun orientasi pemberitaan tersendiri terhadap suatu isu yang sedang bergulir di tengah masyarakat. Hal ini terkait dengan kebijakan media yang dipengaruhi oleh kepemilikan saham atau konglomerasi media. Pada media yang berbasis industri komersialisme, penyajian suatu program diarahkan pada kepentingan media guna meraih rating dan share tertinggi. Begitupun halnya dengan pemberitaan yang ada cenderung menjual sensasionalisme dan segala sesuatu yang bombastis.

Dalam pemberitaan politik seringkali diarahkan pada kepentingan politik suatu partai yang memiliki kepemilikan saham di media tersebut. Sementara pada lembaga penyiaran publik yang kepemilikan saham sebagian besar oleh pemerintah dalam pemberitaannya cenderung mendukung langkah atau kebijakan yang diambil pemerintah meskipun di sisi lain hal tersebut tidaklah menguntungkan rakyat. Label publik pada lembaga penyiaran publik seolah menyiratkan bahwa media tersebut ditujukan untuk mengakomodir seluruh kepentingan publik dalam upaya pemenuhan hak-hak publik. Tentunya hal ini menjadi suatu dilema bagi LPP tatkala dibenturkan pada suatu keadaan dimana LPP di satu sisi harus mendukung penuh satu kebijakan atau langkah pemerintah namun di sisi lain LPP juga harus dapat menyampaikan aspirasi rakyat kecil sebagai upaya pemenuhan hak-hak publik.

Pada 2007, Zulkarimien Nasution mengatakan keberadaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sangat penting dan strategis dalam menyeimbangkan jenis kandungan program media siaran yang akan diterima khalayak luas. LPP membuat pilar media siaran menjadi lengkap sehingga bersama-sama dua kelompok penyiaran lainnya yaitu lembaga penyiaran komersial dan komunitas akan menjamin bahwa seluruh kebutuhan informasi bagi seluruh lapisan khalayak akan terpenuhi.

Khusus untuk program siaran yang berkaitan dengan penyediaan informasi, tanggung jawab utama LPP adalah mencari, menggali dan menyajikan informasi yang akurat kepada khalayak. Informasi yang akurat ini diperlukan dalam mendukung proses demokrasi dimana masyarakat luas dapat turut serta dengan memberikan wadah bagi suara mereka untuk didengarkan oleh sesama anggota masyarakat atau oleh para penentu kebijakan. Dalam hal program lain yang



sifatnya non berita, LPP diperlukan untuk memastikan adanya perimbangan untuk menghadirkan program yang tidak begitu menarik minat lembaga penyiaran komersial seperti program keagamaan, budaya, kesenian, pendidikan, olah raga, hiburan dan anak-anak.

Kehadiran LPP ditujukan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan sumbangsih untuk proses dialog dan perdebatan yang demokratis. LPP harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat karena keberadaanya juga penting sebagai unsur perekat persatuan dan kebangsaan.

Hasil Diskusi Publik di FISIP UI pada 4 April 2003 serta pertemuan I Tim Asistensi Penyelamatan TVRI (TAP TVRI) pada 7 April 2003 dari berbagai latar belakang pengetahuan, pengalaman, penelitian dan pengkajian yang signifikan di bidang komunikasi dan sosial politik berkesimpulan bahwa negara dan masyarakat Indonesia membutuhkan sebuah stasiun TV publik yang berjangkauan nasional sebagai :

1. Pembawa identitas nasional dan misi strategi kebudayaan Indonesia yang pluralis.
2. Alat integrasi nasional (mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia)
3. Sarana pendidikan anak – anak bangsa dan keluarga – keluarga Indonesia.
4. Sarana melayani dan memenuhi akses publik secara luas, baik untuk penerimaan siaran (informasi bagi publik) maupun untuk ekspresi diri dan ekspresi publik melalui isi siaran (pendorong demokratisasi)
5. Penyeimbang, pembanding, saling melengkapi dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang sama – sama sehat dan dinamis.

Salah satu prasyarat yang lazim dibebankan kepada LPP adalah independensi atau kemandirian terutama dari segi kebijakan program. Kendati pendanaan berasal dari negara ataupun dari dukungan langsung masyarakat melalui iuran namun dari segi kebijakan program, LPP harus dijalankan oleh pengurus yang mandiri, yang terbebas dari adanya kemungkinan intervensi pihak luar termasuk negara meski pendanaannya berasal dari negara. Dalam merancang, memproduksi dan menyiarkan program-programnya, LPP berpedoman kepada ketentuan hukum

dan perangkat peraturan yang terkait dengannya berupa panduan profesionalisme dan pedoman etika.

Dalam memberitakan isu yang sedang bergulir, LPP dituntut untuk senantiasa berpihak pada kepentingan publik. Namun yang menjadi persoalan adalah LPP di satu sisi merupakan lembaga yang masih disubsidi oleh pemerintah. Disisi lain sebagai lembaga yang menyandang nama publik, sehingga harus dapat mengakomodir segala kepentingan publik. Hal ini tentunya menjadi dilema bagi LPP dalam mengangkat isu yang berkaitan dengan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Di satu pihak LPP sebagai lembaga yang masih menggunakan anggaran negara dalam menjalankan operasionalisasi kegiatannya, harus selaras dengan kebijakan yang diambil pemerintah dengan mendukung kebijakan itu melalui pemberitaan yang positif. Sementara di pihak lain, LPP sebagai lembaga penyiaran publik dan media massa yang mengusung idealisme jurnalistik juga harus berpihak pada kepentingan publik, menjadi penyambung lidah rakyat dan menjalankan fungsi pengawasannya (*watch dog*) terhadap segala kebijakan yang diambil pemerintah.

Salah satu isu terhangat dalam kurun waktu setahun terakhir yang dapat dikaji sebagai sebuah penelitian adalah isu tentang Kenaikan BBM pada bulan Mei 2008 dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas pada tahun yang sama.

Kenaikan Bahan Bakar Minyak pada bulan Mei 2008 dipicu oleh imbas dari krisis ekonomi global yang melanda dunia. Hal ini turut berdampak pada meningkatnya harga minyak dunia yang mencapai 150 juta perbarel. Kenaikan harga minyak dunia tersebut membuat pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium dari 4500 rupiah menjadi 6000 rupiah per liter. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada Mei 2008 mengundang aksi protes dari sejumlah kalangan mulai dari mahasiswa hingga elemen masyarakat lainnya. Bahkan berbagai aksi anarkis juga turut mewarnai berbagai peristiwa pasca pengumuman kenaikan BBM oleh pemerintah. Aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat khususnya mahasiswa tersebut di kemudian hari menjadi persoalan hukum yang menyeret sejumlah tokoh pergerakan massa yang disinyalir sebagai aktor intelektual dalam aksi protes tentang kenaikan BBM. Bahkan bentrokan yang terjadi antara organisasi Islam

dengan salah satu golongan kepercayaan yang dianggap sesat juga berawal dari aksi protes menentang kenaikan harga BBM. Maraknya aksi protes kenaikan harga BBM dari sejumlah elemen masyarakat sebenarnya juga dipicu oleh keprihatinan masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang sedang terjadi. Sebelum pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, masyarakat sudah lebih dahulu dihadapkan pada kesulitan warga dalam mendapatkan minyak tanah akibat kebijakan konversi minyak tanah ke gas.

Antrian panjang untuk mendapatkan minyak tanah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Pada saat itu program konversi yang tengah diupayakan pemerintah belum sepenuhnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap resisten. Sebagian lainnya menerima dengan pasrah tetapi harus dipusingkan dengan peralatan yang tidak memadai. Persoalan semakin pelik karena resistensi masyarakat justru terjadi bersamaan dengan penarikan minyak tanah dari pasaran. Alhasil, masyarakat yang bersikukuh ingin menggunakan minyak tanah 'dipaksa' mengantri di pusat-pusat penjualan minyak tanah.

Sejumlah kalangan menilai persoalan utama dari penolakan masyarakat adalah adanya ketidaksiapan pemerintah yang diperparah dengan sosialisasi yang belum optimal. Pemerintah dipandang tidak mampu mengantisipasi keterkejutan masyarakat karena minyak tanah yang telah membudaya sejak lama menjadi bahan bakar andalan akan tergantikan oleh gas. Sebagian masyarakat menilai kebijakan konversi minyak tanah ke gas harus dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan sosialisasi secara terpadu.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sejarah Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia yang baru mulai berkibar hampir tiga tahun terakhir telah merubah orientasi pemberitaan dari lembaga milik pemerintah menjadi lembaga yang lebih mengedepankan kepentingan publik. Disinilah letak permasalahannya dimana sebagai lembaga yang masih disubsidi pemerintah harus berada pada posisi yang memihak segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah. Namun di sisi lain menyandang nama sebagai lembaga penyiaran publik bagaimanapun harus tetap memenuhi hak-hak publik. Terkait

dengan isu tersebut, berbagai media ramai memberitakan peristiwa itu dengan berbagai sudut pandang sesuai dengan kebijakan redaksional dan editorial media itu masing-masing. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik membingkai isu Kenaikan BBM dan Konversi Minyak Tanah ke Gas dalam pemberitaannya.

Sementara itu, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI membingkai isu kenaikan harga BBM pada Mei 2008 dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji pada tahun 2007 yang dilakukan oleh pemerintah SBY-JK?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan bagaimana sebenarnya kebijakan editorial suatu lembaga penyiaran publik dalam menyajikan berita dan independensinya dalam upaya menyeimbangkan antara peranan sebagai media penyiaran milik pemerintah dengan peranan sebagai lembaga penyiaran publik. Sebagai contoh kasus dan agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, penelitian ini mencoba untuk mengkaji bagaimana LPP TVRI membingkai isu Kenaikan BBM pada Mei 2008 dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas dalam pemberitaannya.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi akedemis, yakni memperkaya atau ikut menambah pemikiran tentang kebijakan editorial dalam lembaga penyiaran publik yang dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh status lembaga penyiaran publik sebagai lembaga milik publik mengarahkan pemberitaannya. Bagi masyarakat, penelitian ini juga dapat menunjukkan kebebasan media khususnya lembaga penyiaran publik pasca perubahan status TVRI menjadi LPP. Di sisi lain penelitian ini dapat menunjukkan tentang bagaimana lembaga penyiaran publik menyeimbangkan antara statusnya sebagai lembaga penyiaran publik yang harus memenuhi hak-hak publik dengan sumber pendanaan dari pemerintah yang secara tidak langsung akan berpengaruh pula pada orientasi pemberitaannya yang

cenderung mendukung kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan adalah seringkali pemberitaan dalam LPP tidak berpihak pada kepentingan rakyat tetapi pada pengambil keputusan di negeri ini sebagai pemberi subsidi. Padahal dengan statusnya sebagai LPP, TVRI juga dituntut untuk dapat berorientasi pada kepentingan rakyat secara berkesinambungan.

Kedua, penelitian tentang kebijakan editorial TVRI pasca perubahan status menjadi Lembaga Penyiaran Publik hingga kini belum ada, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan gagasan kepada generasi berikutnya yang memberikan perhatian terhadap keberadaan LPP TVRI.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi pengelola LPP TVRI untuk berupaya memberikan informasi dan pemberitaan yang benar-benar dapat memenuhi kepentingan publik sesuai dengan misinya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, mendorong para pengelola TVRI untuk dapat memberikan pemberitaan yang obyektif dan memegang prinsip independensi dan imparialitas dari berbagai kepentingan tertentu.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Bab Satu terdiri dari Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua terdiri dari Konsep dan Kerangka Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada bab analisis.

Bab Tiga terdiri dari metode penelitian. Metode yang digunakan adalah analisis framing tentang pemberitaan TVRI pasca perubahan status menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang didukung dengan wawancara mendalam dengan para pimpinan pemberitaan TVRI.

Bab IV terdiri dari Pembahasan yang mencakup arah pemberitaan LPP TVRI dalam membingkai isu Kenaikan BBM pada Mei 2008 dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas.

Bab V berisi kesimpulan.

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

#### 2.1 Fungsi Komunikasi dan Karakteristik Media Massa

Fungsi komunikasi melalui media massa memiliki dua fungsi pokok yaitu fungsi terhadap masyarakat dan fungsi terhadap individu. Seperti dijelaskan Lasswell dan Wright (1975) dalam Senjaya (2003:7.22) fungsi terhadap masyarakat memiliki pengertian yang luas mencakup orang banyak, kelompok-kelompok dan system-sistem budaya termasuk norma-norma sosial. Menurut Laswell dan Wright ada empat fungsi komunikasi massa yaitu:

- 1) Pengawasan lingkungan yang menunjuk upaya pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan suatu masyarakat.
- 2) Korelasi antara bagian dalam masyarakat untuk menanggapi lingkungan, fungsi ini meliputi interpretasi terhadap informasi dan preskripsi (member petunjuk dan alternatif) untuk mencapai consensus dalam upaya mencegah konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan.
- 3) Sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai, fungsi ini menunjuk pada upaya transmisi dan pendidikan nilai-nilai serta norma-norma dari suatu generasi kepada generasi berikutnya atau dari suatu kelompok masyarakat terhadap para anggota kelompok barunya.
- 4) Hiburan, fungsi hiburan ini menunjuk upaya-upaya komunikatif yang bertujuan memberikan hiburan kepada khalayak luas.

Sedangkan fungsi terhadap individu menurut Samuel L. Becker meliputi delapan fungsi yaitu : pengawasan atau pencarian informasi, mengembangkan konsep diri, fasilitas dalam hubungan sosial, membantu melegakan emosi, sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan sebagai bagian dari kehidupan rutin atau ritualisasi.

Fungsi pokok komunikasi melalui media massa terhadap masyarakat sebagaimana dalam penjelasan diatas menjadikan media massa sebagai alat penyebaran informasi menjadi sangat penting terutama dalam penyampaian kebijakan

pemerintah, namun dalam fungsinya sebagai saluran komunikasi, setiap media memiliki karakteristik yang bergantung pada kebijakan editorial media itu sendiri.

Sudah menjadi sifat media, setiap kebijakan publik yang digulirkan pemerintah akan selalu menarik perhatian media massa, terlebih apabila kebijakan itu mengundang kontroversi dari berbagai pihak. Meski kerap menjadi sarana dalam menyampaikan kebijakan pemerintah, bukanlah tugas media untuk selalu berpihak pada kebijakan pemerintah.

Dalam kaitannya dengan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, dalam menyikapi suatu kebijakan yang diambil pemerintah dan berkaitan langsung dengan masyarakat, TVRI setelah berubah statusnya menjadi dalam pemberitaannya LPP tidak lagi mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini seiring dengan arus kebebasan informasi dan kebebasan pers pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Hal ini merupakan warna baru bagi TVRI untuk semakin menunjukkan fungsinya sebagai institusi media yang netral, independen dan tidak memihak dalam pemberitaannya.

## **2.2 Teori tentang Media Massa**

Dalam bukunya, *Mass Communication Theory*, Dennis McQuail (2000) menyebutkan media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Selain itu, media merupakan lokasi atau forum yang berperan untuk menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran atau citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif, media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan (McQuail:2000).

Media massa diharapkan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme sederhana untuk menyebarkan informasi atau juga bukan sekedar sebagai institusi bisnis tempat orang bekerja dan mencari keuntungan, namun media massa adalah suatu institusi sosial, sekaligus politik yang menyentuh alam pikiran masyarakat luas, yang dalam menjalankan prosesnya media akan sangat besar

pengaruhnya terhadap apa yang akan terjadi pada masa mendatang, baik dalam proses politik, kehidupan sosial atau ekonomi. Selanjutnya McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theories* (2000:66) merangkum pandangan khalayak terhadap peran media:

1. Melihat media massa sebagai *window on event and experience*. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, sehingga media pun dianggap sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.
2. Media massa dilihat sebagai *a mirror of events in society and the world, implying a faithful reflection*. Artinya media merupakan cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Contoh yang sangat jelas untuk memahami konsep ini misalnya, jika media dengan merasa tidak bersalah menyajikan berita yang penuh dengan kekerasan, konflik dan berbagai keburukan lainnya. Para pengelola media menganggap bahwa mereka menyajikan fakta yang sebenarnya dan media adalah refleksi dari fakta tersebut. Padahal apa yang disajikan dalam media tersebut baik dari sisi angle, arah maupun framingnya diputuskan oleh pengelola media.
3. Memandang media sebagai filter, atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Para pengelola media memilih isu, informasi, atau bentuk content yang sesuai dengan standarnya dan kemudian berita yang dipilihkan oleh media tersebut disajikan kepada khalayak.

Dalam hal ini Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai kontrol sosial bagi pemerintah dan jembatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, telah memainkan peranannya dalam menyajikan berbagai program mulai dari berita-berita aktual yang sarat dengan berbagai informasi hingga hiburan. Sebagai sumber dominan dalam memperoleh gambaran tentang realitas sosial, LPP TVRI juga telah memainkan peranannya dalam membentuk opini publik dengan menyajikan suatu isu yang sedang bergulir.

Dalam kaitannya dengan Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas, TVRI juga telah berperan untuk memberikan



gambaran tentang suatu realitas sosial. Penyajian berita-berita yang senantiasa diupayakan untuk selalu menyampaikan aspirasi rakyat, juga telah dilakukan TVRI. TVRI berupaya menempatkan posisi sebagai media yang berada di tengah-tengah antara dukungan positifnya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dengan upaya menyampaikan aspirasi masyarakat.

## **2.3 Teori Media dan Hubungan Masyarakat**

### **2.3.1 Hubungan antara Media dengan Institusi lain**

Dalam bukunya Teori Komunikasi Massa, Dennis Mc Quail mengungkapkan terdapat hubungan yang normatif dan filsafat umum yang menyangkut hubungan pers dengan masyarakat yang cenderung dipatuhi secara luas oleh kalangan elit, media dan publik. Kedua terdapat ikatan formal dalam wujud peraturan hukum yang dalam beberapa hal justru mengarahkan media ke sasaran yang positif. Ketiga, terdapat hubungan ekonomi yang mengaitkan media dengan institusi lainnya. Dan keempat, terdapat banyak hubungan informal antara media dengan masyarakat yang berlangsung secara dua arah dan diwarnai oleh hubungan timbal balik. (Dennis McQuail:2000:55).

Dalam kaitannya dengan peranan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, pola hubungan yang terbentuk antara media, pemerintah dan masyarakat. TVRI sebagai media penyiaran pada umumnya, berfungsi sebagai jembatan atau penyambung lidah rakyat. Pemerintah sebagai penentu kebijakan dituntut untuk memiliki hubungan yang baik dengan media khususnya LPP TVRI. Hubungan baik ini tentunya dapat mengarahkan media ke sasaran yang positif dimana media sebagai institusi yang memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam melanggengkan kekuasaannya.

### 2.3.2 Hubungan antara Organisasi Media dengan Publik

Terdapat jaringan hubungan lain disamping jaringan hubungan yang tercipta karena kepentingan distribusi isi, yang harus dibentuk berdasarkan minat, harapan, dan keinginan khalayak. Hubungan tersebut dapat bersifat timbal balik dan seimbang walaupun dalam kenyataannya kontak yang berlangsung dikendalikan dan diarahkan oleh media, karena khalayak secara terpisah-pisah kurang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan. (Dennis McQuail:2000:109) Dalam *discourse* media, wacana besar yang menyangkut kepentingan publik belum banyak melibatkan publik itu sendiri dalam proses penentuan kebijakan. Publik sering disuguhkan interpretasi tunggal tentang realitas dan mungkin juga solusi tunggal terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan mereka. (Jurnal Tesis UI :48)

Dalam kaitannya dengan isu Kenaikan BBM dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas, masyarakat secara tidak langsung dipaksa untuk mengikuti kebijakan tersebut tanpa melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Pemerintah secara bertahap telah melakukan upaya melalui sosialisasi dan informasi tentang kebijakan tersebut agar masyarakat mau tidak mau mengikuti kebijakan tersebut. Hal ini merupakan fenomena yang terjadi dalam media penyiaran yang ada di Indonesia yang cenderung kurang memberikan ruang publik bagi masyarakat.

Dalam kaitan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, kenyataannya belum dapat memberikan ruang publik yang proporsional bagi masyarakat dalam menentukan arah suatu kebijakan. Dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara organisasi media dengan publik, tentunya ruang publik menjadi suatu elemen penting dalam upaya memberikan kesempatan untuk menyebarkan informasi yang disampaikan. Ruang publik memberikan kesempatan agar masyarakat tidak pasif terhadap informasi yang mereka terima.

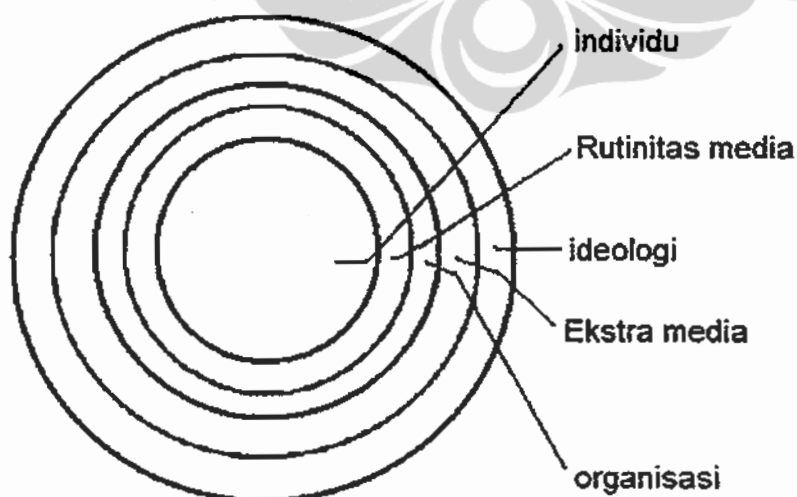
### 2.3.3 Teori Pengaruh dalam Isi Media

Content atau isi media adalah inti dari produk media massa, baik produk berita ataupun hiburan. Isi dari produk media massa inilah yang dihasilkan dari pengolahan dan pemikiran para produsernya di studio maupun di redaksi. Definisi

content yang dijabarkan Shoemaker dan Reese (1996) adalah serangkaian informasi verbal dan visual baik secara kualitatif ataupun kuantitatif yang didistribusikan oleh media. Secara kuantitatif, produk isi media dapat diukur dengan ukuran inci dan kolom berita yang dicetak di surat kabar, atau frekuensi penayangan sebuah program berita dan hiburan dalam media penyiaran dalam jangka waktu tertentu.

Secara kualitatif, isi media tidak dapat diukur secara presisi dalam sebuah ukuran yang pasti. Sebuah media dapat saja memuat sebuah berita dalam ukuran kolom dan inci yang sama, namun tulisan yang ditampilkan dapat memberikan informasi dan cara pandang yang berbeda terhadap suatu isu yang sedang bergulir. Begitu juga dalam liputan sebuah acara atau berita televisi yang disiarkan dalam waktu yang sama, namun isi berita dapat berbeda. Hal inilah yang dinamakan kebijakan editorial setiap media.

Untuk dapat menganalisis berbagai faktor yang terdapat di sekeliling LPP TVRI dengan mengetahui apa yang melatarbelakangi gaya pemberitaan, maka penelitian ini juga menggunakan analisis yang didasarkan pada konsep pengaruh terhadap isi media secara hirarkies dengan skema sebagai berikut :



Sumber: Pamela J. Shoemaker , *Theories of Influences on Mass Media Content*

Gambar 2.1: Tingkatan Pengaruh Rutinitas Media terhadap Isi Media

Dalam kaitannya dengan pemberitaan Lembaga Penyiaran Publik TVRI, liputan berita yang dilakukan para kru TVRI yang terdiri dari Reporter dan Kameramen berangkat dari penugasan yang diberikan oleh seorang Koordinator Liputan. Seorang Koordinator Liputan menugaskan suatu liputan berdasarkan perkembangan isu-isu terkini. Agar suatu pemberitaan dapat berimbang dan tetap memegang prinsip independensi dan imparialitas, seorang Koordinator Liputan menugaskan Reporter untuk mencari narasumber dari berbagai instansi pemerintah atau elemen terkait serta para pakar yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Misalnya dalam menyajikan pemberitaan tentang Kenaikan harga BBM dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas, seorang Reporter diwajibkan untuk mencari narasumber yang terkait dengan isu tersebut. Pertama, adalah dari Instansi Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengetahui apa sebenarnya yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut. Yang Kedua, seorang Reporter juga harus mendatangi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bersinggungan langsung dengan kenaikan harga BBM. Agar berita tersebut dapat berimbang maka seorang reporter juga harus menggali permasalahan melalui pihak yang menentang kebijakan tersebut, seperti para pengamat perminyakan dan Anggota DPR komisi tujuh yang menanggapi masalah tersebut. Setelah melakukan serangkaian wawancara dengan sejumlah narasumber dan pakar terkait, reporter TVRI kembali ke kantor dan menuju redaksi pemberitaan. Di dalam redaksi, seorang reporter mulai membuat berita berdasarkan dengan apa yang diperolehnya di lapangan. Setelah itu, reporter mengkoordinasikan berita yang telah dibuat dengan produser berita yang bertugas. Disinilah peranan produser untuk menseleksi berita yang harus masuk dalam penayangan sebuah program berita. Produser juga memiliki peranan untuk memperbaiki dan meluruskan berita yang telah dibuat sang reporter. Proses seleksi dan perbaikan naskah berita yang dilakukan seorang produser bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan editorial yang dianut TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Dalam kaitannya dengan isu Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada Mei 2008 lalu dan Kebijakan konversi minyak tanah ke gas, penulis selaku reporter di masa itu merasakan adanya konstruksi pemberitaan yang berbeda dibandingkan dengan media swasta pada umumnya. Misalnya dalam

pemilihan kata atau diksi untuk memberitakan kenaikan bahan bakar minyak, TVRI cenderung berupaya menghaluskan istilah dengan mengubah kata kenaikan menjadi penyesuaian. Sementara ketika penulis ingin menyampaikan kepada publik betapa beratnya beban masyarakat terhadap kebijakan konversi minyak tanah ke gas, salah seorang reporter senior memberikan masukan untuk tidak menuliskan keluhan masyarakat dalam naskah berita dibuat. Keluhan masyarakat terhadap beratnya beban yang dihadapi masyarakat, hanya dapat disiarkan melalui statement langsung dari masyarakat. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya insinkronisasi antara kebijakan yang sedang dicanangkan pemerintah dengan media milik pemerintah.

#### **2.3.4 Teori Konstruksi Berita**

Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese (1996) menyatakan bahwa konstruksi berita pada dasarnya merupakan sebuah kesatuan informasi verbal dan visual yang didistribusikan secara kuantitatif dan kualitatif di dalam media. Dalam hal ini informasi yang disajikan oleh media dapat diukur secara kuantitatif dalam hal kuantitas atau intensitas pemberitaan pada suatu isu yang sedang bergulir, sedangkan kualitas isi berita dapat dilihat dari unsur obyektivitas dan faktualitas. Obyektivitas dapat diukur dari realitas media itu sendiri dan realitas sosial, sedangkan faktualitas berita memuat kebenaran berdasarkan fakta yang relevan dengan peristiwa.

Aspek konstruksi berhubungan dengan bagaimana wartawan/media menampilkan peristiwa tersebut relevan bagi khalayak. Aspek ini dilakukan dengan memutuskan item yang dipandang dapat dipahami oleh khalayak. Karena realitas dan peristiwa itu begitu kompleks, maka haruslah diidentifikasi berdasarkan nama dan dihubungkan dengan peristiwa lain yang diketahui khalayak.

Ada banyak faktor yang menentukan mengapa suatu peristiwa tertentu dapat dikategorikan sebagai berita sementara peristiwa yang lain tidak, aspek tertentu dari suatu peristiwa dikedepankan sementara aspek yang lain tidak

ditonjolkan atau bahkan dihilangkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

### 1. Rutinitas Organisasi

Setiap institusi media secara teratur memproduksi berita dan proses seleksi ini adalah bagian dari ritme dan keteraturan kerja yang dijalankan setiap harinya.

### 2. Nilai Berita

Organisasi media tidak hanya mempunyai struktur kerja tetapi juga memiliki ideology professional. Tidak semua aspek dari peristiwa dapat diberitakan, harus dapat dinilai bagian mana dari sebuah peristiwa yang memiliki nilai berita paling tinggi, untuk kemudian ditekankan dan dilaporkan kepada khalayak.

Nilai berita secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Nilai Berita

Prominence	Nilai berita dari sebuah peristiwa atau arti pentingnya. Peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa yang dipandang penting. Kecelakaan yang menewaskan satu orang bukan berita, tetapi kecelakaan yang menewaskan penumpang satu bis dapat dikatakan berita. Kecelakaan pesawat terbang lebih dapat dipandang sebagai berita dibandingkan kecelakaan pengendara sepeda motor.
Human Interest	Peristiwa lebih memungkinkan disebut berita jika peristiwa itu lebih banyak mengandung unsur haru, sedih dan menguras emosi khalayak. Peristiwa abang becak yang mengayuh dari Surabaya ke Jakarta lebih memungkinkan dipandang berita dibandingkan peristiwa abang becak yang mengayuh becaknya di Surabaya saja.
Conflict/Controversy	Peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita dibandingkan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja. Peristiwa kerusuhan antara penduduk pribumi dengan Cina lebih layak disebut berita dibandingkan dengan peristiwa sehari-hari antar penduduk pribumi.
Unusual	Berita mengandung peristiwa yang tidak biasa, peristiwa

	yang jarang terjadi. Seorang ibu yang melahirkan enam bayi dengan selamat lebih disebut berita dibandingkan dengan berita kelahiran seorang bayi.
Proximity	Peristiwa yang lebih dekat layak diberitakan dibandingkan dengan peristiwa yang jauh, baik secara fisik ataupun emosional dengan khalayak.

Sumber : Eriyanto 2002: 106-107

### 3. Kategori Berita

Tabel 2.2 Kategori Berita

Media dan wartawan memiliki peranan dalam mengkonstruksikan sedemikian rupa tentang bagaimana sebuah peristiwa dinilai penting. Ada suatu kesepakatan bersama yang dianut oleh komunitas wartawan dalam menilai suatu berita. Secara umum, seperti dicatat Tuchman, ada lima kategori berita yang sering digunakan wartawan yakni : hard news, softnews, developing news, dan continuing news. Kategori tersebut dipakai untuk membedakan jenis isi berita dan subjek peristiwa yang menjadi berita. Kelima kategori berita tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Hard News	Berita mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Kategori ini sangat dibatasi oleh waktu dan aktualitas. Kategori ini berkaitan erat dengan sejauh mana informasi tentang suatu peristiwa yang tengah terjadi dapat diterima dengan cepat oleh khalayak. Peristiwa yang dapat dikategorikan dalam berita ini adalah peristiwa yang direncanakan (Sidang Istimewa atau Rapat Paripurna DPR) atau dapat juga berupa peristiwa yang tidak direncanakan seperti kecelakaan lalu lintas, bencana, dan aksi unjuk rasa.
Soft News	Kategori berita yang dikaitkan dengan sisi kemanusiaan khususnya tentang perjalanan hidup seseorang dalam memperjuangkan nasibnya ( <i>human interest</i> ). Kategori ini tidak dibatasi oleh waktu dan aktualitas ( <i>timeless</i> ) karenanya dapat ditayangkan kapan saja. Yang menjadi ukuran dalam kategori berita ini bukanlah kecepatan

	informasi yang diterima khalayak, tetapi apakah informasi yang disajikan kepada khalayak tersebut dapat menyentuh emosi dan menarik. Jika hard news berhubungan dengan peristiwa yang penting sedangkan softnews berkaitan dengan peristiwa yang menarik.
Spot News	Merupakan subklarifikasi dari berita yang berkategori hard news dalam spot news, peristiwa yang akan diliput tidak dapat direncanakan. Contohnya peristiwa gempa bumi, kebakaran, dll.
Developing News	Subklasifikasi dari hard news. Baik spot news maupun developing news yang berkaitan dengan peristiwa yang tidak terduga. Tetapi developing news merupakan bagian dari rangkaian berita yang diteruskan. Peristiwa jatuhnya pesawat adalah peristiwa yang tidak direncanakan, namun ada kelanjutan dari berita yang sebelumnya. Satu berita diteruskan oleh berita lainnya.
Continuing News	Subklasifikasi dari hard news. Dalam continuing news, peristiwa-peristiwa dapat diprediksikan dan direncanakan. Peristiwa ditetapkannya memorandum sampai dengan siding istimewa merupakan contoh dari continuing news.

Sumber: Eriyanto:2002:109-110

#### 4. Ideologi Profesional/ Objektivitas

Standar profesional berhubungan dengan jaminan yang ditekankan kepada khalayak bahwa apa yang disajikan adalah suatu kebenaran. Menurut Shoemaker dan Resse, objektivitas lebih merupakan ideologi bagi jurnalis dibandingkan seperangkat aturan dan praktik yang disediakan oleh jurnalis. Obyektivitas adalah ideologi jurnalis modern. Ideologi ini adalah konstruksi untuk memberikan kesadaran kepada khalayak bahwa pekerjaan jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Obyektivitas juga memberikan legitimasi kepada media untuk disebarkan kepada khalayak bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran. Apa yang ditawarkan adalah benar-benar terjadi dan bukan opini dari wartawan. Objektivitas dalam proses produksi berita secara umum adalah memisahkan antara fakta dan opini. Berita adalah fakta dan karenanya dalam proses pencarian berita



dan penulisan berita, tidak diperkenankan adanya opini. Berbagai prosedur dan kontrol tersebut untuk menunjukkan bahwa pekerjaan wartawan dan media adalah menyampaikan fakta.

Dalam kaitannya dengan pemberitaan LPP TVRI tentang Kenaikan BBM dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas, konstruksi berita yang didistribusikan secara kuantitatif adalah dengan seringnya atau tingginya intensitas pemberitaan LPP TVRI terkait isu Kenaikan BBM dan Kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Terhitung sejak munculnya kedua isu tersebut, LPP TVRI secara konsisten dan simultan, selalu menyajikan pemberitaan terkait kedua isu tersebut dalam setiap segmen bulletin berita TVRI. Hal ini membuktikan bahwa konstruksi berita LPP TVRI secara kualitatif sejalan dengan isu yang sedang bergulir. Sementara secara kualitas isi berita, LPP TVRI berupaya menampilkan berita tentang isu kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, secara obyektif dan berdasarkan fakta di lapangan. Obyektivitas pemberitaan TVRI tentang kedua isu terkait, dapat dilihat dari upaya LPP TVRI dalam memandang kebijakan yang diambil pemerintah itu secara proporsional dan tidak memihak. Sebagai sebuah institusi milik pemerintah, TVRI telah mengkonstruksikan beritanya dengan menampilkan alasan-alasan kebijakan pemerintah itu diambil dan berupaya memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang alasan tersebut. Sementara di sisi lain, LPP TVRI juga secara obyektif juga tetap menampilkan pemberitaan terkait kedua isu, berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan. Sebagai institusi media yang membawa nama publik, TVRI juga telah mengkonstruksikan beritanya terkait kedua isu tersebut dengan tepat, yakni berupaya menyampaikan fakta di lapangan dengan menampilkan pemberitaan mengenai keresahan warga atas kebijakan yang diambil pemerintah tersebut.

### 2.3.5 Pembentukan Opini Publik dan Konstruksi Realitas Berita Politik.

Konstruksi berita dalam suatu institusi media juga terkait dengan upaya pembentukan opini publik. Opini publik dapat didefinisikan bermacam-macam. Bagi Noelle-Neumann (1984:178), opini publik adalah sikap-sikap atau perilaku yang harus diungkapkan seseorang kepada publik jika orang tersebut tidak mengasingkan dirinya sendiri; dalam bidang yang menimbulkan pertentangan atau perubahan, opini publik adalah sikap-sikap yang diungkapkan seseorang tanpa membahayakan pengasingan dirinya sendiri. Dengan kata lain, opini publik adalah suatu pemahaman pada sebagian orang dalam komunitas yang terus-menerus menaruh perhatian terhadap beberapa pengaruh atau masalah yang sarat nilai dimana baik individu maupun pemerintah harus menghargainya paling tidak berkompromi berupa perilaku terbuka berdasarkan ancaman untuk dikeluarkan atau diasingkan dari masyarakat. (Heru Puji Winarso:2005:95)

Hamad (2004:2) menjelaskan, dalam kerangka pembentukan opini publik, media massa pada umumnya melakukan tiga tindakan sekaligus. Pertama, menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*). Kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*). Ketiga, melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*). Tatkala melakukan tiga tindakan itu, sebuah media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan kekuatan politik tertentu dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku dan kekuatan-kekuatan lainnya. Dengan demikian satu peristiwa politik dapat menimbulkan opini publik yang berbeda tergantung dari cara masing-masing media melaksanakan ketiga tindakan tersebut.

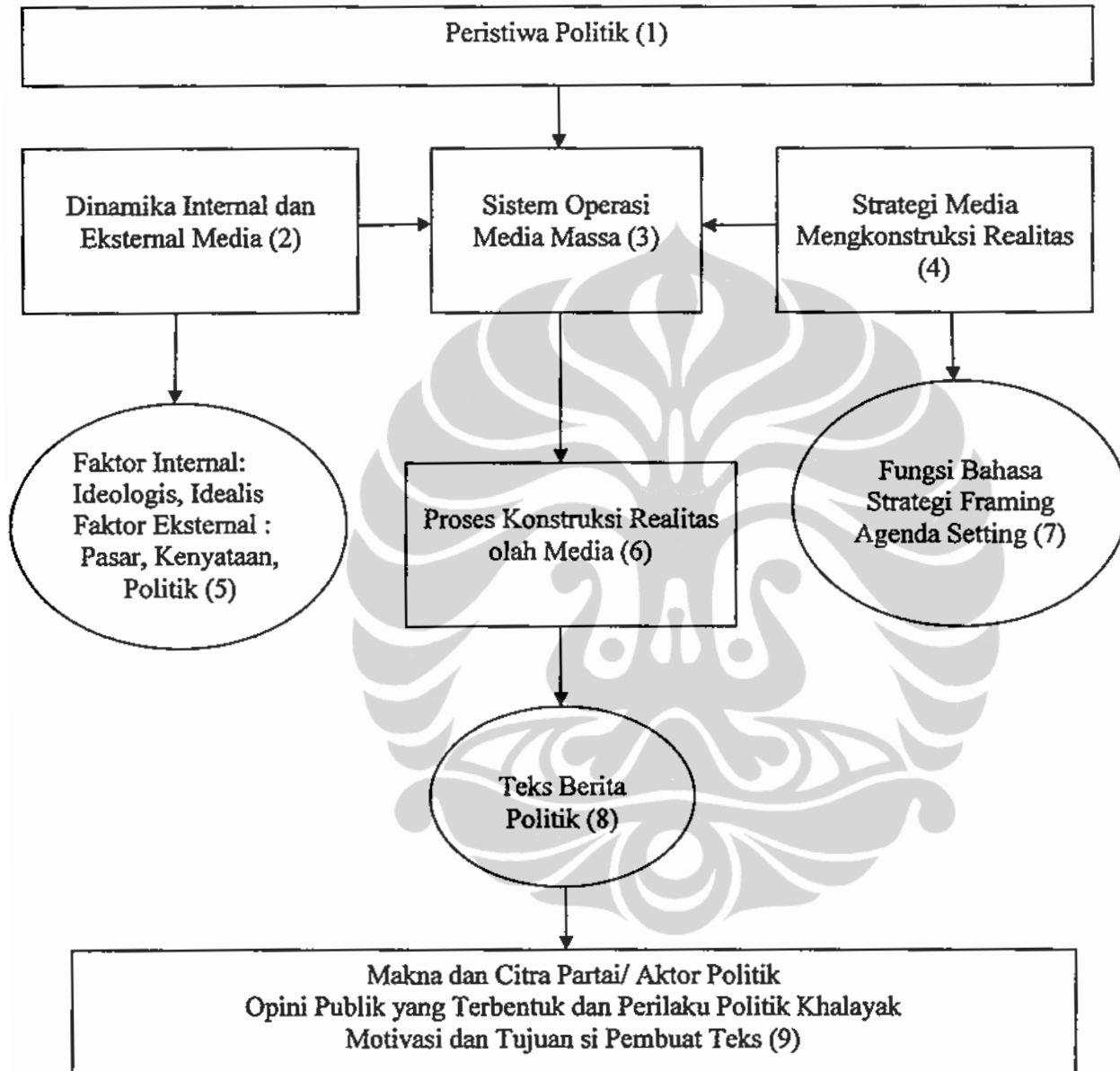
Fungsi demokratis dari system media adalah bertindak sebagai agen perwakilan hal ini harus diatur oleh suatu cara yang terkait dengan kelompok sosial dan organisasi yang beragam dalam mengekspresikan pandangan – pandangan. Hal ini memungkinkan adanya beragam opini di dalam ranah publik. Sebagai bagian dari system media harus berfungsi untuk masyarakat sipil. Peranan media termasuk membantu menciptakan kondisi dengan pandangan dan perspektif yang beragam yang siap diperankan. Hal ini berimplikasi pada

konsumsi media yang dipengaruhi oleh aktifitas politik, opini politik dari kepemilikan saham yang terkait dengan aktifitas politik dan menggiring kekuatan demokrasi dalam masyarakat dalam rangka mencerahkan opini publik dalam ruang publik yang terbentuk dari argument dalam gagasan – gagasan di media masa. Hal ini merupakan kiat untuk mengontrol kekuasaan yang didominasi oleh para elit. Inti dari ruang publik adalah semua kepentingan dan interaksi antara seseorang dan orang lain dalam membangun kesepahaman dan kompromi dalam masyarakat. Satu bagian dari system media harus dapat menyediakan arena publik dalam masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda, disamping itu juga harus menyediakan channel komunikasi yang terhubung dengan kelompok – kelompok organisasi dan jaringan sosial dan arena publik. Dilain pihak juga harus dapat memfasilitasi komunikasi antara ruang publik pada umumnya antara ruang publik bagimasyarakat umum dengan individu – individu yang memiliki strata sosial yang berbeda. (Curran:1992: 102-104)

Karakteristik media massa dalam liputan politik yang digambarkan pada penampang dibawah ini direkomendasikan oleh Hamad dapat digunakan untuk melakukan visualisasi terhadap dinamika yang terjadi dalam pembentukan teks apapun seperti berita, feature, tajuk rencana baik yang ada di media cetak ataupun di media elektronik.

Secara global, Hamad menjelaskan bahwa lahirnya berita politik (8) senantiasa dimulai dengan peristiwa politik (1) baik yang menyangkut organisasi maupun actor politik. Pengkonstruksian realitas politik (6) hingga membentuk makna dan citra tertentu (9) pertama-tama akan tergantung pada faktor system media massa yang berlaku; pembuatan wacana politik dalam system media libertarian akan lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan system otoritarian. Proses pembuatan berita politik juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal media (2) dan (5) serta perangkat pembuatannya sendiri (4) dan (7).

Penampang :  
Karakteristik Liputan Peristiwa Politik



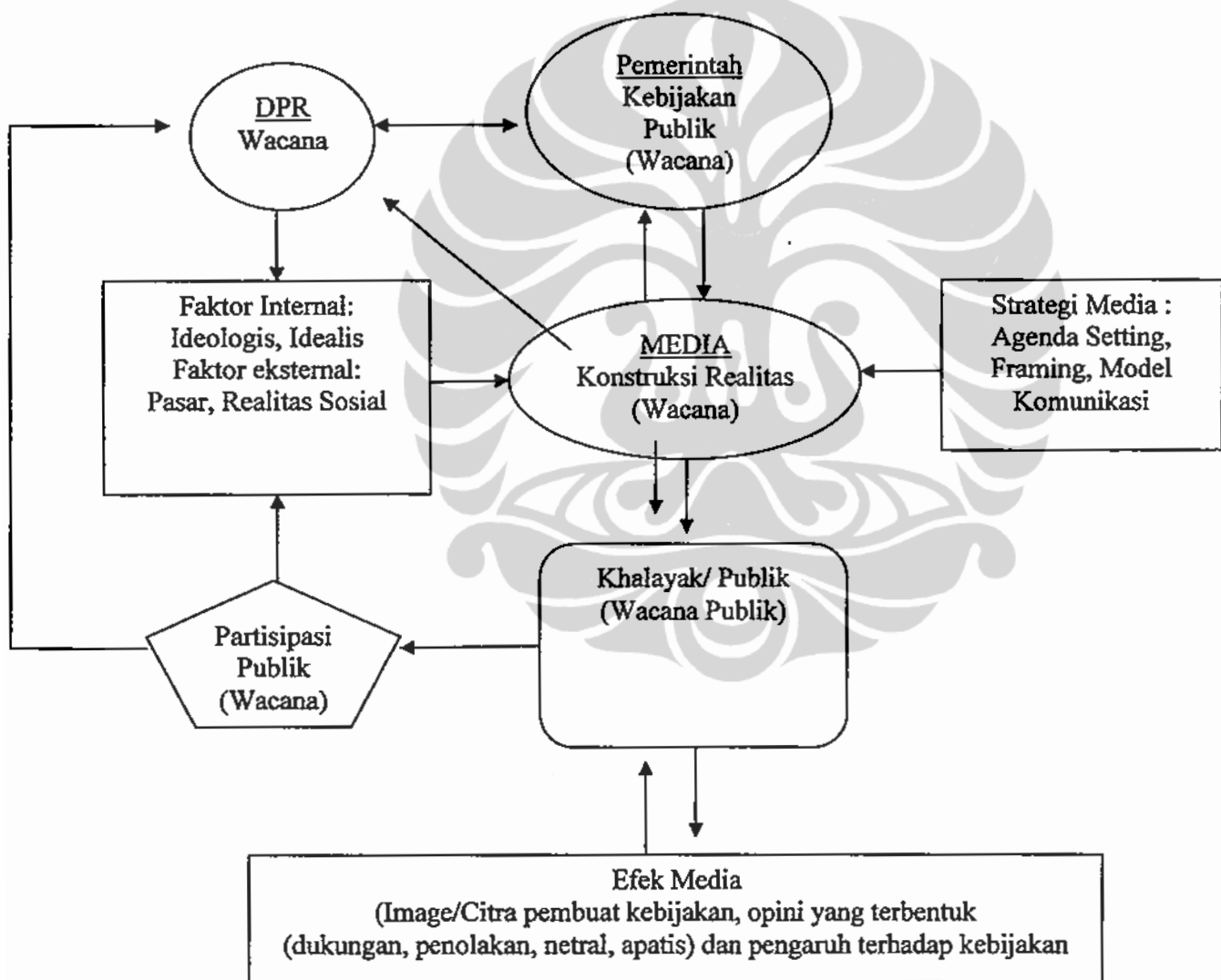
Gambar 2.2: Karakteristik Liputan Peristiwa Politik

Sumber : Hamad, 2004:5

Penampang yang digambarkan diatas dapat menjadi salah satu acuan untuk mengetahui bagaimana teks diproduksi. Untuk penelitian ini, penampang tersebut dimodifikasi kembali untuk menjelaskan proses pemberitaann kebijakan publik

(dalam hal ini kebijakan kenaikan BBM dan Konversi Minyak tanah ke gas) dan konstruksi realitas oleh media massa khususnya media elektronik hingga pemberitaan disiarkan. Penampang di bawah ini sekaligus menggambarkan keseluruhan alur pemikiran yang ada di bab ini dalam upaya mengetahui konstruksi realitas yang disajikan media :

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran



Gambaran penampang 2 dalam setiap bentuk gambarnya mempunyai makna tersendiri. Gambaran kebijakan pemerintah berbentuk lingkaran yang dimaknai sebagai bentuk keputusan yang bulat dari pemerintah namun dengan bentuknya

yang bulat dari pemerintah namun dengan bentuknya yang bulat itu pula dapat dipengaruhi oleh ideologi media massa, partisipasi publik baik melalui media massa maupun melalui perwakilan rakyat di lembaga legislative, untuk DPR digambarkan bulat seperti pemerintah, karena pandangan dalam legislatif pun dipengaruhi berbagai ideologi yang ada di dalamnya (partai-partai), pengaruh dari argumen pemerintah (misalnya dengan rapat kerja), realitas yang ditampilkan media, realitas sosial dan juga partisipasi masyarakat.

Ketika informasi kebijakan dari pemerintah disampaikan melalui media yang digambarkan berbentuk lonjong/oval dengan asumsi media dapat menampung beragam peristiwa, data dan informasi, namun bentuk oval tersebut dapat dipengaruhi oleh proses eksternal, internal dan strategi media (bentuk kotak) sebelum sampai kepada khalayak/publik, media melakukan proses konstruksi realitas, salah satunya dengan mencari langsung data dan pendapat publik (secara selektif, dengan memilih narasumber dari berbagai kalangan seperti DPR, pengamat, praktisi dan lainnya) mengenai kebijakan yang digulirkan tersebut, beberapa berita ada yang secara obyektif realitas disampaikan ada juga yang mengalami proses konstruksi, maka ketika turun ke khalayak akan menyebabkan beragam tanggapan masyarakat (digambarkan dalam bentuk segi lima).

Khalayak yang menerima terpaan media mempunyai beragam reaksi dan tanggapan, bentuk ini kemudian ada yang bereaksi dengan berpartisipasi membawa masing-masing perspektif dan motifnya (digambarkan dalam bentuk segi lima) ini mengalami proses seleksi sesuai kebijakan media masing-masing untuk ditampilkan di media massa.

Akibat terpaan konstruksi realitas yang telah direkonstruksi secara konsisten maka efek dari media itu dapat berdampak pada citra kebijakan itu, (pembuat kebijakan), penolakan atau penerimaan, netral atau masyarakat dapat menjadi apatis. Netralitas dan apatisisme dapat terjadi bila konstruksi realitas yang disajikan berbeda-beda di setiap media, terlebih bila perbedaan ini mencolok dalam pola kecenderungan pro maupun kontra. Sehingga yang terlihat adalah seperti pertarungan perebutan wacana.

Wacana (*discourse*) yang sering salah kaprah diartikan sebagai perbincangan, merupakan bingkai yang membatasi ruang berpikir publik. Wacana

bahkan mempunyai kuasa untuk membentuk cara berpikir dan bertindak publik, dan oleh sebab itu ia diperebutkan berbagai kelompok, kaum dan golongan. Siapa yang menang wacananya, pikiran dan tindakannya diterima publik sebagai sesuatu yang benar (Nugroho, 2005:51). Oleh karena itu dalam alur pemikiran ini, wacana ada di setiap bentuk tingkatan baik pemerintah (eksekutif), media, publik termasuk legislatif.

Dalam alur komunikasi, tanda panah menunjukkan fungsi komunikasi ada di setiap level dengan menggunakan model komunikasi yang diyakini masing-masing pihak sebagai cara yang terbaik.

Dalam kaitannya dengan pemberitaan tentang kenaikan BBM dan Kebijakan konversi minyak tanah ke gas, pembentukan opini publik yang dilakukan LPP TVRI pertama kali adalah dengan menampilkan pemberitaan melalui symbol-simbol politik yakni bahasa pemberitaan yang tidak menimbulkan kontroversi, prasangka dan menempatkan posisinya secara netral. Yang kedua adalah dengan melakukan strategi pengemasan pesan atau berita yang ditampilkan secara proporsional dan tidak menyudutkan pihak tertentu. Yang ketiga adalah dengan melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*) yakni berupaya menempatkan isu kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas sebagai isu utama dalam setiap pemberitaannya. Dalam melakukan ketiga tindakan tersebut, TVRI juga dipengaruhi oleh faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu misalnya penggunaan bahasa pemberitaan yang tidak frontal dan menyudutkan dalam mengkritisi suatu kebijakan pemerintah.

Terkait dengan konstruksi realitas berita LPP TVRI, dengan menggunakan penampang untuk menjelaskan proses pemberitaan kebijakan publik yakni dalam hal ini kebijakan kenaikan BBM dan konversi minyak tanah ke gas dan konstruksi realitas oleh media massa hingga pemberitaan disiarkan.

Untuk mengetahui konstruksi realitas pemberitaan LPP TVRI terkait isu kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, dipergunakan penampang gambar yang dapat menggambarkan keseluruhan alur pemikiran tentang konstruksi realitas pemberitaan TVRI.

Gambaran kebijakan pemerintah yang berbentuk lingkaran dimaknai sebagai bentuk keputusan yang bulat dari pemerintah namun dengan bentuknya

yang bulat itu dapat dipengaruhi oleh ideologi media massa, partisipasi publik baik melalui media massa maupun melalui perwakilan rakyat di lembaga legislatif, untuk DPR digambarkan bulat seperti pemerintah, karena pandangan dalam legislatif pun dipengaruhi berbagai ideologi yang ada di dalamnya (partai-partai), pengaruh dari argumen pemerintah (misalnya dengan rapat kerja), realitas yang ditampilkan media, realitas sosial dan juga partisipasi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pemberitaan LPP TVRI tentang kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas adalah bahwa kedua kebijakan tersebut merupakan keputusan yang bulat yang diambil pemerintah sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai 110 juta dollar per barel. Namun kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh ideologi TVRI sebagai televisi milik pemerintah, partisipasi publik (sebagai bentuk dari Lembaga Penyiaran Publik), atau perwakilan rakyat di lembaga legislatif (DPR). Dalam menyikapi kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, Dewan Perwakilan Rakyat mengambil beberapa sikap yang terpecah-pecah dari berbagai fraksi antara yang mendukung kebijakan kenaikan BBM dan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut. Pertentangan terhadap kebijakan pemerintah tersebut juga diperkuat dengan penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat berupa aksi unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah tersebut. Selain itu, juga keresahan dari warga terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Ketika informasi mengenai kebijakan tersebut disajikan melalui pemberitaan LPP TVRI dengan beragam peristiwa, data dan informasi, maka dapat dipengaruhi oleh kebijakan editorial media. Untuk itu sebelum informasi sampai ke khalayak, TVRI melakukan proses konstruksi realitas dengan mencari data secara langsung terhadap sejumlah narasumber yang terkait dengan isu kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas seperti pakar perminyakan, anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi permasalahan minyak dan narasumber terkait lainnya. Selain itu yang terpenting adalah pendapat publik itu sendiri.

Dengan memaparkan berita-berita terkait kedua isu tersebut secara obyektif dan berdasarkan fakta, dalam prosesnya mengalami proses konstruksi oleh karenanya ketika berita itu turun ke khalayak, maka tanggapan beragam



muncul di tengah masyarakat. Selain itu juga karena faktor beragamnya informasi yang didapatkan khalayak dari berbagai media yang tentunya memiliki kebijakan editorial masing-masing. Maka proses selanjutnya adalah penolakan, penerimaan ataupun apatisme terhadap suatu isu yang sedang bergulir yang dipengaruhi oleh perbedaan konstruksi realitas yang disajikan setiap media.

### 2.3.6 Konsep Kebijakan Editorial

Dalam sebuah tulisan tepat 40 tahun Kompas yang dilansir dalam salah satu situs Jurnalistik Online, Jacob Oetama menulis seperti ini soal kebijakan editorial:

*Pandangan, sikap hidup, dan orientasi nilai Kompas adalah faham kemanusiaan yang beriman, yang percaya kepada nilai abadi dan nilai kemanusiaan. Bukan saja pendidikan yang diperlukan anak manusia, tetapi juga pencerahan, pendidikan akal budi. Ilmu, kepandaian, kecerdasan menjadi bagiannya. Tetapi juga watak atau karakter, kepribadian, rasa tanggung jawab, kejujuran, dan ketulusan. Orang Perancis menyebut surat kabar sebagai un journal c'est un monsieur, surat kabar bersosok, berpribadi justru karena memiliki pandangan hidup yang transenden serta pandangan hidup kemasyarakatan. Lebih dari sekadar suatu informasi dan peliputan perihal peristiwa dan permasalahan, surat kabar adalah juga interaksi. Dalam bahasa sehari-hari karena itu surat kabar mempunyai policy, editorial policy, kebijakan editorial. Juga kebijakan perusahaan.*

Pandangan dasar koran atau media apapun memang penting untuk memiliki semacam falsafah atau hal-hal fundamental yang membuat sebuah lembaga media berdiri. Jika hanya kebutuhan komersial, lembaga media memang bisa menjadi kaya tetapi tidak memberikan “daya pikat” yang kuat untuk sebuah bangsa secara keseluruhan. Media komersial hanya akan memperkaya para pemilik media itu secara materi tetapi mungkin tidak akan “memperkaya” khasanah kebudayaan bangsa.

LPP TVRI dibangun untuk menambah kecintaan masyarakat terhadap budaya bangsa sendiri. Di tengah terpaan media penyiaran swasta yang komersil dan menawarkan daya pikat hiburan bagi masyarakat, TVRI tetap berusaha eksis untuk mengencounter segala pengaruh buruk dari luar. Namun pada kenyataannya, idealisme ini tidaklah mudah diimplementasikan dalam industri penyiaran. Industri penyiaran yang sarat dengan persaingan dalam hal tayangan, telah membuat TVRI tidak lagi dilihat sebagai suatu pilihan masyarakat dalam menentukan tayangannya.

Begitupun dalam hal pemberitaan yang ada di LPP TVRI, pemberitaan yang cenderung monoton dan dikemas dengan cara yang kurang menarik membuat lembaga ini kehilangan minatnya. Sebagai lembaga dengan mengangkat idealisme yang netral, independen, TVRI berupaya untuk melakukan transformasi dalam berbagai tayangannya. Namun, tidak dapat dinafikan TVRI masih memegang prinsip lama yakni cenderung mendukung pemerintah.

Adapun prinsip-prinsip dasar editorial adalah sebagai berikut (Zulkarimien:2007:19-20) :

- Melaporkan dan menyajikan berita dan peristiwa yang terkini secara jujur melalui pembeberan fakta yang benar-benar terjadi bukan fakta yang direkayasa atau ditafsirkan.
- Hormati hak khalayak untuk mendapatkan keberagaman pandangan dan jangan menyembunyikan fakta yang relevan dan dapat diperoleh.
- Mengupayakan untuk menyajikan seluruh sisi dari sebuah pertanyaan. Usahakan untuk mendapatkan keberimbangan.
- Mengambil keputusan editorial berdasarkan nilai dan prinsip layak berita.
- Prinsip kemerdekaan jurnalistik merupakan hal yang sangat vital terhadap narasumber.
- Mempertimbangkan secara masak, saat ingin menyajikan hal hal yang berbau kekerasan dan kedukaan pribadi.
- Menghormati hak yang sah dari seseorang untuk mendapatkan privasi dan tidak melanggar ruang privasi seseorang yang tengah mengalami kedukaan

kecuali jika berdasarkan pertimbangan adanya kepentingan yang lebih tinggi atas nama masyarakat luas.

Kebijakan editorial hendaknya tidak dipengaruhi oleh iklan, aspek komersial, pertimbangan politik dan hubungan pribadi. Jangan mengambil posisi editorial alias keberpihakan dalam melakukan pelaporan dan penyusunan program.

Dalam menyajikan sebuah kebijakan editorial yang proporsional dan objektif, media harus memperhatikan perimbangan kredibilitas dan imparialitas (Zulkarimien:2007:21-27). Imparsialitas harus menjadi inti dari setiap Lembaga Penyiaran Publik. Imparsialitas merupakan kunci bagi kredibilitas lembaga penyiaran. Khalayak harus mendapatkan jaminan keyakinan terhadap apa yang mereka lihat di televisi. Kredibilitas bergantung bukan hanya pada akurasi dan kebenaran semata, tetapi juga pada keyakinan bahwa wartawan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi imparialitas.

Dalam masyarakat terbuka, kredibilitas merupakan hal yang mendasar bagi setiap lembaga jurnalistik. Kredibilitas lembaga jurnalistik dan para wartawan yang bekerja di lembaga tersebut merupakan hal yang saling terkait. Kredibilitas tidak hanya tergantung pada akurasi dan kebenaran dalam melaporkan sebuah peristiwa, melainkan juga keberpihakan atau parsialitas seorang wartawan terhadap suatu peristiwa yang dilaporkan. Lembaga penyiaran harus menyadari pandangan yang disiarkan ke khalayak yang dilaporkan oleh wartawan mereka dalam program berita dan peristiwa terkini.

Lembaga Penyiaran Publik juga harus menyadari keterlibatan pribadi para wartawan ini, keterkaitan dan latar belakang mereka untuk menghindarkan munculnya pandangan mengenai bias dan pengaruh yang tidak diharapkan saat mereka mengerjakan tugas profesional mereka. Untuk menjaga kredibilitas mereka, mereka harus menghindarkan diri dari keterkaitan dengan pernyataan-pernyataan publik yang partisan atau dari tindakan dan hal yang kontroversial. Program berita harus menyediakan kepada khalayak catatan yang bernilai informasi yang cerdas dari isu yang tengah diberitakan untuk membuat khalayak mampu mengambil kesimpulan sendiri.

Seorang wartawan lapangan diperkenankan untuk menyajikan sebuah penilaian jurnalistik profesional namun bukan opini pribadi. Khalayak tidak boleh merasakan adanya pandangan pribadi dari wartawan yang meliput peristiwa atau topik kontroversial.

Seorang wartawan profesional bukan berarti harus membuang pandangan pribadinya, melainkan harus memiliki kesadaran mengenai pandangan pribadi ini tidak mewarnai liputan mereka.

Untuk mewujudkan keberimbangan dan keadilan maka sebuah berita harus menampilkan seluas mungkin pandangan yang ada mengenai subyek atau topik berita tersebut. Penyusunan program tidak boleh hanya dibatasi pada apa yang ingin diketahui oleh mayoritas khalayak, tetapi juga harus mempertimbangkan pandangan yang mewakili kelompok minoritas dalam masyarakat. Dengan kata lain, berita harus juga mencakup apa yang berhak diketahui masyarakat dan apa yang perlu diketahui masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik harus dapat menjadi cermin dari apa yang tengah terjadi dalam masyarakat yang dilayaninya. Perimbangan antara kebutuhan nasional, regional dan lokal perlu terus dijaga, tidak boleh ada pengistimewaan terhadap satu wilayah tertentu dari suatu negara.

Dalam kaitannya dengan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI memiliki garis yang tidak dapat dilampaui. TVRI memiliki pedoman tertentu dalam arah pemberitaan atau kebijakan editorial dan upayanya menjaga imparialitas. Dalam kaitannya terhadap isu BBM dan Kebijakan Konversi Minyak tanah ke gas, TVRI memiliki kebijakan editorial tertentu sesuai dengan visi dan misi yang dianutnya. Kondisi ini menjadi sulit ketika TVRI juga dituntut untuk menyajikan isu tersebut dengan tetap memegang prinsip imparialitas. Dalam upayanya menuju televisi publik, penulis melihat TVRI memiliki upaya untuk mengarah kepada imparialitas dalam penyajian berita. Terbukti dengan banyaknya pihak atau narasumber dari berbagai kalangan yang diambil sebagai referensi dalam pembuatan naskah berita.

### 2.3.7 Konsep Independensi

Selain perimbangan yang telah disebutkan diatas, seorang wartawan media harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. (Bill Kovach: 2006:123-127) Hal ini berlaku pada mereka yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Independensi semangat dan pikiran inilah yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh wartawan. Kredibilitas berakar pada dedikasi yang sama untuk akurasi, verifikasi untuk kepentingan publik yang lebih besar dan hasrat untuk menyampaikan informasi yang dianut wartawan yang lain.

Dalam beberapa hal, prinsip ini berakar pada pragmatisme ketimbang teori. Seorang mungkin saja membayangkan bahwa wartawan dapat melaporkan sekaligus menjadi peserta dalam sebuah peristiwa. Namun realitasnya menjadi peserta mengburkan semua tugas lain yang harus dilakukannya.

Secara jurnalistik, abad ke 20 dapat didefinisikan sebagai perjuangan bagi demokrasi dalam melawan propaganda, sebuah perjuangan yang tak terhindarkan yang harus dijalani pers yang objektif dan independen. Editorial dan opini publik yang sebelumnya bercampur dengan berita kadang dijadikan berita di halaman depan, kini disusun terpisah dengan ruang dan label yang berbeda. Dari keputusan yang sederhana inilah hal-hal tampak jelas bahwa banyak dari etika baku jurnalisme yang dibentuk terutama prinsip-prinsip yang menyangkut pengambilan posisi politik yang dilakukan reporter.

Meski aturan independensi kian ketat pada 1970-an, hingga 1990an namun selalu saja ada yang menentang atau menghindarinya. Banyak orang yang memperlumahkan konsep independensi semangat dan pikiran dalam jurnalisme. Mereka cemas bahwa independensi jurnalisme telah berkelana ke dalam diri wartawan yang terpisah dari masyarakat pada umumnya.

Dalam mendukung independensi, keterbukaan menjadi penting karena publik berhak tahu apakah seorang reporter terlibat aktif dalam masalah atau dengan orang yang ia liput.

Persoalan independensi tidak terbatas pada ideologi. Sesungguhnya masalah ideologi bahkan lebih mudah ditangani daripada masalah lain. Untuk memahami sepenuhnya peran wartawan maka perlu melihat jenis konflik dan ketergantungan lain. Saat wartawan menjadi lebih terlatih, berpendidikan tinggi,

dan dalam banyak hal juga mendapatkan bayaran yang lebih baik maka muncullah komplikasi lain tentang independensi.

Perkembangan isolasi kelas dipengaruhi oleh penargetan strategis kepada demografi elite, sebuah kebijakan yang banyak diambil perusahaan berita. Hasilnya menjadi ancaman bagi semua jurnalis. Publik kian melihat pers tak lagi sebagai wakil publik yang bertindak atas nama mereka, melainkan sebagai bagian keamanan yang membuat mereka merasa terasing. Namun solusi untuk isolasi kelas bukanlah menolak independensi. Solusinya adalah merekrut lebih banyak orang dari kelas dan latar belakang yang beragam serta berminat bekerja di pemberitaan untuk melawan kepicikan. Beberapa wartawan berpendapat bahwa harus ada sebuah sistem untuk merekrut orang yang mempunyai pengalaman hidup yang berbeda.

Pada akhirnya, pelarangan ketat terhadap setiap jenis keterkaitan personal ataupun intelektual tak menjamin seorang wartawan tetap independent dari faksi politik atau faksi lainnya. Penilaian yang baik dan komitmen abadi pada prinsip kesetiaan pertama kepada warga yang membedakan wartawan dari partisan. Memiliki opini bukan saja boleh dan alamiah tetapi juga berharga bagi skeptisisme alamiah yang dimiliki setiap reporter yang bagus saat mendekati sebuah berita.

Independensi dalam pemberitaan juga tengah diupayakan oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI dalam mewujudkan perubahannya menuju televisi publik. Ada begitu banyak segmen berita yang dikhususkan untuk mengakomodir suara rakyat. Hal ini menjadi kontrol bagi pemerintah dalam menggulirkan suatu kebijakan. Kendati demikian, kebijakan editorial TVRI seringkali diarahkan untuk mendukung penuh suatu kebijakan pemerintah khususnya dalam mengangkat isu kenaikan harga BBM dan Kenaikan minyak tanah ke gas, membuat TVRI sulit untuk mewujudkan independensi secara utuh.

### 2.3.8 Kebebasan Pers

Independensi juga terkait dengan konsep kebebasan pers. Secara umum, kebebasan pers (*press freedom*) dapat didefinisikan sebagai jaminan kebebasan bagi media untuk menjalankan aktivitas jurnalistik dari pencarian berita hingga

mempublikasikan berita. Kebebasan pers adalah syarat mutlak agar media dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. (Lukas Dewarso:2008:7-9) Kebebasan pers berguna bukan hanya bagi media tetapi juga bagi publik. Dengan kebebasan pers, publik bisa mendapatkan informasi yang terpercaya. Dennis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa, melihat kebebasan pers dari dua dimensi yakni kebebasan di level struktur dan penampilan. Pertama, kebebasan di level struktur. Di level ini, kebebasan pers dilihat dari apakah ada jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan pers. Ada sejumlah kondisi struktural yang penting dan harus ada sebagai jaminan atas kebebasan pers, misalnya tidak ada pembredelan. Adanya kebebasan untuk mempublikasikan berita dan tidak ada kewajiban memberitakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh redaksi media. Keputusan peristiwa mana yang diliput dan berita mana yang dipublikasikan didasarkan pada pertimbangan redaksi media. Kondisi struktural lain yang penting adalah bebas dari kontrol pemilik dan kekuatan ekonomi lainnya. Selain dari penguasa, pers bebas juga ditandai oleh bebas dari tekanan atau kontrol dari pemilik. Kedua, kebebasan di level penampilan / pelaksanaan (*performance*). Ini berkaitan dengan bagaimana pers atau media menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk kepentingan publik. Kebebasan yang dimiliki media seharusnya dapat dimanfaatkan oleh media sebagai alat kontrol (*watchdog*) terhadap kekuasaan. Kebebasan pers itu juga seharusnya dapat digunakan untuk menyajikan berita yang berguna dan relevan bagi publik.



Gambar 2.4. : Indikator Kebebasan Pers

Sumber : Lukas Dewarso, dkk: *Mengelola Kebebasan Pers*, Jakarta: Dewan Pers

Pandangan lain mengenai kebebasan pers dan sudut pandang mana yang diliput oleh pers dikemukakan oleh Lichtenberg (1990). Apa dan bagaimana peliputan sebuah berita dan dari sudut pandang apa, menurutnya adalah bergantung pada struktur dan konteks ekonomi dan politik institusi media, dan karakteristik media itu sendiri. Faktor-faktor penting yang mempengaruhinya adalah : (1) Organisasi media banyak yang dimiliki oleh perusahaan besar yang kepentingannya mempengaruhi apa saja yang diliput atau tidak diliput dan bagaimana meliputnya. (2) Kendali organisasi media yang utama adalah dari sisi ekonomi yaitu bagaimana dapat meraih pembaca sebanyak mungkin, karena itu menghindari peliputan hal hal yang dapat membuat khalayak berpaling seperti liputan yang terlalu kontroversial atau terlalu mengganggu. (3) Media juga mudah dimanipulasi oleh pejabat pemerintah atau lainnya dengan memberitakan hanya siaran pers atau pernyataan resmi. (4) Karakteristik media itu sendiri juga membatasi dan mempengaruhi peliputannya.

Dalam kaitan hubungan media dengan pemerintah, kebebasan pers dimaksudkan untuk menginstitutionalkan system (Sabam Leo: 2001:31-34) yakni:



Pertama, misi media adalah turut mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip tersebut antara lain, demokrasi, *rule of law*, menghormati HAM, pembangunan berkelanjutan, transparency dan accountability.

Kedua, mereformasi media menjadi *agents of reforms*. Dalam hubungan media dan eksekutif, peran dan fungsi media adalah sebagai pemberi peringatan dini (*watch dog*) terhadap sikap dan perilaku pemerintah yang bertentangan dengan prinsip *good governance*. Selain itu, media akan terus meyakinkan pemerintah bahwa hanya ada dua pilihan yakni pemerintah menerapkan kembali media seperti sebelumnya dengan konsekuensi terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa terhadap rakyat atau pemerintah tetap memberi peluang bagi media untuk melakukan kontrol sosial, kritik dan koreksi secara bertanggung jawab. Kritik dan koreksi memang sering tidak mengenakan namun terbukti justru menyelamatkan bangsa. Media melayani masyarakat sebagai pasar gagasan terbuka. Informasi yang disajikan ada yang bermakna dan ada yang tidak bermakna. Berbagai gagasan dibenturkan. Adalah tugas media sebagai *agents of reforms* memenangkan gagasan yang lebih bermakna. Dengan demikian media tertantang untuk memberi kontribusi terbaik kepada bangsa. Kepercayaan publik terhadap kredibilitas media akan terbangun. Sejalan dengan demokrasi, pemerintah akan mengacu kepada opini publik yang diproyeksikan oleh media sebelum mengambil kebijakan nasional.

Agar media mampu menjadi *agent of reforms*, maka kebijakan editorial media harus independen, mencerminkan suara hati bangsa. Bebas dari tekanan, kekangan, campur tangan penguasa di pusat dan daerah, konflik kepentingan bisnis dan militer serta kelompok politik dan kelompok masyarakat yang tidak reseptif dan tidak toleran terhadap *public critics*. Tugas media adalah mengkomunikasikan fakta dan kebenaran. Proteksi terhadap kebebasan pers editorial yang independen hanya mungkin jika konstitusi dan undang-undang melindungi demokrasi dan kebebasan pers.

Usaha memperjuangkan kebebasan pers tidak dapat lepas dari keberadaan sistem politik (Nurudin:2000:79). Sistem politik merupakan satu-satunya yang dapat memberikan ruang gerak bagi kebebasan pers terutama bagi negara yang menerapkan korporatisasi yang kuat. Sebab, sistem politik memungkinkan

diciptakannya system pers yang mampu menjamin kebebasan pers. Dengan demikian, karena sistem merupakan bagian dari sistem politik, sedangkan kebebasan pers bagian dari system pers maka kebebasan pers akan tergantung pada sistem politik.

Oleh karena itu, akibat ketergantungan sistem pers pada politik, peran pemerintah untuk ikut menentukan kebijakan kebebasan pers sangat kuat. Maka, sistem pers hanya dapat diubah jika sistem politik suatu negara juga berubah.

Dalam kaitannya dengan peranan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, terdapat berbagai perubahan secara signifikan terkait dengan arah pemberitaan TVRI. Setelah berubah statusnya menjadi dan didukung dengan system pemerintah yang mulai beranjak demokratis dalam segala hal termasuk pers, TVRI secara bertahap dapat mempraktekkan kebebasan pers sebagai wujud demokrasi. Mulai banyaknya segmen berita dan editorial yang menekankan pada kritikan dan himbauan kepada pemerintah, merupakan suatu bukti bahwa TVRI telah menjalankan peranannya dalam koridor kebebasan pers. Hal ini juga semakin diperkuat dengan mulai bermunculannya program acara yang memungkinkan public mengambil bagiannya dalam menyuarakan pendapatnya. Siaran-siaran langsung baik yang bernuansa sosial budaya, maupun politik mulai banyak dimaksimalkan. Hal ini menjadi penting karena dengan memberikan kesempatan publik untuk bersuara secara interaktif baik melalui sambungan telepon ataupun di studio, telah membuka ruang public bagi masyarakat sebagai salah satu wujud dari kebebasan pers.

### **2.3.9 Konsep Lembaga Penyiaran Publik**

Sebelum masuk ke istilah Lembaga Penyiaran Publik, kita perlu menyepakati bersama (sejauh yang dimungkinkan), mengenai: dalam konteks apa kata publik ini dipakai setiap kita menyebut istilah Lembaga Penyiaran Publik.

Kata *publik*, ketika membicarakan Lembaga Penyiaran Publik, umumnya diletakkan dalam konteks “warga negara (citizen) dengan hak – haknya”. Menjadi warga negara dan mendapatkan hak – haknya adalah konsekuensi logis secara hukum (juga konsekuensi politis, administrative, dll) dari kontrak sosial bersama,

yang melahirkan negara, berikut dengan: wilayah sebuah negara, warga negara, dan pemerintahan, serta atribut lainnya dari negara tersebut.

Secara khusus, kata publik dalam bentukan penyiaran publik, diposisikan sekaligus dalam 2 pengertian yakni khalayak (pemirsa atau pendengar) dan sebagai partisipan yang aktif. Pemahaman ini terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk mendapatkan informasi, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses demokratisasi dan perjalanan menuju masyarakat madani.

Menurut pakar penyiaran publik Marc Raboy (1999), dalam dunia penyiaran, makna citizenship (hal – hal yang berkaitan dengan warga negara) selama ini sangat buruk implikasinya. Sebagai warga negara, orang tidak bisa pasif. Menjadi warga negara adalah sesuatu yang terkait dengan hak – hak politik. Jika Penyiaran Publik dikaitkan dengan ide – ide tentang warga negara, maka secara logis ia harus dipisahkan dari kekuasaan negara yang otoriter. Pada saat yang sama, ia juga tidak bisa diperdagangkan (komodifikasi, atau dijual kepada pemasang iklan).

Lembaga Penyiaran Publik diharapkan diharapkan bekerja sama seluas – luasnya, mengundang serta menyambut ketrelibatan publik, khususnya melalui sebuah Lembaga Supervisi Penyiaran Publik pada tingkat – tingkatan yang relevan dengan keberadaan lembaga itu (misal pada level nasional atau pada level daerah). “Lembaga Penyiaran Publik memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh publik”.

Dengan adanya keterlibatan publik pada perencanaan program, pengembangan kedepan, dan evaluasi terhadap program misalnya, maka apa yang sering dianggap “dewa” oleh Lembaga Penyiaran Komersial yakni rating dan iklan, tidak dapat mengalahkan segala – galanya pada Lembaga Penyiaran Publik. Jika publik merasa bahwa suatu program membawa manfaat besar bagi publik, walaupun pada saat perencanaan telah didisadari bahwa program ini tidak akan menghasilkan rating dan iklan yang tinggi (begitu pula ketika kemudian memang terbukti setelah ditayangkan beberapa minggu atau bulan), maka program tersebut tetap akan dipertahankan oleh Lembaga Penyiaran Publik. (Effendi Gazali: 2003:89-91)

Dalam bukunya yang berjudul *Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia*, Hinca Panjaitan menyebutkan Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik dijalankan oleh dua dewan yaitu dewan pengawas dan dewan direksi yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan pengawas ditetapkan oleh presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk lembaga pusat atau oleh gubernur, bupati, dan walikota atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lembaga penyiaran publik setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah atau masyarakat (Hinca Panjaitan:1998:180).

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :

- a. Iuran penyiaran
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Sumbangan masyarakat
- d. Siaran Iklan
- e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Dalam menyajikan sebuah pemberitaan, para pengelola lembaga penyiaran publik harus :

- a. Menyediakan tempat bagi semua pihak yang relevan untuk menyampaikan pandangan mereka.
- b. Memastikan pandangan yang bertentangan dengan pandangan yang menjadi anutan masyarakat luas tidak disajikan secara keliru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- c. Imparsialitas baru dapat dicapai melalui serangkaian program sehingga menjadi jelas bagi khalayak.
- d. Mempertimbangkan untuk membuat diskusi lanjutan melalui berbagai cara misalnya dengan telepon interaktif sebagai cara untuk mewujudkan imparsialitas.

Pemahaman media sebagai institusi bisnis tersebut menjadi amat penting untuk mengkaji kepentingan publik ditengah proses liberalisasi sektor industri media, khususnya yang berlangsung disektor industri penyiaran. Sebab, sektor dinamika industri penyiaran jelas melibatkan penggunaan public goods (gelombang elektromagnetik) dalam proses komodifikasi informasi untuk kepentingan akumulasi keuntungan dan modal, yang belum tentu sejajar atau sejalan dengan kpentingan publik. (Dedy Nur Hidayat:2003:12-14)

Dalam konteks upaya memerhatikan kepentingan publik tersebut, memang kemudian apa yang dipahami sebagai kepentingan publik itu sendiri menjadi salah satu pokok perdebatan tajam dalam mengkonstruksi struktur sebuah industri penyiaran. Bagaimnaa kita harus mendefinisikan “kepentingan publik?”, atau apa saja yang menjadi “kepentingan publik?”

Sebab, sebenarnya yang pertama – tama harus diketengahkan dalam wacana seputar industri penyiaran bukanlah apa yang menjadi kepentingan publik, tetapi bagaimana secara demokratis dan rasional publik sendiri bisa menyelenggarakan wacana untuk mendefinisikan apa yang menjadi kepentingan mereka tanpa adanya dominasi interfensi negara dan pasar.

Dalam sebuah struktur ekonomi politik otoriter, dimana industri penyiaran dikuasai oleh state regulation, rejim penguasa amat berperan dalam mendefinisikan apa yang menjadi “kepentingan publik”, “masalah sosial”, “tantangan nasional”, “tuntutan pembangunan” dan sejenisnya. Sementara itu, dalam struktur pasar yang liberal market regulation akan menciptakan dominasi kekuatan pasar dalam mendefinisikan (tepatnya: menciptakan) apa yang menjadi “kepentingan publik” atau “selera publik”. Kaidah – kaidah ataupun tuntutan struktural pasar itu sendiri lahan pertaniannya, tuntutan kelompok minoritas dan sejenisnya lagi, selalu berpeluang kecil untuk diangkat dan didefinisikan oleh media sebagai isu – isu yang menyangkut “kepentingan publik”.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan sebenarnya adalah public spheres, ruang atau kawasan, yang relative terlindung dari intervensi negara ataupun pentrasi pasar, dimana publik bisa menyelenggarakan wacana yang demoktratis dan rasional guna mendefinisikan apa yang menjadi kepentingan mereka. Konsep public sphere yang pada awalnya diketengahkan oleh Habermas berdasarkan

penggambaran kondisi di Eropa pada abad ke 17 bisa dideskripsikan sebagai sebuah ruang publik yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara, dimana publik melakukan diskusi yang rasional membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. (Habermas 93) Konsepsi *public sphere* pada intinya menunjuk pada suatu kawasan atau ruang yang netral dimana publik memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sejajar pula bebas dari dominasi negara ataupun pasar. Ruang publik sebagai zona netral dimana akses untuk mendapatkan informasi bagi publik sangatlah baik dan tersedia untuk mendapatkan informasi yang sesuai. Dimana akses untuk mendapatkan informasi publik tersedia luas. Dengan ruang publik orang dapat menentukan argument yang rasional dalam melihat perkembangan masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan pemerintah. Media memfasilitasi proses ini dengan menyediakan arena untuk suara publik dalam bentuk opini publik. (Curran:1992:83)

TVRI lahir sebagai Lembaga Penyiaran Publik bertepatan pada peringatan ulang tahun TVRI yang ke 44, pada 24 Agustus 2006. Hal ini sebagai realisasi dari Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang televisi publik. Diresmikannya TVRI sebagai televisi publik didasarkan pada kesadaran bahwa bagaimanapun sebuah negara membutuhkan televisi publik. Selain itu, lahirnya LPP memberikan harapan baru bagi TVRI untuk lebih mendekati diri pada rakyat dan menjalankan fungsi media sebagaimana mestinya. Kelahiran LPP juga diharapkan menjadi referensi dan alternatif tontonan bagi publik yang mulai jenuh dengan tayangan televisi swasta yang sarat dengan hal hal yang mengumbar sensasionalisme, kriminal dan mistis.

### 2.3.10 Teori Pers

Tiga orang cendekiawan Amerika, masing-masing Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm pada tahun 1956 menerbitkan sebuah buku dengan judul "*Four Theories of The Press*". Buku tersebut mengupas empat buah sistem pers yang berlaku di berbagai negara di dunia, yaitu Authoritarian Theory, Libertarian Theory, Soviet Communist Theory dan Social Responsibility Theory (Onong Uchjana:2003:226-273)

### 2.3.10.1 Authoritarian Theory (Teori Otoriter)

Teori otoriter yang seringkali disebut sebagai sistem otoriter berkaitan erat dengan sistem pengawasan terhadap media massa yang memiliki pengaruh sangat kuat, sehingga pers dijuluki the *fourth estate* (kekuasaan keempat) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Aplikasi teori ini dimulai pada abad 16 di Inggris, Perancis dan Spanyol yang pada zaman berikutnya meluas ke Rusia, Jerman, Jepang, dan negara-negara lain di Asia dan Amerika Latin.

Dalam hal ini, pers mempunyai kewajiban mengabdikan kepada kepentingan pemerintah atau kerajaan. Sistem yang menganut teori ini membenarkan perorangan atau lembaga swasta memiliki lembaga penerbitan pers, namun izinya tetap ditentukan oleh pemerintah dan setiap yang tidak ditentukan izin dapat dicabut kembali pemerintah sebagai pemilik sistem pers. Sensor, pencabutan izin, tekanan (teror), dan sebagainya adalah elemen-elemen aparatus pemerintahan tiran dalam mengendalikan kegiatan pers.

Menurut Fred S. Siebert, teori otoriter menyatakan bahwa hubungan antara media massa dengan masyarakat ditentukan oleh asumsi-asumsi filsafat yang mendasar tentang manusia dan negara. Dalam hal ini mencakup : sifat manusia, sifat masyarakat, hubungan antara manusia dengan negara, dan masalah filsafat yang mendasar, sifat pengetahuan dan sifat kebenaran.

Teori otoriter adalah pers yang mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa melayani negara. Dalam system Otoriter, pers dapat dimiliki baik secara publik atau perorangan. Namun demikian, tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan pemerintah. (Severin Tankard:2008:374)

Teori otoriter mengenai fungsi dan tujuan masyarakat menerima dalil-dalil yang menyatakan bahwa pertama-tama seseorang hanya dapat mencapai kemampuan secara penuh jika ia menjadi anggota masyarakat. Sebagai individu lingkup kegiatannya benar-benar terbatas, tetapi sebagai anggota masyarakat kemampuannya untuk mencapai suatu tujuan dapat ditingkatkan tanpa batas. Atas dasar asumsi inilah, kelompok lebih penting daripada individu karena hanya melalui kelompok seseorang dapat mencapai tujuannya.

Teori tersebut telah mengembangkan proposisi bahwa negara sebagai organisasi kelompok dalam tingkat paling tinggi telah menggantikan individu dalam hubungannya dengan derajat nilai, karena tanpa negara seseorang tak berdaya untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia beradab. Ketergantungan seseorang pada negara untuk mencapai peradaban telah menjadi unsur utama bagi sistem otoriter.

### 2.3.10.2 Libertarian Theory ( Teori Liberal )

Seperti halnya Teori Otoriter, Teori Liberal juga dikemukakan oleh Fred S. Siebert. Ditegaskan olehnya bahwa untuk memahami prinsip pers di bawah pemerintahan demokratik, seseorang harus memahami filsafat dasar dari liberalisme yang dikembangkan pada abad 17 dan 18.

Prinsip-prinsip filsafat liberal seperti otoriterisme didasarkan pada jawaban terhadap pertanyaan mengenai sifat manusia dengannya, serta sifat pengetahuan dan kebenaran.

Bagi kehidupan pers abad 18 merupakan abad yang penting dalam hubungannya dengan paham liberalis. Pada abad itu, terdapat dua hal penting yakni perihal fitnah yang mengandung hasutan, dan perihal hak pers untuk memberitakan kebijaksanaan pemerintah.

Falsafah libertarian yang menuntut kebebasan pers sepenuhnya. Kaum libertarian yakin bahwa kebebasan pers itu adalah hak-hak yang harus ditegakkan. Asumsi **Teori Pers Kaum Libertarian** adalah pers harus memiliki kebebasan dalam membantu manusia untuk mencari kebenaran, kebenaran yang ditemukan melalui penalaran akibat adanya akses informasi dan gagasan.

Libertarian juga berpendapat bahwa ekspresi bebas akan menciptakan koreksi; karenanya, aneka batasan terhadap kegiatan membaca dan menulis harus ditekan sekecil mungkin. Tiga alasan mengapa kaum libertarian menentang sengit upaya sensor terhadap pers: *pertama*, sensor melanggar hak alamiah manusia untuk berekspresi secara bebas; *kedua*, sensor memungkinkan tiran mengukuhkan keuasannya dengan mengorbankan kepentingan orang banyak; dan *ketiga*, sensor menghalangi upaya pencarian kebenaran. Kaum libertarian adalah komunitas di



Barat pada abad pertengahan yang menentang campur tangan negara atau kerajaan terhadap aktivitas pers.

Di bawah Teori Liberal, pers bersifat swasta dan siapapun yang mempunyai uang yang cukup dapat menerbitkan media. Media dikontrol dalam dua cara. Dengan beragamnya pendapat, proses pembuktian kebenaran dalam pasar bebas gagasan akan memungkinkan individu membedakan mana yang benar atau salah. Teori Liberal mengatakan bahwa manusia mampu membetulkan kesalahannya, namun hanya bila ada kemungkinan atau kesempatan berdiskusi dan menyampaikan pendapat agar fakta dan kebenaran akhirnya dapat terlihat. (Severin Tankard:2003:376-377).

Perjuangan untuk mengakui prinsip-prinsip liberal yang mempengaruhi pers itu, mencapai puncaknya dengan diformulasikan dan diterimanya Bill of Rights yang mencakup peraturan-peraturan yang menetapkan kebebasan pers, meski tidak tegas sehingga menimbulkan berbagai interpretasi. Dari sejumlah butir yang tercakup oleh Bill of Rights hanya satu butir yang tampaknya diterima tanpa interpretasi yakni bahwa kebebasan pers tidak mutlak, melainkan dapat dikenakan pembatasan yang bagaimana yang dapat dikenakan pembatasan,, tetapi pembatasan yang dapat dikenakan pada pers dalam liberalisme menjadi permasalahan.

Fungsi pers menurut Teori Liberal dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengabdikan kepada sistem politik dengan menyajikan informasi, diskusi dan debat mengenai peristiwa umum;
- b. Menyebarkan penerangan kepada khalayak agar mampu berpemerintahan sendiri;
- c. Mengawal hak-hak asasi pribadi dengan mengabdikan kepadanya sebagai penjaga dalam menghadapi pemerintah;
- d. Mengabdikan kepada sistem ekonomi, terutama dengan jalan mempersatukan para pembeli dan penjual barang dan jasa melalui media periklanan;
- e. Menyajikan hiburan;
- f. Mengusahakan dana bagi kebutuhan sendiri sehingga bebas dari tekanan pihak yang berkepentingan.

Teori Liberal menitikberatkan superioritasnya pada prinsip kebebasan perorangan, penilaian dan aksioma bahwa kebenaran, jika diberi kebebasan, akan muncul sebagai pemenang dalam setiap perjuangan. Ia telah menjadi bagian integral dari jajaran demokrasi yang telah menghasilkan kemajuan yang menakjubkan bagi kesejahteraan umum.

### **2.3.10.3 Soviet Communist Theory ( Teori Komunis Soviet)**

Teori ini dikupas oleh Wilbur Schramm dalam buku *Fourth Theories of the Press*. Situasi politik di Uni Soviet memiliki pengaruh terhadap sistem pers dan media massa. Pada dekade 1980-an, akibat terjadinya glasnot dan perestroika sebagai hasil pemikiran Gorbachov di negara itu terjadi semacam kebebasan yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Hingga kini belum diketahui sistem pers di negara itu. Negara-negara yang menganut paham komunisme bukan hanya Uni Soviet tetapi juga di beberapa negara seperti Eropa, Asia dan Amerika Latin. Meskipun di Rusia terjadi perubahan sistem politik yang berpengaruh terhadap sistem pers, belum tentu terjadi perubahan di negara komunis lainnya. Teori ini bertujuan membantu keberhasilan dan kelangsungan system Soviet. Media dikontrol oleh tindakan ekonomi dan politik dari pemerintah dan badan pengawas dan hanya anggota partai yang royal dan anggota partai ortodoks saja yang bisa menggunakan media secara regular. Media dalam system Soviet dimiliki dan dikontrol oleh negara dan hanya sebagai kepanjangan negara. (Severin Tankard:2003:380). Oleh karenanya, ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, perlu mengetahui paparan Wilbur Schramm mengenai Teori Pers Komunis Soviet tersebut.

Schramm berpendapat bahwa pengawasan terhadap media massa harus berpijak pada mereka yang memiliki fasilitas, sarana percetakan, stasiun siaran. Selama kelas kapitalis mengawasi fasilitas fisik ini, kelas buruh tidak akan mempunyai akses pada saluran-saluran komunikasi. Kelas buruh harus mempunyai sarana komunikasi sendiri. Demikian pula kaum buruh harus berpikir bahwa kebebasan pers yang sebenarnya tidak akan ada kecuali dalam masyarakat tanpa kelas dimana kelas kerja telah merebut perlengkapan komunikasi dan tidak takut lagi akan pengawasan para pemilik borjuis.

Teori ini sebenarnya hampir serupa dengan teori pers otoriter. Perbedaannya terletak pada kepemilikan dan pengelolaan. Media pers hanya boleh dimiliki oleh pemerintah. Swasta atau perorangan tidak dimungkinkan terlibat dalam pemilikan media pers. Pengelolaan media pers Soviet ditangani sepenuhnya oleh kalangan elit Partai Komunis yang loyal. Pers dalam hal ini mengabdikan pada kepentingan Soviet di seluruh dunia. Soviet dalam hal ini adalah sebuah bangsa yang menyebar pada berbagai negara-negara di blok Timur (Pakta Warsawa) selama Perang Dingin berlangsung.

Mengenai kebebasan pers, meski tercantum dalam pasal 125 Konstitusi USSR, tetapi dinilai oleh orang Barat sebagai kebebasan pers yang beda dengan yang berlaku di negara-negara non komunis. Konsep kebebasan pers di Uni Soviet adalah kebebasan negatif, yakni kebebasan dari, sedangkan konsep kebebasan pada sistem tanggung jawab sosial adalah kebebasan positif, yakni kebebasan untuk. Jika dikatakan bahwa pers atau media massa di Uni Soviet itu bebas, bukan bebas untuk menyatakan pendapat, melainkan bebas dari kapitalisme, individualisme, borjuasi dan anarki.

#### **2.3.10.4 Social Responsibility Theory (Teori Tanggung Jawab Sosial)**

Teori Tanggung Jawab Sosial oleh Theodore Peterson dinyatakan sebagai pergeseran dari Teori Liberal. Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis, berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang hakiki.

Fungsi pers dalam Teori Tanggung Jawab sosial pada dasarnya adalah sama dengan fungsi dalam teori Liberal, tetapi Teori Tanggung Jawab Sosial merefleksikan ketidakpuasannya mengenai interpretasi terhadap fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaannya yang dilakukan para pemilik dan petugas pers.

Teori ini berkembang di AS setelah Perang Dunia II. Waktu itu warga AS sadar bahwa perslah satu-satunya instrumen sosial yang mendapatkan apresiasi luar biasa dari Konstitusi AS. Amandemen Pertama Konstitusi AS 1774, misalnya, melarang negara/pemerintah membuat aturan atau kebijakan yang membatasi atau

menghalangi kebebasan pers. Masyarakat AS menganggap jaminan ini sebagai *privillage* yang luar biasa. Oleh karena itu, karena konstitusi merupakan amanat dari kedaulatan rakyat, maka pers juga selainnya memberikan tanggung jawab sosialnya atas jaminan yang telah diberikan itu.

Social Responsibility merupakan evolusi gagasan praktisi media, undang-undang media dan hasil kerja Komisi Kebebasan Pers yang berpendapat bahwa selain bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi. Social Responsibility mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki sesuatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum, dan jika media dianggap tidak memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksanya. Di bawah teori ini, media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode etik professional dan dalam hal penyiaran dikontrol oleh badan pengatur mengingat keterbatasan teknis pada jumlah saluran frekuensi yang tersedia (Severin Tankard:2003:379).

Pers tanggung jawab sosial kemudian diadopsi oleh sistem pers negara berkembang yang sedang membangun dan negara baru yang masih tertinggal dalam status kemiskinannya. Pers misalnya dibebani dengan peran ikut bertanggung jawab mensukseskan pembangunan yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintahan yang agak tiran misalnya melengkapi dirinya dengan hak-hak tertentu untuk men-*setting* sistem pers agar betul-betul bertanggung-jawab secara sosial dalam *frame* kepentingan pemerintah atau kerajaan.

Kritik Teori Tanggung Jawab Sosial terhadap Teori Liberal muncul sebagai konsekuensi dari timbulnya revolusi industri dan revolusi teknologi yang mengubah wajah dan gaya hidup Amerika yang kemudian memengaruhi sifat pers. Dikembangkannya Teori Tanggung Jawab Sosial adalah akibat dari kritik-kritik tajam dan gencar terhadap kegiatan pers terutama pada abad 20.

Sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik yang dianggap amat berarti bagi kehidupan negara, masyarakat dan pers itu sendiri, maka dibentuklah Commission on Freedom of the Press. Komisi Kemerdekaan Pers telah merumuskan lima persyaratan pers menurut Theodore Peterson :

1. Memberitakan peristiwa sehari-hari yang benar, lengkap, dan bepekerti dalam konteks yang mengandung makna.
2. Memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik.
3. Memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat.
4. Bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
5. Mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa sehari-hari.

Teori ini seperti halnya Teori Liberal, menganut prinsip kebebasan tetapi antara kedua teori tersebut terdapat perbedaan yang hakiki. Peterson mengungkapkan bahwa Teori Liberal dilahirkan dari konsep kemerdekaan negatif, yakni secara gamblang dapat didefinisikan sebagai kebebasan dari dan secara lebih tegas lagi menunjukkan kebebasan dari pengekangan eksternal.

Sedangkan Teori Tanggung Jawab Sosial berpijak pada konsep kemerdekaan positif, yakni kebebasan untuk, yang menghendaki menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam kaitannya dengan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI menganut peranan pers dalam teori Tanggung Jawab Sosial, dimana pada saat ini TVRI telah menikmati kedudukannya sebagai pilar keempat dalam demokrasi di negara yang demokratis dan penuh dengan keterbukaan sebagai buah dari reformasi. Pada saat yang bersamaan inilah, TVRI mampu memberikan peranan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam menyuarakan kepentingan rakyat melalui pemberitaannya dan sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat terhadap suatu kebijakan yang diambil pemerintah.

### 2.3.11 Teori Gate Keeper

Berbagai penelitian awal tentang Gate Keeper oleh White and Gieber hanya membatasi jangkauan permasalahan sekitar kegiatan pemilihan berita yang berlangsung dalam redaksi berita. Dalam redaksi berita dilakukan seleksi berita dari sejumlah besar berita yang masuk ke dalam redaksi berita. Hal ini terkait dengan teori Gate Keeper, dimana teori ini berfungsi untuk menganalisis banyak situasi media yang berbeda. Konsep Gate Keeper bertujuan untuk melakukan filterisasi terhadap berita yang masuk dalam redaksi berita untuk diseleksi. Proses penseleksian didasarkan pada kebijakan editorial masing-masing media. Adapun berita yang dinilai layak masuk, harus melalui proses pengolahan oleh seorang produser dan editor berita yang dibentuk redaksi. (Dennis Mc Quail:2006)

Istilah gatekeeping dipergunakan untuk menggambarkan proses dimana seleksi dibuat dalam kerja media, terutama melalui keputusan untuk melewatkan atau tidak melewatkan satu laporan berita tertentu melewati pintu gerbang (gate) dari medium berita menuju saluran berita. Tetapi sebenarnya, istilah gatekeeping ini dapat diterapkan bukan hanya pada kantor berita dan penerbit, tetapi juga pada konteks yang lebih luas lagi yang menyangkut kerja editorial maupun produksi dalam media cetak, yang berhubungan dengan keputusan tentang distribusi dan pemasaran dari produk-produk media yang telah ada. Artinya, proses gatekeeping ini berhubungan dengan kekuasaan untuk memberikan atau menahan akses pada suara masyarakat yang berbeda dan seringkali menjadi sumber konflik.

Prosesnya sendiri dimulai ketika berbagai pesan potensial berjalan melalui sejumlah saluran untuk mencapai beberapa tipe organisasi komunikasi, seperti layanan kabel, kantor kehumasan, jaringan surat kabar, jaringan televisi dan lain sebagainya. Merujuk Pamela J. Shoemaker (1991), masing-masing organisasi memiliki sejumlah staf yang beroperasi dalam batasan posisi peran input, dengan masing-masing organisasi memiliki kekuasaan untuk mengontrol pesan-pesan potensial yang memasuki organisasi, dan kekuasaan untuk membentuk pesan-pesan tersebut.

Dalam kaitannya dengan arah pemberitaan Lembaga Penyiaran Publik TVRI, teori Gatekeeper diaplikasikan pada tingkatan redaksional dimana redaktur bertugas menyeleksi dan menyunting berita-berita yang dibuat para reporter TVRI

berdasarkan penugasan peliputan. Para redaktur bertugas menentukan mana berita yang cocok masuk dalam sebuah bulletin berita, mana yang tidak cocok masuk dalam bulletin berita. Jika sebuah berita telah dipastikan masuk dalam sebuah bulletin berita, seorang produser bertugas untuk menyunting dan mengoreksi naskah berita yang telah dibuat oleh para reporter.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, ketentuan pemberitaan sarat dengan kepentingan penguasa di masa itu. Oleh karenanya teori ini sangat berperan dalam menentukan pemberitaan TVRI di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu, TVRI melakukan proses gatekeeping untuk mempertahankan kekuasaan negara dengan berupaya menahan akses suara masyarakat yang berbeda pandangan, demi menghindari konflik.

Memasuki era reformasi yang ditandai dengan kebebasan pers dan pada saat TVRI telah berubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik, upaya penseleksian berita oleh seorang editor berita ataupun produser berita tetap dilakukan tanpa harus menahan akses suara masyarakat kepada pemerintah. Di masa inilah, TVRI telah dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Pada saat TVRI menjadi LPP, suara masyarakat justru menjadi komoditas utama dalam corak pemberitaan TVRI. Adanya sejumlah segmen berita yang khusus menekankan pada tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dan isu yang tengah bergulir di masyarakat, merupakan suatu bukti TVRI tidak lagi melakukan proses gatekeeping dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Proses gatekeeping dilakukan hanya untuk menseleksi berita yang dibuat para reporter TVRI agar disesuaikan dengan kebijakan editorial dan redaksional TVRI.

Shoemaker (1991) mendefinisikan gatekeeping sebagai :

“Simply put, gatekeeping is the process by which the billions of messages that are available in the world get cut down and transformed into the hundreds of messages that reach a given person on a given day.”

Teori-teori gatekeeping terus mengalami perkembangan dan modifikasi seiring dengan semakin luasnya cakupan penelitian, besarnya tekanan eksternal pada media, beragamnya karakteristik internal editor dan system media yang

memperkerjakannya. Lebih dari itu, teori ini juga telah mendukung keberadaan sejumlah teori lainnya, seperti Teori Pengawasan Sosial (Social Control Theory) dan Teori Agenda Setting.

Dalam proses seleksi berita, terdapat sejumlah faktor yang berperan dalam pengambilan keputusan para gatekeeper. Nasution (2005) membagi faktor-faktor itu ke dalam dua kategori yakni faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi unsur-unsur nilai berita yang melekat pada suatu peristiwa serta bagaimana *public meaning* peristiwa tersebut bagi masyarakat luas. Sedangkan faktor ekstrinsik lebih menekankan pada aspek implikasi berita tersebut terhadap suatu negara dari perspektif kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Konsep Gatekeeper ini dapat dilihat sebagai suatu institusi atau organisasi. Dalam system politik juga ada gatekeeper berupa individu atau institusi yang mengendalikan akses ke posisi pemegang kekuasaan dan mengatur aliran informasi serta pengaruh politis.

### 2.3.12 Teori Agenda Setting

Teori lain yang erat kaitannya dengan pembahasan tentang media dan realitas adalah teori agenda setting. Asumsi dasar dari teori ini adalah bagaimana media membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Dengan teknik pemilihan dan penonjolan, media memberikan cues tentang mana isu yang lebih penting. Model agenda setting mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan khalayak pada persoalan tersebut. Singkatnya, apa yang dianggap penting oleh media, akan dianggap penting pula oleh masyarakat dan apa yang dilupakan media, akan luput juga dari perhatian masyarakat. (Rakhmat, 1995:68)

Sebagai suatu pendekatan teoritik, agenda setting dikembangkan terutama setelah dekade 1970-an dengan tokoh-tokoh seperti Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw sebagai perintisnya. Istilah ini dimunculkan oleh kedua peneliti tersebut, lewat laporan penelitian yang dipublikasikan di jurnal *Public Opinion Quarterly* no.36 tahun 1972 dengan judul "*The Agenda Setting function of The Press*". Teori ini berkenaan dengan pengaruh media massa, terutama dalam arti pengaruh pemberitaan oleh media massa terhadap pengetahuan dan perhatian



khalayak mengenai persoalan-persoalan atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, seperti dikatakan oleh McCombs (1982:122), teori ini memusatkan pada persoalan pengaruh liputan isu-isu publik oleh media yang terjadi pada audience dari media bersangkutan (*The influence coverage of public issues in the news media*).

Teori ini menitikberatkan pada keterkaitan antara persoalan yang dianggap paling penting oleh media (agenda media) dan individu khalayak (agenda khalayak atau agenda publik). Dengan demikian, menurut teori ini, isu-isu yang dianggap penting oleh media (*media salience of issues*) cenderung berpengaruh terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh khalayak (*public salience of issues*).

Teori agenda setting berkembang dengan pesat dan menjadi suatu paradigma penelitian tersendiri dalam ilmu komunikasi. (Pawito: 46-48)

Dalam menyajikan realitas sosial, media memiliki bahasa tersendiri, bahasa yang terdiri atas seperangkat tanda tidak pernah membawa makna tunggal di dalamnya. Isi atau teks media selalu memiliki ideology dominan yang terbentuk melalui tanda tersebut, artinya jika kita gali lebih dalam, teks media membawa kepentingan-kepentingan yang lebih luas dan kompleks. Oleh karenanya harus diakui bahwa apa yang dimuat di media massa tidak terlepas dari berbagai kepentingan atau kekuatan dibelakangnya. Media juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk kecenderungan opini yang berkembang di masyarakat.

Dalam kerangka pembentukan opini publik, pers atau media massa umumnya melakukan tiga kegiatan sekaligus. Pertama, menggunakan simbol-simbol politik (*language politic*) kedua, melaksanakan strategis pengemasan pesan (*framing strategies*). Ketiga melaksanakan fungsi agenda media (*agenda setting function*). Ketika melakukan tindakan tersebut, media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan kekuatan politik tertentu dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan luar lainnya.

Dengan demikian boleh jadi satu peristiwa politik dapat menimbulkan opini publik yang berbeda tergantung dari cara masing-masing media

melaksanakan tiga tindakan tersebut (Ibnu Hamad:2005:2-5). Untuk dapat mengungkap bagaimana sebuah media dalam mengonstruksikan editorialnya maka perlu dilakukan penelitian isi media (*media content*) melalui pendekatan *discourse analysis* (analisis wacana): *semiotic analysis* dan *framing analysis*. Dengan pendekatan analisis wacana kita dapat memahami bahwa sebenarnya isi media dipengaruhi oleh berbagai komponen yang terdapat dalam institusi media itu sendiri (AlexSobour:2002:3).

Dalam kaitannya dengan LPP TVRI yang menjalankan fungsi agenda setting, TVRI menyajikan suatu isu yang tengah berkembang di masyarakat. Sebagai media, TVRI memiliki wewenang untuk menyajikan isu tertentu dengan garis kebijakan redaksional dan editorialnya sendiri. Garis kebijakan yang diambil inilah yang menentukan sudut pandang mana yang diambil TVRI dalam melihat berbagai isu yang sedang berkembang. Hal inilah yang kemudian akan membentuk persepsi khalayak. Pada saat isu kenaikan BBM dan Konversi Minyak Tanah ke Gas sedang merebak TVRI secara proporsional tetap menyajikan fakta lapangan yang memperlihatkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tersebut telah berpengaruh pada masyarakat. Tetapi pada saat yang bersamaan TVRI juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tersebut adalah kebijakan yang rasional dan logis. Dengan demikian, masyarakat tidak akan hanya terpaku pada kritik dan kesalahan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga memiliki alasan logis dari kebijakan yang diambil pemerintah.

### 2.3.13 Analisis Isi Media

Dua istilah digunakan secara bergantian dalam analisis isi media massa pers, yakni teks dan wacana. Menurut Kress istilah teks dan wacana cenderung dipergunakan tanpa pembedaan yang jelas. Diskusi-diskusi yang bersifat sosiologis cenderung menggunakan istilah wacana. Kajian wacana lebih menekankan pada persoalan isi, fungsi dan makna social dari penggunaan bahasa. Sementara itu diskusi dengan dasar atau tujuan yang lebih linguistis cenderung menggunakan istilah teks. Kajian teks lebih menekankan pada persoalan

materialitas, bentuk dan struktur bahasa. Teks lebih dipandang sebagai fenomena linguistik yang berdiri sendiri dan terpisah dari situasi tuturan. Sementara itu wacana merupakan teks dalam situasi tuturan.

Fairlough menggunakan istilah teks sebagai bagian dari konsep wacana. Teks adalah bahasa lisan dan tulisan yang diproduksi dalam sebuah peristiwa diskursif. Wacana berkaitan dengan penggunaan bahasa yang ditentukan secara sosial. Fairlough menggunakan istilah wacana yang mengacu pada tindakan kewacanaan (*discoursal action*) pada tuturan dari tulisan yang actual.

Dengan demikian, wacana dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu wacana dilihat dari level konseptual teoritis, konteks penggunaan dan metode penjelasan. Dari level konseptual kritis, wacana diartikan sebagai domain umum dari semua pernyataan yaitu semua teks yang mempunyai makna dan mempunyai efek dalam dunia nyata. Sedangkan dalam level konteks penggunaannya, wacana berarti suatu kelompok pernyataan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu dan mempunyai kesatuan atau kejernihan dan kekuatan atau pengaruh tertentu misalnya wacana liberalisme, imperialisme, globalisme dan sebagainya. Sementara dilihat dari metoda penjelasannya, wacana merupakan suatu praktek yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan-pernyataan. Dalam pengertian ini penekanan diberikan pada aturan atau struktur yang menghasilkan teks-teks khusus. Pengertian ini menunjukkan sifat wacana yang senantiasa tunduk pada aturan-aturan tertentu (*rule governed*).

#### 2.3.14 Analisis Framing

Analisis framing merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian. Analisis wacana merupakan perkembangan terbaru yang lalu, dari elaborasi terus menerus terhadap pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menghasilkan suatu metode yang *up to date* untuk memahami berbagai fenomena media mutakhir. Analisis framing memungkinkan disertakannya konsep-konsep sosiologis, politik, dan cultural untuk menganalisis fenomena-fenomena komunikasi, sehingga fenomena dapat benar-benar dipahami dan diapresiasi berdasarkan konteks sosiologis, politik atau cultural yang melingkupinya (Agus Sudibyo:1999:23).

Analisis Framing cocok digunakan untuk melihat konteks sosial budaya suatu wacana khususnya hubungan antara berita dan ideology yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun dan mempertahankan, memproduksi, mengubah, dan meruntuhkan ideology. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan siapa dalam struktur kekuasaan, pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan, siapa si penindas dan siapa yang tertindas, tindakan politik mana yang konstitusional dan inkonstitusional, kebijakan publik mana yang harus didukung dan mana yang tidak didukung. (Dedy Mulyana:2002:xiv-xv)

Konsep framing atau pembingkaihan sering digunakan oleh media untuk menggambarkan sebuah peristiwa dengan menonjolkan aspek tertentu dan sekaligus menempatkan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi dan perhatian yang lebih besar dibandingkan isu lainnya. Dalam prakteknya, framing dijalankan media dengan menyeleksi isu tertentu dengan mengabaikan isu lainnya, menonjolkan aspek tertentu dari isu tersebut dengan menyembunyikan dan bahkan membuang aspek yang lain. Ini dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengumpulan data lapangan, verifikasi dan seleksi data, penyajian dalam bentuk berita, hingga penempatannya di sebuah rubrik tertentu.

Dari penjelasan diatas diketahui, media merupakan faktor yang sangat penting bagi pembentukan image, citra maupun stigma. Dari faktor medialah, publik memperoleh informasi mengenai realitas yang tengah berlangsung di tempat lain. Sementara realitas yang dihadirkan media di hadapan publik belum tentu realitas yang sesungguhnya, tetapi realitas yang sudah dibentuk, dibingkai dan dipoles sedemikian rupa oleh media tersebut. Melalui analisis framing kita tahu betapa secara diam-diam media mendikte kesadaran kita mengenai realitas tanpa kita sadari.

Sebuah berita atau opini editorial akan dinilai apa adanya. Berita akan dipandang sebagai barang suci yang penuh dengan objektivitas dan opini editorial dianggap senantiasa memiliki bobot idealisme, independen dan tanpa pamrih. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yakni dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologis atau latar belakang seorang penulis.

Seorang penulis akan memasukkan ide mereka dalam analisis data yang diperoleh di lapangan.

Editorial merupakan rubrik khusus yang selalu ada dalam setiap pers umum yang mengulas suatu peristiwa atau isu dalam perspektif redaksional. Dalam rubric editorial, pandangan atau opini formal sebuah terbitan pers tercermin secara tegas. Arti penting dari suatu editorial hanya dapat dilihat dalam kaitan dengan nilai media pers. Sedangkan media pers hanya akan punya arti dalam landasan kepercayaan, yaitu bertemunya apa yang diharapkan oleh khalayak dari media pers dengan apa yang dijanjikan oleh media pers bagi khalayak. Pertemuan ini berada pada dataran acuan nilai cultural bersama (*shared values*) yang mengisi ruang publik (*public sphere*). Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis tersendiri terhadap isi berita dan opini editorial sehingga akan diketahui latar belakang seorang penulis dalam menulis berita dan opini editorial.

Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap publik. Pembaca akan lebih memahami latar kepentingan seorang penulis atau institusi pers dalam menulis berita dan opini editorial sehingga seminimal mungkin menghindari terjadinya respon yang reaksional atau terprovokasi oleh suatu perspektif. Pembaca tidak akan fanatik terhadap salah satu institusi pers atau kelompok politik dengan alasan ideologi. Artinya, masyarakat akan lebih dewasa terhadap wacana yang berkembang dalam pers.

Sementara itu, bagi pengambil kebijakan dan keputusan politik di pemerintahan dan kalangan legislatif, maka pemahaman akan peta dan orientasi ideologis pers sangat penting untuk kepentingan strategi politiknya. Hal ini terkait pula dengan pola strategi pendekatan media agar dapat menerima rasionalitas dari suatu kebijakan politik atau setidaknya dapat meminimalisir resistensi pers terhadap sikap atau kebijakan politiknya. Semakin suatu kebijakan politik didukung pers maka semakin terbuka pula dukungan dari elemen masyarakat.

Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. (Agus Sudibyo:1999:23) Menurut Erving Goffman, secara sosiologis konsep frame analysis memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi,

mengorganisasi dan mengintrepetasi secara aktif pengalaman-pengalaman hidup kita untuk dapat memahaminya. (Hotma Siahaan:76-77). Skemata interpretasi tersebut disebut frames, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan member label terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi. Dengan konsep yang sama, Gitlin mendefinisikan frame sebagai seleksi, penegasan, dan eksklusi yang ketat. Ia menghubungkan konsep tersebut dengan proses memproduksi wacana berita yang mengatakan, frame memungkinkan para jurnalis memproses sejumlah besar informasi secara cepat dan rutin, sekaligus mengemas informasi demi penyiaran yang efisien kepada khalayak.

Berdasarkan konsep psikologi, framing dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik, sehingga elemen-elemen tertentu suatu isu memperoleh alokasi sumber kognitif individu lebih besar. Konsekuensinya, elemen-elemen yang terseleksi menjadi penting dalam mempengaruhi penilaian individu dalam penarikan kesimpulan.

Dalam perspektif disiplin ilmu lain, konsepsi framing terkesan tumpang tindih. Fungsi frame kerap dikatakan sebagai struktur internal dalam pikiran dan perangkat yang dibangun dalam wacana politik. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang akan dipilihnya, ditonjolkannya dan dibuangnya. Di balik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. (Eriyanto:94)

Penonjolan seperti disinggung di muka merupakan proses membuat informasi menjadi lebih bermakna. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok sudah tentu punya peluang besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami realitas. Karena itu, dalam prakteknya framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan pelbagai strategi wacana –penempatan yang mencolok (headline, halaman belakang, halaman

depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberikan.

Pada dasarnya, pola penonjolan tersebut tidaklah dimaknai sebagai bias, tetapi secara ideologis sebagai strategis wacana: upaya menyuguhkan kepada publik tentang pandangan tertentu agar pandangannya lebih diterima. Kata penonjolan didefinisikan sebagai membuat informasi lebih diperhatikan, bermakna dan berkesan. Suatu peningkatan dalam penonjolan mempertinggi probabilitas penerima akan lebih memahami informasi, melihat makna lebih tajam, lalu memprosesnya dan menyimpannya dalam ingatan, bagian informasi dari teks dapat dibuat lebih menonjol dengan cara penempatannya atau pengulangan atau mengasosiasikan dengan symbol-simbol budaya yang sudah dikenal.

Bagaimanapun tingkat penonjolan teks dapat sangat tinggi bila teks itu sejalan dengan skemata system keyakinan penerima. Skemata serta konsep-konsep tersebut erat hubungannya dengan kategori, scripts atau stereotype, yang merupakan kumpulan ide di dalam mental yang memberi pedoman seseorang untuk memproses informasi. Karena penonjolan merupakan sebuah produk interaksi antara teks dan penerima, maka kehadiran frame dalam teks tidak menjamin pengaruhnya terhadap pemikiran khalayak. ( Hotma Siahaan )

Menurut Entman, Framing memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. Frames, menurutnya menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda. Politisi mencari dukungan dengan memaksakan kompetisi satu sama lain. Mereka bersama jurnalis membangun frame berita.

Konsep framing dalam pandangan Entman secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap *the power of communication text*. Framing analysis dapat menjelaskan dengan cara tepat pengaruh atas kesadaran manusia didesak oleh transfer atau komunikasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, news report, atau novel. Framing menurut Entman secara esensial meliputi penyeleksian dan penonjolan. Membuat frame adalah menyeleksi

beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral dan merekomendasikan penanganannya.

Salah satu yang menjadi prinsip analisis framing adalah bahwa wartawan dapat menerapkan standar kebenaran, matriks objektivitas, serta batasan-batasan tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Dalam merekonstruksi suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skemata interpretasi (*Schemata of interpretation*).

Dengan skemata ini pula wartawan cenderung membatasi atau menyeleksi sumber berita, menafsirkan komentar –komentar sumber berita, serta member porsinya yang berbeda terhadap tafsir atau perspektif yang muncul dalam wacana media.

Pada dasarnya, pekerjaan media massa adalah mengonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil para pekerja mengonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya diantaranya realitas politik. Pada umumnya terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media massa, khususnya oleh komunikator massa (sejumlah orang dari pekerja media yang bertanggung jawab atas editorial sebuah media massa pers), tatkala melakukan konstruksi realitas politik yang berujung pada pembentukan makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik.

Pertama, dalam hal pilihan kata (*symbol*) politik. Sekalipun media massa hanya bersifat melaporkan, namun telah menjadi sifat dari pembicaraan politik untuk selalu memperhitungkan *symbol* politik. Dalam komunikasi politik, para komunikator bertukar citra atau makna melalui lambing. Mereka saling menginterpetasikan pesan atau *symbol* politik yang diterimanya. Dalam konteks ini, sekalipun melakukan pengutipan langsung (*direct quotation*) atau menjadikan seorang komunikator politik sebagai sumber berita, media massa tetap terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan pilihan simbol yang digunakan sumber tersebut. Tetapi manakala media massa membuat ulasan sebuah editorial, pilihan kata itu ditentukan sendiri oleh sang komunikator massa.

Kedua, dalam melakukan pembingkaihan (*framing*) peristiwa politik. Minimal oleh adanya tuntutan teknis: keterbatasan – keterbatasan kolom dan



halaman (pada media cetak) atau waktu pada media elektronika, jarang ada media yang bisa membuat berita sebuah cerita secara utuh, mulia dari menit pertama hingga ke menit paling akhir. Atas nama kaidah jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar, rumit, dicoba “disederhanakan” melalui pembingkaiian (framing) fakta – fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang. Untuk kepentingan pemberitaan ini, komunikator massa sering kali hanya menyoroti hal – hal “penting” (mempunyai nilai berita) dari sebuah peristiwa politik. Dari sini terlihat ke arah mana pembentukan (formasi) dari sebuah berita. Ditambah pula dengan berbagai kepentingan (menarik keuntungan atau pihak mana yang diuntungkan) dengan berita tersebut.

Ketiga, menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa politik. Justru hanya jika media massa memberi tempat pada sebuah pada peristiwa politik, maka peristiwa tersebut akan memperoleh dari masyarakat. Semakin besar tempat yang diberikan, semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh khalayak. Pada konteks ini media massa mempunyai fungsi *agenda setter* sebagaimana dikenal dengan Teori Agenda Setting. Tesis utama teori ini adalah besarnya perhatian masyarakat terhadap sebuah isu amat tergantung seberapa besar media memberikan perhatian pada isu tersebut. Bila satu media, apalagi sejumlah media, meanurh sebuah kasus sebagai headline, diasumsikan kasus itu pasti memperoleh perhatian yang besar dari khalayak. Ini tentu berbeda jika misalnya, kasus tersebut dimuat di halaman dalam, bahkan dibawah pojok pula. Faktanya, konsumen media jarang meperbincangkan kasus yang tidak dimuat media, yang boleh jadi kasus itu justru sangat penting untuk masyarakat.

Sekurangnya ada tiga bagian berita yang menjadi objek framing seorang wartawan, yakni judul berita, focus berita dan penutup berita. Judul berita di – framing dengan menggunakan teknik empati, yaitu menciptakan “pribadi khalayak” dalam diri khalayak, sementara khalayak diangankan menempatkan diri mereka sebagai korban atau penyebab masalah sehingga mereka bisa merrsakan kepedihan yang luar biasa.

Kemudian, fokus berita di – framing dengan menggunakan teknik asoisasi, yaitu menggabungkan kejadian actual dengan fokus berita, khalayak akan

memperoleh kesadaran tentang korban dan penyebab masalah. Kesadaran ini diharapkan bisa memicu khalayak untuk berperanserta mengatasi masalah.

Untuk itu wartawan perlu mengetahui secara persis kondisi riil pencegahan masalah yang akan terjadi. Selanjutnya penutup berita di – framing dengan menggunakan teknik packing, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya menolak ajakan yang dikandung berita. Apapun inti ajakan, khalayak menerima sepenuhnya, sebab mereka tidak berdaya sama sekali untuk membantah kebenaran yang dikonstruksi berita.

Analisis framing bisa digunakan dengan bermacam – macam fokus dan tujuan. Tentu saja hal ini berkaitan dengan pelbagai definisi dan ruang lingkup framing sendiri yang cukup kompleks. Gamson memilih pendekatan framing menjadi dua, pendekatan cultural dan pendekatan individual. Analisis framing dalam level cultural dilakukan melalui berbagai cara. Merujuk pada aspek seleksi dan penekanan sebagai esensi framing, analisis framing level cultural melalui identifikasi dan kategorisasi dalam proses pengulangan, penempatan (*placement*), asosiasi dan panajama (*reinforcement*) kata, kalimat, dan proposisi tertentu dalam suatu wacana. Dalam hal ini dapat diopersonalisasikan dimensi awacana seperti dimensi semantic, skematik, grafik, dan lain – lain. Selain itu, analisis framing juga dapat dilakukan dengan membedah sisi retorik suatu wacana, yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis kata kunci, methapor, frase, popular, wisdom, silogisme dan perangkat – perangkat simbolik lain yang ada didalamnya.

Lain halnya dengan analisis framing dalam level cultural, frame dalam level individu menimbulkan konsekuensi bahwa untuk tujuan tertentu, studi framing tidak bisa dilakukan hanya sebatas analisis isi terhadap teks media. Dalam kaitan ini Gamson dan Modigliani memperkenalkan konsep frame – resonance, yaitu tingkat keselarasan frame yang muncul dalam wacana tekstual dengan interpretative khalayak. Untuk mengukur frame – resonance, serta untuk mengukur tingkat keseragaman atau keberagaman semata awak media, analisis framing perlu dilakukan sampai pada tingkat individu.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, yang dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi. Penelitian ini membahas bagaimana LPP TVRI mengkonstruksikan atau membahasakan realitas serta bagaimana kebijakan editorial dan redaksional LPP TVRI yang menyebabkan konstruksi realitas seperti itu.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini difokuskan pada pengonstruksian media massa dalam hal ini kebijakan editorial LPP TVRI terkait kebijakan kenaikan harga BBM pada tahun 2008 serta program konversi minyak tanah ke gas yang dicanangkan pemerintah dan pengaruhnya terhadap khalayak penonton. Penelitian diarahkan pada berita-berita LPP TVRI yang tayang pada periode Mei hingga Desember 2008. Oleh sebab itu, yang menjadi fokus penelitian ini adalah konstruksi editorial LPP TVRI tentang kenaikan harga BBM pada tahun 2008 dan program konversi minyak tanah ke gas pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat multilevel. Sesuai dengan model analisis wacana yang diperkenalkan oleh Fairlough, ada tiga domain analisis wacana yaitu *text*, *discourse practice* dan *socio cultural practice* (Norman Fairlough:54). Bila kerangka ini digunakan ke dalam teknik pengumpulan data maka teknik yang digunakan untuk meendapatkan data tergantung pada level analisis masing-masing: makro, meso dan mikro.

Dalam bentuk bagan level analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1: Penampangan Level Analisis Wacana

No.	Level Masalah	Level Analisis	Metode Penelitian
1.	Sociocultural Practise	Makro	Kajian Literatur
2.	Discourse Practise	Meso	Interview dengan pihak LPP TVRI
3.	Text	Mikro	Analisis Framing Model Robert N. Entman

Sumber : Diadopsi dari Ibnu Hamad, 2004

Pada level makro, penggalian data dipusatkan pada kebijakan konversi minyak tanah ke gas pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Yusuf Kalla pada tahun 2008. Didalamnya terkait rasionalitas dan argumentasi kalangan pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambil pemerintahan SBY-JK terkait dengan konversi minyak tanah ke gas. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam level makro adalah dengan observasi dan data sekunder lain seperti buku-buku, artikel, profil media dan lain-lain. Studi pustaka (termasuk studi dokumentasi) diperoleh melalui referensi tertulis yang dapat menunjukkan bagaimana sekiranya manajemen produksi dilakukan oleh redaksi LPP TVRI. Pengumpulan data dilaksanakan sejak bulan Mei 2008 dimana kenaikan harga BBM mulai diberlakukan dan wacana tentang kebijakan konversi minyak tanah ke gas mulai disosialisasikan pemerintah kepada masyarakat. Data-data ditelusuri melalui arsip berita di redaksi TVRI, serta arsip online di internet yang terkait dengan isu tersebut.

Pada Level Meso, *discourse practice*, dipergunakan metode wawancara dengan pihak LPP TVRI. Data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan media sample juga dipergunakan untuk kepentingan analisis. Pencarian data dipusatkan pada text production yakni proses pembuatan teks berita (konversi minyak tanah ke gas) termasuk pertimbangan yang digunakan ketika menyusun teks tersebut. (Ibnu Hamad:2004:24). Dan *text consumption* yaitu tentang bagaimana faktor publik diperhitungkan dalam penyajian naskah berita.

Pada tingkat *discourse practice* data diperoleh dari wawancara dengan organisasi media menyangkut bagaimana proses produksi berita di LPP TVRI. Wawancara ini diperlukan sebagai alat bantu untuk mengetahui bagaimana kebijakan redaksional dan kebijakan editorial turut menentukan frame LPP TVRI dalam melakukan penyajian berita terhadap suatu peristiwa atau isu yang sedang bergulir. Latar belakang dan wawasan yang dimiliki reporter sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam memetakan, mengidentifikasi dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya.

Teks sebagai Level Mikro dianalisis menggunakan Analisis wacana Framing. Mengutip bentuk-bentuk analisis linguistik, seperti analisis vocabulary, semantic, gramatikal dan system fonologi dari penulisan. Selain itu, bagaimana sebuah kalimat dihubungkan dengan kalimat lainnya sehingga membentuk suatu artikel tertentu (Ibnu Hamad, 57-58). Pengumpulan data pada level teks media dilakukan dengan cara observasi yang dilakukan pada berita-berita LPP TVRI terkait dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas pada masa pemerintahan SBY-JK yang ditayangkan di buletin berita TVRI. Observasi ini bertujuan untuk menentukan naskah berita mana saja yang akan diteliti serta mencermati bagaimana posisi editorial dan sikap redaksional yang ada dalam berita TVRI, serta bagaimana TVRI mendeskripsikan suatu isu sosial menjadi sebuah naskah berita.

Sedangkan model teknik analisis teks yang digunakan adalah teknik analisis model Robert N. Entman, framing dalam berita dilakukan dengan empat cara yakni : pertama, pada identifikasi masalah (*problem identification*); kedua, pada identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*); ketiga, pada evaluasi moral (*moral evaluation*) dan keempat, berupa saran dan penanggulangan masalah (*treatment recommendation*) (Muhamad Qodari:20).

### 3.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini diawali dengan reduksi data kemudian menyajikan data dan dilakukan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan (Imam Suprayoga dan Tobroni). Reduksi data berlangsung selama penelitian. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa ringkasan dan menelusuri data berdasarkan tema (Imam Suprayoga dan Tobroni).

Reduksi data adalah langkah yang diambil setelah data terkumpul. Setelah data yang diperoleh dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Unit-unit data yang bermanfaat dapat diidentifikasi, dipanggil, dipisahkan dan dikelompokkan serta dikelompokkan kembali untuk dianalisis (John W. Creswell).

Reduksi data merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (John W. Creswell). Penyajian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan naratif, matriks, grafik dan jaringan dan bagan. Semua itu dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk data yang sistematis. Dengan adanya penyajian data, dapat dipahami apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan lebih jauh dalam menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.

### 3. Penarikan kesimpulan

Setelah dilakukan tiga tahapan diatas barulah kemudian data hasil penelitian dapat disimpulkan.

#### 3.4.1 Teknik Analisis Framing

Dalam penelitian ini, teknik framing yang digunakan adalah teknik framing Robert N. Entman yang mengatakan ada empat cara untuk melakukan framing. Keempat cara tersebut adalah *problem identification, causal interpretation, moral evaluation dan treatment recommendation*. Pertama, Define Problems, merupakan element pertama kali yang dapat dilihat sebagai framing. Elemen ini merupakan bingkai utama yang menekankan bagaimana suatu peristiwa yang dapat difahami (didefinisikan) oleh wartawan atau penulis. Artinya, ketika terdapat masalah atau peristiwa atau isu tersebut dipahami dan didefinisikan. Peristiwa yang sama dapat didefinisikan atau dipahami secara berbeda. Bingkai atau frame yang berbeda ini dapat menyebabkan realitas bentukan yang berbeda pula.

Kedua, diagnose Causes, merupakan elemen framing yang digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai actor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti siapa (who), namun juga dapat berarti apa (what). Bagaimana suatu peristiwa dipahami, tentu juga meibatkan apa dan siapa yang menjadi sumber dan sutu masalah. Karena itu masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalahpun secar tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

Ketiga, Make Moral Judgement, merupakan elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberikan argumen pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika suatu peristiwa atau masalah sudah dipahami atau didefinisikan, kemudian penyebab masalah sudah ditentukan, maka dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Dan Keempat, Treatment Recommendation, elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan atau penulis editorial untuk menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian ini tentu saja tergantung pada

bagaimana peristiwa dipahami, siapa yang akan menjadi actor penyebabnya, dan bagaimana argument yang diajukan.

Dalam bentuk bagan teknik framing Robert N. Entman dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Model Analisis Framing Robert N. Entman

Define Problem (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Diagnose Cause (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap suatu penyebab dari suatu masalah? Siapa (actor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang digunakan untuk meligitimasi suatu tindakan?
Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian Masalah)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah / isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah.

Sumber: Erianto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, (Yogyakarta: Lkis, 2004), h. 188-189.

Pada level produksi berita, penelitian ini menggunakan metode analisis narasi untuk melihat bagaimana LPP TVRI mengkonstruksi struktur narasi berita dari fakta dan narasumber yang telah dipilih sebelumnya. Analisis ini menunjukkan cara media membangun berita. Model analisis yang digunakan adalah model analisis struktur narasi Tzvetan Todorov. Ia memperkenalkan lima buah tahapan yang dapat dilihat dalam struktur sebuah narasi, yakni (Nick Lacey:2000)



Tabel 3.3: Model Analisis Struktur Narasi Todorov

Struktur Narasi	
A state of equilibrium at the outset	Penggambaran keseimbangan kehidupan di awal narasi.
A disruption of the equilibrium by some action	Timbulnya suatu hal/peristiwa yang mengganggu keseimbangan dunia/situasi sosial.
A recognition that there has been a disruption	Gangguan itu mulai dirasakan efeknya oleh aktor-aktor dalam narasi
An attempt to repair the disruption	Aktor-aktor di dalam narasi mengambil keputusan dan tindakan untuk mengatasi/memperbaiki masalah yang ditimbulkan oleh hal/peristiwa yang mengganggu tadi.
A reinstatement of the equilibrium	Penggambaran kembalinya keseimbangan setelah aktor-aktor dalam narasi mengatasi hal/peristiwa yang menyebabkan gangguan.

Sumber : Nick Lacey, *Narrative and Genre: Key Concepts in Media Studies*, London: Macmillan Press Ltd.

### 3.5 Tahapan Penelitian dan Kerangka Kerja Penelitian

Tahapan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan bahan berupa teks-teks berita tentang kenaikan harga BBM terkait kenaikan harga minyak mentah dunia pada Mei 2008 dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas pada 2007-2008.

Tahap kedua adalah penerapan analisis framing model Robert N. Entman ke dalam teks-teks berita tersebut: sejauh mana komponen analisis wacana framing model Robert N. Entman tercermin dalam teks berita. Prosesnya adalah dengan menemukan tanda-tanda signifikan melalui teknik apa yang disebut oleh Robert N. Entman dengan *define problem*, *diagnose cause*, *moral evaluation*, dan *make treatment judgement*.

Tahap ketiga, melakukan pemaknaan secara kompherensif, dengan mencoba menemukan citra baik positif, negatif ataupun netral yang dibangun oleh LPP TVRI mengenai isu kenaikan harga BBM pada Mei 2008 dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas pada 2007-2008 pada masa pemerintahan SBY-JK.

(berbicara soal cara pandang TVRI sebagai TV publik dalam membangun wacana tertentu) Adakah hal itu berkaitan dengan motif ideologis dan politis LPP TVRI terhadap kubu tertentu.

Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan di Jakarta.. Karena penulis lebih memfokuskan penelitian yang bersifat studi literatur, maka penulis lebih banyak bersentuhan dengan data-data yang sudah terkumpul di arsip pemberitaan TVRI dan online internet.



## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap General Manajer LPP TVRI, ditemukan fakta yang menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan layar pemberitaan TVRI semenjak TVRI berubah statusnya menjadi LPP. Purnama Suwardi mengungkapkan, kontrol dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan TVRI sebenarnya sudah cukup lama. Sejak jaman TVRI masih menjadi corong pemerintah, hanya saja kritikan keras terhadap pemerintah pada masa TVRI belum menjadi LPP hanya dilakukan oleh sejumlah reporter atau jurnalis tertentu yang memiliki idealisme kuat dan berkomitmen untuk tidak terpengaruh terhadap tekanan politik dan kekuasaan dari manapun. Meskipun pada saat itu, ada konsekuensi yang harus ditanggung ketika seorang reporter TVRI berupaya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Harus diakui dengan pola pemberitaan yang bersifat seremonial seperti yang dilakukan TVRI di masa lampau, menjadikan masyarakat kita tidak cerdas dan berpikir kritis. Karena masyarakat hanya dijejali oleh pemberitaan yang searah tanpa bisa memberikan aspirasinya terhadap kebijakan pemerintah.

Seiring perjalanan waktu dan diberlakukannya undang-undang No.32 tahun 2002 tentang lembaga penyiaran publik, TVRI berubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Perubahan status TVRI sebagai LPP resmi dimulai pada tanggal 24 Agustus 2006 yakni pada saat TVRI memperingati hari lahirnya yang ke 44.

Sejak merubah statusnya menjadi LPP maka perubahan signifikan mulai merwarnai pemberitaan TVRI. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mantan manajer LPP TVRI, terungkap fakta bahwa meskipun perubahan corak pemberitaan yang sudah mulai ditekankan pada news value semenjak munculnya televisi swasta, perubahan secara signifikan terhadap layar pemberitaan TVRI dimulai sejak TVRI berubah statusnya menjadi LPP. Walaupun pada prakteknya sulit untuk membedakan ranah publik, mana yang ranah sebelumnya, namun komposisi pemberitaan antara publik dan pemerintah masih lebih banyak publik.

Dalam kaitannya dengan isu kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, LPP TVRI berupaya menempatkan dirinya pada posisi sebagaimana media lainnya. Di satu sisi, TVRI menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang logis dan rasional karena hal ini dilakukan berdasarkan situasi perekonomian dunia dimana kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai 110 barel dollar Amerika, memaksa pemerintah untuk mengikuti kenaikan harga yang meningkat tajam tersebut. Karena jika tidak, maka akan mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Namun di sisi lain, LPP TVRI juga berupaya mengakomodir apa yang dirasakan masyarakat dengan menyajikan pemberitaan yang sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa masyarakat sangat menderita dengan kenaikan BBM tersebut.

Begitupula dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, TVRI secara institusional menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang logis dan rasional, karena cadangan gas di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan cadangan minyak. Selain itu, dari seluruh negara di dunia hanya Indonesia dan Nigeria yang masih menggunakan minyak tanah. Sementara berdasarkan hitungan tatanan ekonomi produksi minyak tanah jauh lebih mahal dibandingkan dengan produksi gas yang melimpah.

Hal ini dinilai TVRI sebagai kebijakan yang rasional karena bertujuan untuk kepentingan rakyat di masa mendatang. Meskipun banyak terjadi penolakan dan kecaman dari berbagai kalangan yang menilai kebijakan ini tidak populis, LPP TVRI memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui informasi dan berita yang berimbang tentang fakta-fakta yang terkait dengan isu tersebut. Disinilah TVRI sebagai LPP telah menjalankan dua fungsi sekaligus, pertama sebagai pendukung kebijakan pemerintah yang dinilai logis, dan kedua sebagai penyambung lidah rakyat antara masyarakat dengan pemerintah.

Periode 2007-2008 adalah masa pemberitaan yang paling krusial mengenai Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dan Kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Pada periode ini kontroversi tentang kebijakan yang diambil pemerintah sebagai dampak dari meningkatnya harga minyak mentah dunia mencapai 110 juta dollar per barel merebak hingga ke pelosok negeri. Berbagai protes dan demonstrasi dari sejumlah kalangan menimbulkan aksi anarkis yang berujung pada tertangkapnya salah satu tokoh pergerakan masyarakat ke pengadilan karena disinyalir sebagai aktor intelektual dalam aksi demonstrasi tersebut. Pemberitaan kenaikan BBM juga semakin marak seiring dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang sedang digulirkan pemerintah. Pada saat itu antrian minyak tanah yang terjadi di sejumlah daerah karena pasokan minyak tanah mulai berkurang di masyarakat, menimbulkan keprihatinan sejumlah kalangan. Pemberitaan tentang kenaikan harga BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas semakin marak karena dianggap tidak populis dan hanya menguntungkan pemerintah. Sejumlah kalangan menilai kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas hanya menderitakan masyarakat.

Dalam bab analisis dan pembahasan ini penulis akan mencoba memberikan gambaran bagaimana konstruksi berita mengenai isu kenaikan harga BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas dan pola pemingkaiian berita yang dilakukan oleh TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik di tahun 2007 dan 2008.

#### **4.1 Konstruksi Realitas Kenaikan BBM dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke gas di LPP TVRI**

Realitas mengenai kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang digambarkan LPP TVRI umumnya diletakkan pada bulletin berita reguler dan ditempatkan pada headline berita. Selain itu, guna menyediakan ruang publik yang lebih luas pemberitaan terhadap dua kebijakan tersebut ditempatkan pada salah satu segmen khusus dari suatu paket berita, yakni Harapan Publik dan Suara Publik.

Secara skematis strategi komunikasi yang digunakan untuk menguatkan isi pemberitaan tentang kedua kebijakan tersebut, LPP TVRI menggunakan narasumber sebagai referensi. Dalam menentukan narasumber sebagai alat bantu

dan referensi berdasarkan kapabilitas dan kapasitas narasumber yang bersangkutan mulai dari pemerintah, para ahli atau pakar dan anggota DPR membidangi isu terkait. Dalam kaitannya dengan kenaikan BBM dan Kebijakan konversi minyak tanah ke gas, tentu yang menjadi narasumber adalah pemerintah atau institusi yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina. Selain itu juga dapat digunakan referensi narasumber dari ahli perminyakan seperti Kurtubi. Sebagai *cover both side*, atau keberimbangan pemberitaan, LPP masih membutuhkan pendapat atau *statement* yang cenderung menentang kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan guna mendapatkan referensi narasumber yang dapat memberikan simpati terhadap yang dirasakan masyarakat. Dalam hal ini LPP mengambil narasumber dari anggota DPR komisi Sembilan yang khusus membidangi isu terkait. Sebagai pendukung kelengkapan paket berita, LPP TVRI harus mendapatkan narasumber dari masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena kebijakan ini sangat berpengaruh dan bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Selain narasumber yang diwawancara, LPP TVRI memperkuat pemberitaan mengenai kedua isu tersebut adalah melalui kumpulan artikel yang terdapat di sebuah situs berita. Guna mendukung pemberitaan yang utuh, seringkali koordinator liputan menugaskan sejumlah kru untuk meliput fenomena yang diberitakan di situs berita tersebut.

Dalam membingkai pemberitaan, dapat ditemukan dalam judul, headline dan lead berita yang merupakan representasi dari isi berita. Meskipun dalam beberapa kasus demi efektivitas, judul juga seringkali berbeda.

Frame berita Lembaga Penyiaran Publik TVRI terhadap kenaikan harga BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas.

Secara keseluruhan kecenderungan LPP TVRI dalam teks pemberitaannya mengenai isu kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas adalah penekanan image atau citra terhadap kedua kebijakan tersebut dan image terhadap pembuat kebijakan tersebut dalam hal ini Pemerintah dan Pertamina.

Daftar Judul Pemberitaan Kenaikan BBM di LPP TVRI :

No.	Tanggal Siaran	Judul Berita	Buletin Berita
1	11 Mei 2008	Dampak Kenaikan BBM bagi pemilik Warteg	Megapolitan
2	7 MEI 2008	Masalah Pro Kontra Kenaikan	

		BBM	
3	21 MEI 2008	Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan BBM 28,7 %	
4	JAKARTA, 24 MEI'08	HARGA SEMBAKO MENGALAMI PENYESUAIAN	Branas
5	JAKARTA, 6 MEI 2008	KETUA DPR RI AGUNG LAKSONO MENANGGAPI KENAIKAN HARGA BBM	

Daftar Judul Pemberitaan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas di LPP TVRI :

No.	Tanggal Siaran	Judul Berita	Buletin Berita
1	15 APRIL 2008	Kelangkaan Minyak Tanah	Berita Nasional
2	4 APRIL 2008	MINYAK TANAH & LPG LANGKA	Kabar DKI
3	JAKARTA, 07 JUNI 2008	SOSIALISASI KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS MASIH KURANG	Suara Publik
4	Balaraja, Tangerang	TARGET PENYALURAN TABUNG LPG	

Dari keseluruhan pemberitaannya LPP TVRI menyoroti dua instansi yang memiliki peranan terkait kenaikan harga BBM dan Kebijakan konversi minyak tanah ke gas yakni pemerintah dan Pertamina. Kedua institusi ini dinilai bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM dan berbagai problematika lainnya yang terkait dengan permasalahan pasokan dan distribusi BBM, minyak tanah dan efektifitas program konversi minyak tanah ke gas serta upaya penghematan BBM.

Karena itu dalam melakukan analisis framing isu politik kenaikan harga BBM, maka dilakukan pemilahan sorotan isu editorial peran masing-masing dari kedua institusi itu.

Terkait dengan pembahasan isu kenaikan BBM dan Kebijakan konversi minyak tanah ke gas di LPP TVRI, berikut kategorisasi isu-isu yang relevan sesuai dengan teori analisis framing dari Robert N. Entman.

#### **4.1.1 Sorotan terhadap peran pemerintah**

##### **4.1.1.1 Define Problem (Pendefinisian Masalah)**

Peran pemerintah paling disoroti dalam pemberitaan TVRI terkait isu kenaikan BBM dan Kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Dalam framing Define Problem (Pendefinisian Masalah), LPP TVRI menganalisis dampak dari melonjaknya harga minyak mentah dunia yang mencapai 110 dollar Amerika per barel, sehingga memaksa pemerintah SBY-JK untuk mengambil kebijakan kenaikan BBM. Jika harga tidak dinaikkan, dan subsidi BBM tetap dijalankan, maka akan membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pembangunan Negara. Dalam pemberitaannya LPP TVRI berupaya untuk menginformasikan berita berdasarkan fakta yang berkembang di lapangan. Seperti halnya media lain, LPP berupaya menyampaikan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kenaikan Harga BBM secara proporsional berupa peliputan berita mengenai pernyataan pemerintah tentang alasan kenaikan BBM. Terhitung semenjak isu kenaikan BBM dihembuskan, ada beberapa agenda setting pemberitaan LPP TVRI terkait isu tersebut. Pernyataan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena salah satu fungsi media adalah menyebarkan informasi dari pemerintah kepada rakyat agar dapat memberikan pemahaman kepada publik tentang suatu kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Berikut salah satu contoh bagian dalam naskah berita LPP TVRI yang dapat dimasukkan dalam kategori Define Problem (Pendefinisian Masalah), Analisis Framing oleh Robert Entman :

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal pekan ini memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM akan segera dilakukan. Namun presiden belum menyebutkan secara pasti waktu penerapan kebijakan untuk menaikkan harga BBM ini. Kenaikan harga bbm merupakan dampak terus naiknya harga minyak dunia yang saat ini hampir mencapai 120 dolar amerika per barel. Akibatnya anggaran pendapatan dan belanja negara dikhawatirkan akan membengkak karena tidak sanggup menanggung subsidi bbm yang dapat melonjak mencapai 200 trilyun rupiah”.



TVRI berupaya menunjukkan kepada masyarakat, bahwa kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah merupakan tindakan yang terpaksa diambil sebagai dampak dari terus naiknya harga minyak mentah dunia yang mencapai 110 dolar amerika perbareel. Jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan tersebut, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara dikhawatirkan akan melonjak karena tidak sanggup menanggung beban subsidi BBM yang mencapai 200 triliyun rupiah. Kendati demikian, sebagai sebuah institusi yang telah berubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik, TVRI tetap menempatkan dirinya untuk dekat dengan rakyat dan mendengar aspirasi masyarakat. Meskipun secara institusi, TVRI menyadari bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang rasional dan logis, TVRI tetap berupaya mengkritisi kebijakan pemerintah sesuai dengan garis kebijakan editorialnya. Dengan merekrut tenaga reporter muda yang masih memiliki idealisme yang kuat dan tidak terpengaruh terhadap rezim Orde Baru, pemberitaan TVRI dalam koridor LPP sudah mulai menunjukkan jargon LPP yang selama tiga tahun diusung yakni independensi, netral dan tidak memihak.

Terbukti dalam pemberitaan tentang Kenaikan BBM, TVRI masuk ke dalam ranah publik, TVRI tetap menempatkan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat. Dari sejumlah naskah pemberitaan tentang isu kenaikan BBM yang dipaparkan TVRI, menunjukkan bahwa TVRI ingin memberikan gambaran kepada publik tentang bagaimana keresahan masyarakat terhadap isu kenaikan harga BBM.

Berikut salah satu contoh bagian dari naskah yang menggambarkan keresahan warga :

“Rencana pemerintah menaikkan harga BBM, ditanggapi masyarakat secara beragam. Ada masyarakat yang menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga BBM namun tidak sedikit juga masyarakat yang menolak”.

Dalam pemberitaan tersebut, LPP TVRI menyajikan fenomena masyarakat yang resah terhadap rencana kenaikan BBM. Terbukti dengan menampilkan narasumber dari sejumlah kalangan masyarakat yang beropini terhadap kenaikan harga BBM. Hal ini menjadi bukti bahwa bagaimanapun LPP TVRI ingin

menunjukkan eksistensinya sebagai televisi publik yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa seharusnya subsidi jenis premium diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah, seperti yang tergambar dalam contoh paragraph dalam naskah berita berikut ini:

“Pantauan tim liputan TVRI di beberapa SPBU di Jakarta, banyak kendaraan yang dikategorikan mobil mewah namun masih menggunakan bbm bersubsidi yaitu jenis premium. Padahal seharusnya BBM jenis premium hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah”.

Kenaikan BBM juga diperparah dengan kondisi langkanya minyak tanah akibat kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Dalam pendefinisian masalah, LPP TVRI menempatkan posisinya sebagai media yang berada di posisi tengah antara upaya melihat kebijakan konversi minyak tanah ke gas sebagai suatu langkah yang harus dilakukan dengan tetap menyuarakan kepentingan rakyat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap General Manajer LPP TVRI, secara institusional, TVRI menganalisis dampak dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas sebagai suatu keharusan yang semestinya dilakukan, mengingat hampir di seluruh belahan dunia, semua negara telah menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar rumah tangga kecuali Indonesia dan Nigeria. Selain itu, minyak tanah dinilai sebagai sumber daya alam yang jumlahnya telah menipis. Sehingga demi kelangsungan generasi selanjutnya, penggunaan minyak tanah harus dikurangi. Selain dapat menyelamatkan anggaran negara sebesar 65 triliun rupiah, tingkat efisiensi dan nilai ekonomi penggunaan kompor gas jauh lebih memadai.

Kendati demikian, sebagai lembaga yang memiliki berbagai kalangan stakeholder seperti masyarakat dan pemerintah, dalam pemberitaannya TVRI berupaya untuk tetap menyuarakan kepentingan publik. Sebagai lembaga media yang independen dan tidak memihak, TVRI tetap menyoroti pemberitaan keresahan masyarakat akibat kelangkaan minyak tanah.

Berikut salah satu bagian dari naskah berita TVRI yang dapat dikategorikan sebagai Define Problem (Pendefinisian Masalah) Kebijakan konversi minyak tanah ke gas oleh Robert Entman :

“Hingga saat ini kelangkaan minyak tanah masih sering terjadi hampir di seluruh wilayah, tak terkecuali di kota Jakarta. Seperti yang terjadi di salah satu pangkalan minyak tanah di daerah Setiabudi – Jakarta selatan. Ratusan warga sejak pagi bahkan subuh harus rela antri demi mendapatkan minyak tanah. Menurut warga, antrian seperti ini selalu terjadi setiap pasokan minyak tanah datang ke pangkalan tersebut. Dan, setiap orang hanya diijinkan membeli sebanyak lima liter minyak tanah dengan harga dua ribu 600 rupiah per-liter”.

Berikut salah satu naskah yang menggambarkan keresahan warga karena harus antri berjam-jam demi mendapatkan minyak tanah demi menghindari pembelian minyak tanah di tingkat pengecer yang harganya tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan jika harus mengambil di pangkalan minyak :

“Para warga menambahkan mereka rela antri berjam-jam karena jika mereka membeli minyak tanah di tingkat pengecer harga-nya mencapai 6 ribu 500 rupiah hingga 7 ribu rupiah per-liter”.

Terhitung semenjak isu Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke gas, TVRI memiliki frekuensi dan intensitas yang tinggi dalam menayangkan pemberitaan tentang antrian warga di sejumlah daerah untuk mendapatkan minyak tanah akibat kebijakan konversi dan unjuk rasa penolakan kebijakan konversi tersebut.

Berikut naskah yang menggambarkan aksi unjuk rasa tersebut :

“Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan massa yang mengatas namakan forum masyarakat pengguna minyak tanah –fmpmt- dan forum kota –forkot- menuntut pemerintah untuk segera membatalkan konversi minyak tanah ke gas. “Mereka menilai konversi minyak tanah ke gas hanya membuat kesusahan bagi rakyat yang ingin menggunakan minyak tanah. Rakyat harus mengantri panjang untuk mendapatkan minyak tanah dengan persediaan yang terbatas.”

Dari pemberitaan tentang kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang disajikan LPP TVRI memperlihatkan bahwa LPP TVRI ingin memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa di tengah kenaikan harga BBM yang mulai diberlakukan pemerintah, warga masyarakat juga dihadapkan pada persoalan antrian minyak tanah yang mulai sulit didapat sebagai konsekuensi dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas dan aksi penolakan kebijakan konversi oleh sejumlah elemen masyarakat.

#### **4.1.1.2 Diagnose Cause ( Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)**

LPP TVRI mencatat beberapa sumber masalah dari kenaikan harga BBM ini adalah berasal dari pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan menghadapi permasalahan yakni jika harga BBM tidak dinaikkan maka anggaran belanja negara terus terkuras untuk menyubsidi BBM. Hal ini sebagai akibat dari kebutuhan stok BBM nasional masih tergantung dari pasokan luar negeri. Sementara harga minyak mentah dunia melambung tinggi mencapai 110 dolar Amerika per barel. Subsidi yang selama ini diberikan pemerintah sebenarnya bersumber dari pajak rakyat, yang sebagian besar berasal dari pajak penghasilan. Tetapi dalam praktik pengalokasiannya sering tidak tepat sasaran sehingga justru menguntungkan orang-orang kelas menengah ke atas. Dalam perspektif ilmu ekonomi hal ini dapat dikatakan sebagai subsidi inefisiensi dimana subsidi yang selama ini ada justru lebih banyak dinikmati orang-orang yang tergolong mampu. Bila melihat latar belakang sejarah subsidi BBM, Indonesia telah menerapkan

harga subsidi bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, transportasi, industri, dan kelistrikan sejak tahun 1970-an. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, maka secara langsung akan meningkatkan kebutuhan energi. Di sisi lain, tingginya kebutuhan energi tersebut tidak dapat diimbangi dengan peningkatan ketersediaan, sehingga mengakibatkan meningkatnya subsidi yang harus ditanggung oleh negara. Apabila hal ini terus berlanjut maka berpotensi untuk mengganggu keamanan APBN dan mengurangi porsi pembiayaan sektor-sektor lain.

Harga minyak yang pada saat kenaikan BBM diberlakukan sedang melambung tinggi, jika terus dilakukan akan semakin menambah beban hutang karena pemerintah harus mencari dana untuk mensubsidi BBM. Sehingga keputusan penghapusan subsidi BBM dan kebijakan menaikkan BBM merupakan opsi yang paling tepat dalam mengatasi naiknya harga minyak mentah dunia.

Dalam pemberitaan mengenai sumber permasalahan pemerintah menaikkan harga BBM, LPP TVRI berupaya menyajikan pemberitaan tentang pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai alasan kenaikan BBM. Informasi yang luas terhadap alasan pemerintah dalam menaikkan BBM diakomodir dalam berita TVRI. Pemberitaan tersebut terdiri dari pernyataan-pernyataan sejumlah menteri yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut. Seperti pemberitaan kenaikan BBM yang menayangkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani tentang alasan kenaikan BBM dari sisi anggaran negara. Selain itu, juga TVRI berupaya menyajikan pemberitaan kenaikan BBM menyangkut stok BBM dalam negeri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro.

Berikut salah satu bagian naskah berita LPP TVRI yang dapat dikategorikan dalam Diagnose Cause (Perkiraan masalah atau sumber masalah) atas kenaikan BBM oleh Robert Entman :

“Pemerintah tetap berencana menaikkan harga BBM meski terjadi penolakan dari sejumlah kalangan. Menteri keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers digedung departemen keuangan mengatakan kenaikan harga bbm dua puluh delapan koma tujuh persen . Hal ini berarti untuk harga premium dari empat ribu lima ratus rupiah perliter menjadi enam ribu rupiah perliternya. Tentang

kepastian waktu kenaikan harga BBM Sri Mulyani mengatakan menunggu keputusan dari presiden setelah melakukan evaluasi dengan kementerian yang terkait dengan pengeluaran kartu bantuan langsung tunai –BLT- diantaranya mensos dan menkokesra”.

Dengan menyajikan pemberitaan secara proporsional tentang alasan kenaikan BBM dari sejumlah instansi terkait, akan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa kebijakan kenaikan BBM terpaksa diambil karena merupakan opsi yang paling tepat dalam menyelamatkan anggaran belanja negara.

“Menurut menteri keuangan Sri Mulyani kenaikan BBM tetap dilakukan karena dinilai merupakan opsi yang paling tepat. Selain itu penggunaan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan masyarakat menengah keatas dari pada masyarakat miskin.”

Terkait dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, LPP TVRI memperkirakan masalah atau sumber masalah tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi pemerintah dalam subsidi minyak mentah. Karena bagi Indonesia sebagai negara produsen dan konsumen minyak, kenaikan harga minyak mentah dunia memberikan dua dampak, yakni meningkatnya penerimaan negara, tetapi pada saat yang bersamaan mengakibatkan membengkaknya beban subsidi dalam jumlah yang sangat besar sehingga mengganggu APBN. Untuk itu kebijakan konversi minyak tanah ke gas diambil sebagai salah satu upaya menyelesaikan persoalan tersebut.

Di dalam negeri, program konversi energi dari minyak ke gas, sebagai langkah-langkah optimalisasi pemanfaatan gas bumi sekaligus penghematan penggunaan BBM, Hal ini diupayakan untuk mendorong berlangsungnya konservasi energi di seluruh sektor ekonomi yang ada agar menggunakan gas. Seperti sektor transportasi, industri, rumah tangga, maupun sektor pembangkit tenaga listrik.

Secara institusional, LPP TVRI mendapatkan sejumlah data dari beberapa instansi terkait perlunya kebijakan konversi minyak tanah ke gas sebagai akibat dari mulai

menipisnya cadangan minyak tanah mentah sebagai sumber daya alam. Sementara, cadangan gas di Indonesia sangat berlimpah sehingga kebijakan konversi minyak tanah ke gas dinilai logis dan rasional dan baik untuk kepentingan masyarakat di masa mendatang.

Namun sebagai instansi media yang mengusung nama publik, LPP TVRI harus menyajikan fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dalam pemberitaan yang dipaparkan tentang dampak konversi minyak tanah ke gas adalah antrean panjang warga masyarakat di sejumlah daerah demi mengantri minyak tanah yang stoknya mulai berkurang dan mulai mengalami kelangkaan di sejumlah daerah akibat kebijakan konversi tersebut.

Berikut salah satu bagian dari naskah berita yang dapat dikategorikan sebagai Diagnose Cause (Perkiraan Masalah atau Sumber Masalah) dari Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas oleh Robert Entman :

“Kelangkaan minyak tanah yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya kebijakan konversi minyak tanah ke gas sehingga pasokan minyak tanah yang ada di pasaran menjadi berkurang. Kelangkaan ini timbul sejak adanya kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Pasokan minyak tanah yang biasanya dikirim ke agen-agen sebanyak dua hingga tiga kali dalam seminggu/ saat ini hanya dilakukan seminggu sekali”.

Terkait dengan hal tersebut, dalam pemberitaannya TVRI juga berupaya mengetengahkan sumber masalah dari kebijakan konversi tersebut melalui berbagai narasumber mulai dari ahli perminyakan hingga anggota DPR komisi tujuh yang concern terhadap isu ini.

Berikut bagian dari contoh naskah yang melibatkan peranan DPR :

“Wakil ketua komisi VII DPR RI/ Sutan Bhatogana menegaskan/ kelangkaan minyak tanah terjadi saat ini karena ketidakmerataan distribusi minyak tanah ke beberapa daerah. DPR mendesak BPH migas untuk segera

mengumpulkan hasil pengamatan di lapangan mengenai alasan kelangkaan minyak tanah”.

Selain menyajikan fakta tentang bagaimana desakan DPR dalam mempertanyakan kelangkaan minyak di sejumlah daerah akibat konversi minyak tanah ke gas, LPP TVRI juga mendapatkan pernyataan tentang sumber masalah kelangkaan minyak tanah dari Kepala BPH Migas.

Berikut salah satu bagian naskah tentang pernyataan BPH Migas tersebut :

“Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menjelaskan berdasarkan survey yang dilakukan kelangkaan minyak yang terjadi merupakan akibat dari penyalahgunaan minyak tanah oleh sebagian oknum yang berkepentingan”.

#### **4.1.1.3 Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral)**

TVRI menilai krisis BBM dan kelangkaan minyak tanah memerlukan keputusan yang tepat dan cepat. Tidak ada yang salah dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM terlebih menilik kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai 110 juta dolar per barel. Kebijakan menaikkan harga BBM dilakukan sebagai konsekuensi logis dan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun, ketika sebuah kebijakan yang dinilai logis dan rasional oleh pemerintah tersebut telah menyebabkan antara lain munculnya spekulasi pasar untuk menaikkan harga kebutuhan pokok dan transportasi umum maka hal ini menjadi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Selain itu juga terdapat pemberitaan yang memperlihatkan dampak dari kenaikan harga BBM baik sebelum kenaikan maupun pasca kenaikan mulai terasa oleh masyarakat. Sebelum kenaikan BBM, warung-warung makanan mulai sepi pembeli sementara pasca kenaikan BBM, harga sejumlah bahan pokok mulai ikut mengalami peningkatan yang signifikan.



Berikut ini contoh naskah berita yang dapat dikategorikan sebagai Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) tentang Kenaikan BBM yang menggambarkan dampak kenaikan BBM terhadap meningkatnya harga sejumlah bahan pokok:

“Pasca kenaikan harga BBM, harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta memang melakuakn penyesuaian, meskipun tidak sebesar kenaikan harga BBM. Penyesuaian harga ini bahkan sudah terjadi seminggu sebelumnya. Di pasar Kebayoran Lama – Jakarta selatan dan pasar Bendungan Hilir – Jakarta Pusat. Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok berkisar tiga hingga lima persen. Harga minyak goreng curah naik dari 11 ribu menjadi 11.500 rupiah per-kilogram. Beras kualitas satu menjadi 5 ribu dari yang sebelum-nya 4.500 rupiah per-kilogram. Sedangkan tepung sagu mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 4.500 menjadi 5.500 rupiah per-kilogram”.

Selain memiliki dampak terhadap harga sejumlah bahan pokok, kenaikan BBM juga berdampak pada mulai sepi nya warung makanan :

“Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang mulai diberlakukan akhir mei ini tidak hanya berdampak pada sejumlah aspek negara juga rakyat kecil khususnya para pedagang makanan. Bagi sebagian masyarakat khususnya para pedagang makanan kebijakan ini dirasakan membebani mereka di tengah melonjaknya harga sejumlah bahan pokok. Hal ini menyebabkan banyaknya warung makan yang tidak membuka warungnya karena sepi pembeli”.

Tidak hanya itu, kenaikan BBM juga memiliki dampak kenaikan tarif angkutan umum. Berikut contoh naskah dampak kenaikan BBM terhadap kenaikan tariff angkutan umum :

“Kenaikan tarif angkutan umum tidak bisa dihindari lagi jika harga bahan bakar minyak naik namun belum diketahui besaran pastinya karena baru dalam tahapan pembahasan dinas terkait. Sebenarnya tarif angkutan umum sudah harus naik sejak awal tahun yaitu sejak adanya kenaikan harga ebrbagai bahan kebutuhan pokok dan harga suku cadang kendaraan. Dengan adanya kenaikan harga bbm, harga suku cadang kendaraan juga secara otomatis turut naik sebagai efek domino yang mengiringinya”.

LPP TVRI berupaya membingkai pemberitaan tentang dampak kenaikan BBM yang berpengaruh terhadap transportasi dan sejumlah bahan pokok. Dalam pemberitaan yang ditampilkan TVRI terlihat jelas bahwa TVRI sebagai LPP telah mampu menyuarakan kepentingan publik secara proporsional. Pemberitaan-pemberitaan tentang upaya menyampaikan kebijakan pemerintah terhadap kebijakan kenaikan BBM telah berhasil diimbangi dengan pemberitaan yang berasal dari suara rakyat.

Begitupun dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji, LPP TVRI juga menilai kebijakan pemerintah tersebut sangat logis mengingat persediaan bahan bakar gas di Indonesia yang melimpah. Selain itu juga alasan efisiensi dari sisi ekonomi penggunaan gas dalam rumah tangga. Meskipun demikian, dalam pemberitaannya TVRI selalu menyajikan fakta tentang kesulitan warga dalam mendapatkan minyak tanah. Kebijakan konversi minyak tanah ke gas, telah menimbulkan kelangkaan minyak tanah di sejumlah daerah karena pasokan minyak tanah ke setiap pangkalan minyak tanah mulai dikurangi. Sementara di sisi lain, seiring maraknya program konversi minyak tanah ke gas, sejumlah agen elpiji mengalami kekurangan pasokan gas elpiji. Hal ini dikarenakan, para produsen pembuat tabung gas elpiji dihadapkan pada kondisi harga baja pembuat tabung yang juga turut melambung sebagai ekkses dari kenaikan BBM.

Berikut salah satu bagian dari naskah berita TVRI yang menggambarkan kondisi tersebut :

“Kebijakan pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas dinilai para warga sangat terburu-buru dan tidak siap. Terbukti, saat ini minyak tanah menjadi barang langka dan mahal. Sedangkan, gas elpiji sebagai pengganti minyak tanah, saat ini juga sulit didapat dan harga-nya kian melambung”.

Selain ketidaksiapan warga dalam menggunakan gas elpiji, surutnya penjualan kompor minyak oleh sejumlah industri kecil kompor minyak, juga menjadi akibat adanya kebijakan konversi minyak tanah tersebut. LPP TVRI berupaya menyentuh semua elemen masyarakat dengan pemberitaan yang bersifat soft news atau human interest. Berikut contoh naskah human interest tentang mulai surutnya usaha pembuatan kompor minyak tanah :

”Dentingan lempengan besi masih sesekali terdengar di rumah usman, salah seorang produsen kompor minyak di Jalan Dewi Sartika, Cawang Jakarta. Sejak satu tahun terakhir, suasana bengkel kerja usman terlihat lesu, tidak lagi seramai dulu saat kompor minyak masih menjadi produk andalan mereka. Kini tumpukan kompor minyak yang tidak lagi bisa dijual hanya menambah kepahitan bagi kelanjutan usaha mereka setelah pemerintah memberlakukan program konversi minyak tanah ke gas. Banyak dari para produsen langsung menutup usahanya, sementara sebagian lagi mencoba bertahan dengan memproduksi alat masak lainnya. Dulu, dalam satu bulan mereka memproduksi seratus kompor dengan harga 40 ribu hingga 120 ribu rupiah. Kompensasi ganti rugi berupa usaha perakitan kompor gas dari pertamina pun tidak berjalan lancar”.

Sementara itu, di tengah upaya pemerintah mencanangkan program konversi minyak tanah ke gas, pemerintah berupaya memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait keuntungan konversi minyak tanah ke gas. Dalam argumentasi yang diajukan pemerintah, wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan dengan adanya program konversi minyak tanah ke gas ini masyarakat diuntungkan karena dengan menggunakan gas dibanding minyak tanah mampu menghemat biaya Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu perbulan. Angka ini dihitung dari

kebutuhan rata-rata minyak tanah rumah tangga 20 liter per bulan yang mampu dikonversi oleh 2,5 tabung gas seberat 3 kg. Perbandingannya dapat mencapai 1:2. Dari sisi pemerintah, program ini juga akan mampu menghemat subsidi Rp 22 triliun per tahunnya atau hampir senilai dengan keuntungan Pertamina rata-rata per tahun. Secara rata-rata, konsumsi minyak tanah di Indonesia berkisar pada 3,75 liter per jiwa per bulan. Di Jakarta, tingkat konsumsinya bisa mencapai angka 8 liter per jiwa per bulan. Jika diperbandingkan biaya penggunaan gas elpiji dengan minyak tanah, sesungguhnya gas jauh lebih murah dan lebih ramah lingkungan, namun masyarakat tetap menggunakan minyak tanah. Namun, kendala substitusi minyak tanah ke gas, memang cukup besar. Gas tidak mudah di handle seperti minyak tanah, tetapi harus dicairkan dalam bentuk elpiji, yang tentunya membutuhkan tabung gas. Bagi masyarakat kelas bawah, konversi minyak tanah ke gas, terkendala dengan kemampuan ekonomi untuk membeli tabung dan kompor gas. Sementara, pasokan minyak tanah mulai mengalami pengurangan dari sejumlah agen minyak.

Berikut Contoh naskah berita yang menggambarkan kelangkaan minyak tanah

“Ketersediaan dan distribusi gas elpiji di stasiun pengisian elpiji masih mencukupi dan tidak terganggu. Kelangkaan gas elpiji yang sempat merebak beberapa waktu lalu. Disinyalir terjadi akibat distribusi yang terhambat di tingkat agen”.

Dari pemberitaan yang dipaparkan LPP TVRI memberikan gambaran tentang dampak dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari naskah-naskah berita yang disajikan menunjukkan beragam reaksi dan pendapat masyarakat tentang kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Sebagian masyarakat merasakan, kebijakan ini sangat membantu usaha yang mereka jalani mulai dari biaya yang jauh lebih ekonomis dan terkait masalah higienitas. Namun di sisi lain, banyak kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya menerima kebijakan konversi tersebut dengan alasan belum terbiasa

menggunakan gas, adanya kekhawatiran terhadap resiko kebakaran yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan gas akibat kualitas tabung gas yang kurang baik.

“Berbeda dengan masman seorang ibu rumah tangga yang juga berjualan sayur mayur surim mengatakan, harga gas elpiji tiga kilo gram sudah naik dari harga sebelumnya 14 ribu rupiah menjadi 15 ribu rupiah pertabungnya. Meski marmin telah menggunakan tabung gas tiga kilogram, namun jika harus memilih ia lebih suka menggunakan kompor minyak tanah alasannya, ia sudah terbiasa menggunakan kompor mitan. Marmin juga masih kuatir dengan banyaknya kebakaran yang terjadi akibat penggunaan kompor gas”.

Selain adanya kekhawatiran kemungkinan terjadinya kebakaran, masih banyak warga yang lebih memilih menggunakan kompor minyak tanah dibandingkan kompor gas. Berikut contoh naskah yang menggambarkan hal tersebut :

“Saat ini pemerintah provinsi DKI Jakarta sedang mensosialisasikan penghapusan minyak tanah pada Mei 2008. Namun fakta dilapangan, minyak tanah masih sebagai primadona untuk memasak bagi sebagian masyarakat Jakarta, meskipun pemerintah telah mengurangi pasokannya. Di daerah Kebayoran Baru Jakarta selatan ini misalnya, puluhan warga saling berebut mendapatkan 4 liter minyak tanah di sebuah agen minyak seharga 2500 rupiah perliternya. Mereka tidak punya pilihan lain, karena kompor gas gratis tiga kilo-an belum juga mereka dapatkan.”

Dari pemberitaan yang disajikan LPP TVRI tentang penggunaan kompor gas di rumah tangga, membuktikan meski secara institusional LPP TVRI memandang kebijakan konversi minyak tanah ke gas merupakan kebijakan yang rasional, dalam pemberitaannya TVRI tetap menyajikan keresahan dan keberatan warga dalam menggunakan kompor gas.

#### 4.1.1.4 Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah)

LPP TVRI menilai menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang dilematis yang harus diambil pemerintah. Hal ini dilakukan guna menyelamatkan anggaran negara yang selama ini terkuras untuk memenuhi subsidi BBM. Jika harga BBM dinaikkan seiring dengan harga minyak mentah dunia, maka berarti pemerintah telah mengambil keputusan politik yang memaksa masyarakat untuk berhemat. Pencabutan subsidi yang dilakukan pemerintah juga dinilai LPP TVRI sebagai langkah yang amat berat, namun akan menguntungkan di masa yang akan datang. Karena selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah keatas, yang memiliki kehidupan sosial ekonomi diatas rata-rata. Subsidi BBM yang selama ini ada, kurang dirasakan oleh masyarakat kecil. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang dianggap tidak populis di mata masyarakat, namun sebenarnya berpihak pada kepentingan rakyat. Secara politik, pemerintah harus mampu memenangkan persepsi publik bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah keputusan yang memihak pada rakyat. Sebagai upaya penyelesaian masalah kenaikan BBM yang diiringi dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dengan mencanangkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disebarkan ke berbagai rumah tangga. Bantuan dana sebesar seratus ribu rupiah hingga tiga ratus ribu rupiah ini dinilai sangat membantu masyarakat di tengah kesulitan yang mendera mereka.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan BLT dapat dikategorikan sebagai penyelesaian masalah (*Treatment Recommendation*) akibat kebijakan yang digulirkan pemerintah.

Berikut salah satu contoh naskah berita tentang kebijakan BLT sebagai *Treatment Recommendation* (Penyelesaian Masalah) dari kebijakan yang digulirkan pemerintah :

“Bersamaan pengumuman kenaikan harga BBM tadi malam menteri kordinator kesejahteraan rakyat Aburizal Bakri dan menteri sosial Bahtiar Hamzah menegaskan bantuan langsung tunai- blt- hari ini sejak pukul 10 pagi sudah bisa dicairkan melalui kantor pos di sepuluh kota. Bachtiar

Hamzah menambahkan bahwa sejak tanggal 15 juli lalu kartu BLT telah didistribusikan.”

Selain pencairan dana BLT, pemerintah juga mempersiapkan berbagai program tambahan untuk mengurangi dampak kenaikan BBM yakni dengan melakukan perlindungan sosial bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat pinggiran perkotaan. Selain itu juga upaya untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha kecil menengah. Upaya lain seperti peningkatan jumlah beras miskin (raskin) yang mencapai 15 kilogram pertahun juga terus dilakukan sebagai kompensasi dari kenaikan harga sejumlah bahan pokok akibat Kenaikan harga BBM.

“Pada kesempatan yang sama menkokesra mengatakan pemerintah telah mempersiapkan berbagai program tambahan untuk mengurangi dampak kenaikan bbm yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok pertama untuk perlindungan sosial bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat pinggiran perkotaan dan kelompok kedua dengan program pemberdayaan masyarakat sedangkan kelompok ketiga untuk pengembangan usaha kecil menengah”.

Meskipun di kemudian hari, kebijakan ini tidak berjalan efektif karena terjadi ketidakmerataan pembagian BLT di sejumlah daerah namun pemerintahan SBY JK tetap memandang kebijakan BLT dirasakan cukup membantu masyarakat menengah ke bawah.

“Pencairan bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin telah dilakukan pemerintah sejak kemarin. Meski berjalan dengan baik pelaksanaan pencairan BLT masih memiliki kendala dilapangan. Seorang warga jalan luar batang penjarangan jakarta utara eneh misalnya ia kecewa karena hari ini tidak bisa mencairkan dana BLT. Sebelumnya ia tidak mengetahui kantor pos pluit hari ini tutup”.

Dari pemberitaan LPP TVRI mengenai Bantuan Langsung Tunai, menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Langsung Tunai dapat dijadikan langkah dan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi kenaikan BBM dan sejumlah bahan pokok yang turut mengalami kenaikan.

Sementara terkait dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, pemerintah harus mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa pencaangan program konversi dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup dan efisiensi penggunaan bahan bakar dalam rumah tangga. Terkait dengan keraguan dari masyarakat yang tidak mampu membeli tabung gas sebesar 12 kilogram, pemerintah telah memberikan tabung gas berisi tiga kilogram yang dinilai lebih ekonomis. Dan guna mendukung program tersebut, pemerintah membagikan secara gratis tabung gas 3 kilogram tersebut ke setiap rumah tangga secara merata. Meskipun di kemudian hari, lonjakan kebutuhan terhadap tabung gas tiga kilogram meningkat seiring kebutuhan masyarakat, Pertamina tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Target penyaluran 15 juta tabung LPG akan dapat terpenuhi, karena tabung gas lpg akan terus diproduksi. Selain itu Pertamina masih akan memperoleh delapan juta tabung tambahan dari berbagai pabrik. Optimisme ini disampaikan vice presiden gas domestik Wahyudin Akbar di sela kunjungan kerja ke pabrik tabung gas tiga kilogram PT. Pelangi Indah Canindo, Balaraja, Tangerang. Namun, direktur jenderal migas Evita Legowo meragukan pemenuhan target penyaluran tabung gas untuk tahun 2008 dapat tercapai”.

Selain upaya pemenuhan tabung gas elpiji oleh Pertamina, Pemerintah menargetkan program konversi minyak tanah ke gas dapat tuntas pada 2010 mendatang. Berikut target yang ingin dicapai Pertamina, yang dapat dikategorisasikan sebagai Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) atas Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas :



Program konversi minyak tanah ke gas yang sebelumnya ditentukan harus tuntas pada tahun 2012 kini dimajukan menjadi tahun 2010. Dipercepatnya program konversi itu disanggupi pihak Pertamina selaku pemegang mandat pengadaan 42 juta tabung gas bagi 42 juta kepala keluarga tidak mampu. Pada pertemuan terbuka dengan departemen terkait yang dibuka menteri perindustrian Fahmi Idris serta asosiasi produsen tabung dan kompor gas beserta komponennya dirut Pertamina Ali Sumarno menyatakan kesiapannya bersama-sama para produsen untuk menyediakan tabung gas yang aman sesuai target mutu dan waktu”.

Dari pemberitaan yang disajikan LPP TVRI tentang target penyaluran tabung gas elpiji menunjukkan bahwa upaya penyelesaian masalah dari kurang diterimanya kebijakan konversi minyak tanah ke gas oleh masyarakat adalah dengan pemerataan penyaluran tabung gas elpiji ke sejumlah daerah. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan menggunakan kompor gas secara cuma-cuma dan membuktikan bahwa kebijakan konversi minyak tanah ke gas merupakan kebijakan yang logis dan rasional.

#### **4.1.2 Sorotan terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat**

##### **4.1.2.1 Define Problem (Pendefinisian Masalah)**

Selain menyoroti peran pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam menaikkan harga BBM, LPP TVRI juga menyoroti peranan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang berdiri di atas kepentingan rakyat dan memiliki hak untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap tidak populis atau kurang menguntungkan masyarakat.

Seperti yang dilansir situs berita Antara edisi Kamis 22 Mei 2008, menyebutkan sejumlah anggota DPR mempertanyakan apa dasar pemerintah menaikkan harga BBM. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), menjadi pertanyaan besar bagi sebagian anggota Komisi VII. Hal ini mengingat hingga Maret 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih mengumbar janji tidak akan menaikkan harga BBM. Menurut sejumlah anggota Komisi VII, masih ada

cara lain untuk menyelamatkan APBN, seperti memotong anggaran untuk menteri.

PDIP tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Alasannya, pemerintah masih memiliki opsi lain guna mengurangi kenaikan subsidi akibat tingginya harga minyak dunia. Opsi lain tersebut antara lain meningkatkan produksi minyak, menekan biaya operasi yang dikembalikan negara (*cost recovery*), diversifikasi energi dan belum optimalnya pemanfaatan bahan bakar nabati.

Dalam pemberitaan yang disajikan LPP TVRI, dipaparkan alasan Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana pemerintah dalam menaikkan BBM adalah karena akan menambah beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang kian sulit. DPR menilai pemerintah seharusnya mencari kebijakan lain dalam mengatasi harga mengatasi harga minyak mentah dunia. Menurut DPR, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan inflasi yang akan diikuti oleh kenaikan bahan pokok lainnya sehingga semakin memberatkan masyarakat.

Berikut contoh kutipan naskah LPP TVRI tentang peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengkritisi kebijakan kenaikan BBM :

“Pemerintah berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak –BBM– bersubsidi dalam waktu dekat. Hal ini untuk mencukupi anggaran pendapatan belanja nasional –apbn– serta mengatasi masalah perekonomian akibat pengaruh kenaikan harga minyak dunia. Menurut ketua DPR RI Agung Laksono pemerintah seharusnya mencari kebijakan lain untuk mengatasi masalah apbn bukan dengan menaikkan harga BBM. Karena menurutnya kenaikan harga BBM akan berdampak kenaikan inflasi yang akan diikuti kenaikan bahan pokok lainnya sehingga beban masyarakat khususnya masyarakat kecil semakin berat”.

Sebelum Rapat Paripurna pembentukan Panitia Khusus BBM dilakukan, sempat dilakukan rapat pimpinan DPR dan fraksi sepakat membatalkan agenda rapat konsultasi membahas kenaikan harga BBM dengan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono. Rapat kemudian menyerahkan kepada masing-masing fraksi dan komisi DPR menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

LPP TVRI menyoroti peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam isu kenaikan harga BBM dengan mengetengahkan berita-berita dan informasi tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan hak angket BBM oleh sejumlah fraksi di DPR. Sidang paripurna DPR pada Juli 2008 mengesahkan nama-nama anggota Panitia Khusus Hak Angket Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak. Anggota pansus terpilih akan menggelar rapat untuk menentukan ketua dan membahas agenda selanjutnya.

Anggota Pansus Angket Kenaikan Harga BBM 50 orang dari Fraksi Partai Golkar (12 orang), Fraksi PDIP (10), Fraksi Partai Demokrat (5), Fraksi PPP (5), Fraksi PAN (5), Fraksi PKB (5), Fraksi PKS (4), Fraksi BPD (2), Fraksi PBR (1), dan Fraksi PDS (1 orang). Pembentukan Panitia Khusus Hak angket BBM ini sebagai perwujudan salah satu peranan DPR dalam meninjau kembali kebijakan pemerintah yang dianggap tidak populis di mata masyarakat. Pembentukan panitia khusus hak angket BBM ini juga didorong oleh maraknya gelombang protes di sejumlah daerah terkait kenaikan harga BBM. Pembentukan Panitia Khusus hak angket BBM ini adalah untuk menyelidiki kebijakan yang diambil pemerintah tersebut dan adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan Pertamina. Dalam pembentukan pansus BBM yang diketuai oleh anggota DPR dari fraksi Demokrat, Zulkifli Hasan, ada banyak fraksi yang menuntut hak angket BBM. Keputusan DPR dalam hak angket BBM adalah meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM melalui rapat panitia khusus BBM.

#### **4.1.2.2 Diagnose Cause (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)**

Disinyalir sumber masalah dari kenaikan BBM adalah presiden tidak mendapat dukungan politik mayoritas di parlemen saat mengeluarkan kebijakan yang perlu dukungan parlemen. DPR menghadapi dilema, menerima kenaikan harga BBM berarti melawan aspirasi publik, sementara jika menolak, realitasnya harga-harga sudah terlanjur naik. Menyikapi gelombang protes kenaikan BBM di

sejumlah daerah, bahkan terjadinya tindakan anarkisme dari sejumlah kalangan masyarakat yang berujung pada tertangkapnya salah satu tokoh pergerakan massa,

DPR membentuk panitia khusus hak angket BBM setelah melalui persetujuan dari sejumlah fraksi di parlemen. Pembentukan pansus ini sebagai perwujudan dari salah satu hak yang dimiliki DPR yaitu menyelidiki dan meninjau kembali kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat.

Selain itu, Panitia khusus tersebut dibentuk untuk memperbaiki strategi kebijakan energi yang menyebabkan persoalan kenaikan BBM dalam negeri. Strategi tersebut menyangkut perbaikan komposisi sumber daya energi, selama ini yang signifikan hanya migas, kita seharusnya mengembangkan energi alternatif seperti batubara, panas bumi, gas dan bioenergi. Ini agenda penting yang harus digagas Pansus, bukan hanya kompromi antar fraksi untuk kepentingan tertentu.

Adanya perbedaan pendapat antar fraksi tentang perlu tidaknya kenaikan BBM dilakukan, menjadi sorotan dalam pemberitaan TVRI. Berikut contoh naskah yang dapat dikategorikan sebagai Diagnose Cause (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) dalam melihat peranan DPR terhadap isu Kenaikan BBM :

“Perbedaan pendapat dari fraksi-fraksi di DPR membuat sidang paripurna yang membahas hak angket akibat kenaikan harga BBM diskors selama 15 menit. Lima fraksi yang mendukung hak angket yaitu Fraksi Pdi Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Pan Dan Fraksi Partai Bintang Reformasi. Sementara dua fraksi mendukung hak interpelasi yaitu Fraksi Pks Dan Fraksi Pds. Fraksi Partai Demokrat menolak kedua-duanya, ketua Fraksi Demokrat Syarif Hassan mengatakan kenaikan harga bbm sudah tepat untuk menyelamatkan APBN”.

#### **4.1.2.3 Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral)**

Pembentukan panitia khusus hak angket BBM merupakan keputusan yang harus diambil Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk dari kepedulian

terhadap kepentingan rakyat. Disamping itu, Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk mengetahui alasan utama di balik keputusan pemerintah dalam menaikkan BBM. Pertentangan terjadi antara sejumlah fraksi di DPR dalam pembentukan panitia khusus tersebut. Sejumlah fraksi menginginkan dalam menyelidiki kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM, diperlukan hak interpelasi atau hak untuk meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah.

Sementara sebagian besar fraksi memandang perlunya dilakukan hak angket atau hak untuk BBM sebagai upaya pencarian bukti di balik kenaikan BBM. Perbedaan yang paling menonjol adalah antara delapan fraksi yang menyetujui dilakukannya hak angket dengan dua fraksi yang tidak menyetujui dilakukannya hak angket. Dua fraksi yang tidak menyetujui penggunaan hak angket adalah fraksi partai Golkar dan Demokrat selaku partai politik penguasa selaku pengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Persoalan semakin meruncing tatkala salah satu anggota DPR dari fraksi Golkar, Yudi Crisnandi menjadi satu-satunya anggota fraksi Golkar yang menyetujui hak angket BBM. Hal ini tentunya mengejutkan dan mengecewakan anggota fraksi Golkar lainnya. Karena sebelumnya berdasarkan rapat internal fraksi Golkar, telah disepakati keseragaman antar anggota fraksi untuk menolak hak angker BBM dan menyetujui hak interpelasi. Dalam konteks pembuatan keputusan moral, sikap dan keputusan yang diambil Yudi Crisnandi merupakan sikap yang memang seharusnya dimiliki wakil rakyat. Meskipun ia harus berhadapan dengan kecaman dari internal partainya.

Seiring dengan sikap yang diambil Yudi Crisnandi tersebut, LPP TVRI berupaya menyajikan pemberitaan kepada khalayak, bahwa di tengah-tengah gencarnya kenaikan BBM yang tidak dapat dihindarkan, masih ada segelintir orang yang berjuang demi rakyat meskipun tantangan yang berat harus dihadapi.

Dalam pemberitaannya, LPP TVRI berupaya menghubungkan antara persoalan kenaikan harga BBM dengan keputusan DPR dalam pembentukan hak angket BBM yang akhirnya menyepakati penggunaan hak angket dalam menyelidiki kebijakan kenaikan BBM. Dalam naskah yang disajikan LPP TVRI

tersebut juga memperlihatkan peranan salah satu anggota DPR dari fraksi partai Golkar, Yudi Crisnandi menjadi satu-satunya anggota yang menyetujui penggunaan hak angket.

Berikut kutipan naskah yang dapat dikategorikan sebagai Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) terhadap peranan DPR dalam menyikapi kebijakan kenaikan BBM :

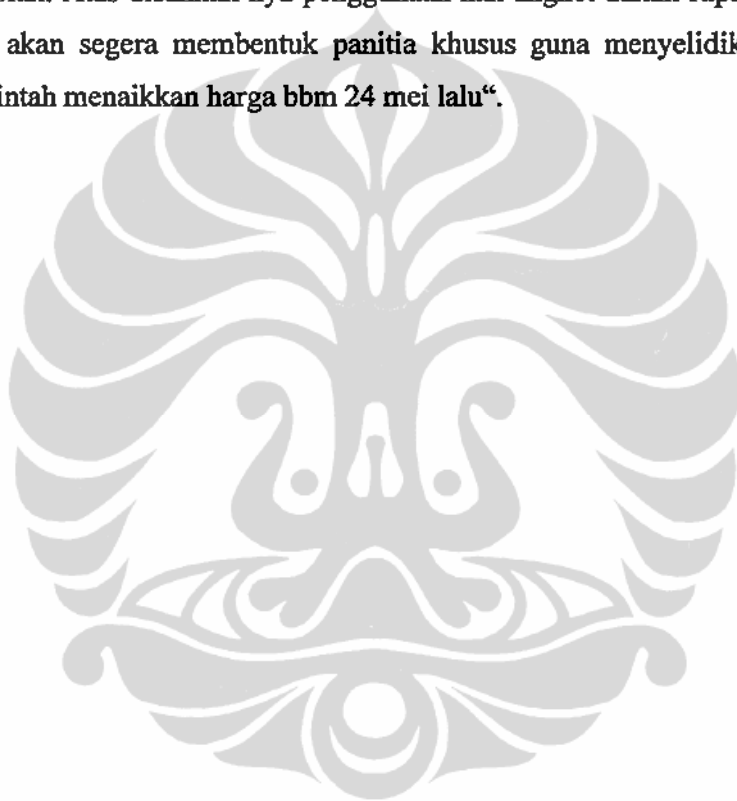
”Setelah melalui lobi antar pimpinan fraksi dan pimpinan DPR, sidang paripurna DPR-RI sore tadi akhir-nya memutuskan penggunaan voting untuk mengambil keputusan usulan penggunaan hak angket dan hak interpelasi atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM 24 mei lalu. Dari hasil voting terhadap tiga ratus 60 anggota DPR-RI yang hadir, rapat paripurna akhir-nya memutuskan penggunaan hak angket dan menolak hak interpelasi. Satu hal yang mengejutkan terjadi saat pengambilan voting, yudhi chrisnandi merupakan satu-satunya anggota fraksi golkar yang setuju penggunaan hak angket. Sedangkan fraksi persatuan pembangunan, fraksi keadilan sejahtera dan fraksi damai sejahtera yang semula menolak penggunaan hak angket akhir-nya menyetujui penggunaan hak angket“

#### **4.1.2.4 Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah)**

Dalam menghadapi pertentangan pendapat diantara sejumlah fraksi DPR, maka dalam Rapat Paripurna DPR diputuskan melalui mekanisme voting. Diputuskan dalam menyelidiki kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM, dipergunakan hak angket BBM. Hal ini dinilai lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan dari DPR. Selain itu, sebagai bentuk dari realisasi hak yang dimiliki anggota DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. Dalam pemberitaan yang disajikan LPP TVRI akhirnya memutuskan penggunaan hak angket dalam menyelidiki kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM.

LPP TVRI berupaya melihat persoalan ini sebagai peranan yang memang seharusnya dilakukan anggota DPR dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Berikut contoh naskah yang dapat dikategorikan Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah) terhadap upaya DPR dalam memperjuangkan hak rakyat :

“Persetujuan penggunaan hak angket diluar dugaan karena awal-nya kekuatan fraksi pendukung dan penentang berimbang. Ketua DPR – Agung Laksono langsung menyatakan rapat di-skors dan meminta diadakan lobi antar pimpinan fraksi. Lobi antar pimpinan fraksi akhir-nya menyetujui keputusan diambil melalui mekanisme voting. Dari tiga ratus 60 anggota DPR yang hadir, dua ratus 33 anggota mendukung penggunaan hak angket dan seratus 27 anggota menolak. Atas disahkan-nya penggunaan hak angket dalam rapat paripurna, DPR akan segera membentuk panitia khusus guna menyelidiki kebijakan pemerintah menaikkan harga bbm 24 mei lalu“.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui analisa pemberitaan LPP TVRI dan wawancara dengan jajaran Manajer TVRI, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan sosial-politik yang terjadi setelah momentum reformasi di Indonesia telah merubah corak dan warna kehidupan pers di Indonesia. Arus kebebasan informasi yang tidak terbandung merupakan salah satu indikator terjadinya kebebasan pers di negara demokrasi. Jika pada masa Orde Baru, arah pemberitaan ditentukan oleh pemerintah dengan struktur kekuasaan yang mengutamakan stabilitas keamanan dan harmonisasi dalam menjaga stabilitas sosial, maka pasca reformasi terlihat struktur kekuasaan yang menekankan pada kebebasan yang memungkinkan munculnya berbagai pemberitaan yang dianggap sebagai isu sensitif di zaman Orde Baru. Pada era reformasi, setiap instansi media mulai memberanikan dirinya dalam mengembangkan wacananya sendiri sesuai dengan kebijakan editorial masing-masing dan mengambil sikap yang berbeda dengan pemerintah.

2. Media memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menyampaikan suatu peristiwa atau fakta kepada para pembacanya. Karena apa yang disajikan media sangat berkaitan erat dengan bagaimana pembentukan opini publik. Berita yang dimunculkan oleh media tidaklah sepenuhnya mencerminkan keseluruhan peristiwa. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruang yang dimiliki media sehingga menyebabkan para pekerja media melakukan proses penyeleksian dan rekonstruksi data dan fakta. Hal lain yang menyebabkan terjadinya reduksi dan rekonstruksi fakta dalam berita yang disajikan media adalah faktor kebijakan editorial dan ideology yang dianut sebuah institusi media.



3. Dalam isu kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, terjadi kontroversi dan perdebatan wacana di kalangan media massa. Perdebatan tidak saja terhadap kedua isu tersebut, karena setiap media pada umumnya menilai kedua kebijakan tersebut memiliki dua mata pisau sekaligus, di satu sisi kebijakan tersebut dinilai sangat logis dan rasional tetapi di sisi lain keputusan pemerintah itu dinilai terlalu terburu-buru dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Perbedaan antar media juga terjadi pada level *concern* dari masing-masing media. *Concern* inilah yang membentuk frame yang berbeda bagi setiap institusi media dalam menyampaikan informasinya kepada khalayak.

4. Salah satu institusi media yang menunjukkan dinamika perubahan yang menonjol dalam arah pemberitaannya sejak lahirnya media tersebut, masa Orde Baru, reformasi dan perubahan statusnya menjadi sebuah lembaga yang mulai memberikan *concern* terhadap isu-isu publik adalah TVRI. Seperti telah diketahui bahwa kelahiran TVRI sebagai televisi pertama di Indonesia merupakan bagian dari agenda pemerintah dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional dan sebagai sarana menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Seiring perjalanan dan perubahan status yang berungkal terjadi, tidak membuat TVRI merubah pola pemberitaannya. Hal ini dikarenakan sistem politik sosial yang dianut Indonesia pada masa Orde Baru yang tidak membebaskan media untuk memberikan informasi secara luas. Pada saat itu kendali pemerintah dan kekuasaan masih sangat berpengaruh kuat terhadap pemberitaan TVRI. TVRI mulai menunjukkan perubahan dalam arah pemberitaan setelah era reformasi, pada saat gaung kebebasan pers dibunyikan. Perubahan secara signifikan baru mulai benar-benar terjadi saat TVRI berubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik pada tahun 2006. Pada saat itu, TVRI mulai memiliki berita yang menyangkut ranah publik dengan komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan pemberitaan tentang kebijakan ataupun kegiatan pemerintah.

5. Terkait isu kenaikan BBM pada Mei 2008, LPP TVRI membingkai isu tersebut dalam konteks ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi, LPP TVRI menyetujui gagasan kenaikan BBM dan mendukung segera dilaksanakan. LPP

TVRI juga mendukung pemerintah untuk mencabut seluruh subsidi BBM. Hal ini didasari kenyataan bahwa beban APBN untuk subsidi BBM semakin berat di tengah tingginya impor dan gejolak harga di pasar internasional. Selain itu subsidi BBM dinilai telah salah sasaran karena banyak dinikmati oleh kalangan menengah keatas. Secara sosial, dana alokasi subsidi BBM harus disalurkan bagi kepentingan pendidikan dan kesehatan rakyat miskin dengan tepat sasaran. Sedangkan secara politik, pemerintah dituntut mensosialisasikan kebijakan tersebut agar mendapat dukungan masyarakat dan meminimalisir resistensi yang destruktif.

6. Terkait dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, LPP TVRI juga mencoba membongkai isu tersebut dalam konteks ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi, LPP TVRI berupaya untuk mendukung langkah pemerintah dalam pencaanangan program konversi dengan memberikan pemberitaan yang positif mengenai efisiensi penggunaan gas elpiji dalam rumah tangga. Dengan penggunaan gas elpiji di tingkat masyarakat bawah, maka akan memangkas biaya hingga sekitar 20 persen jika dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah. Secara sosial, LPP TVRI berupaya mengetengahkan pemberitaan mengenai sosialisasi penggunaan gas elpiji dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan menciptakan cara hidup yang lebih bersih dan aman. Sedangkan secara politik, pemerintah dituntut untuk terus mensosialisasikan kebijakan tersebut melalui iklan layanan masyarakat agar mendapat dukungan masyarakat dan juga meminimalisir resistensi dari masyarakat.

7. Sikap dan posisi editorial LPP TVRI secara tegas dan lugas mendukung kenaikan dan pengurangan subsidi BBM dengan disertai rasionalitas kalkulasi ekonomi, namun di sisi lain bersikap kritis dan korektif terhadap pengambilan keputusan pemerintah tersebut yang juga berimplikasi luas terhadap naiknya harga bahan pokok sehari-hari. LPP TVRI secara simultan memposisikan dirinya secara kritis sebagai pengawal kebijakan pemerintah yang diambil terkait kenaikan harga BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Terbukti dengan banyaknya berita-berita yang masuk ke dalam ranah publik seperti

pemberitaan yang cukup proporsional tentang penolakan dan keresahan warga di sejumlah daerah terhadap Kebijakan Kenaikan BBM dan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas. Namun di sisi lain, LPP TVRI juga tetap mengekomodir suara rakyat yang menyetujui program yang dicanangkan pemerintah tersebut. Dengan demikian LPP TVRI tetap berupaya merangkul pemirsa atau khalayaknya yang pro dan kontra terhadap dua kebijakan pemerintah tersebut. Dengan demikian LPP TVRI tetap mengagendakan wacana kenaikan harga BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas untuk para khalayak sekaligus menjaga loyalitas mereka.

### **5.2 Saran terhadap proyeksi LPP TVRI ke depan.**

Perkembangan mutakhir di berbagai pelosok dunia memperlihatkan tantangan luar biasa yang dihadapi LPP baik yang sudah lama hadir maupun yang baru hadir lewat proses transformasi dari sebelumnya sebagai lembaga penyiaran pemerintah.

Tantangan ini terutama dari segi politis dan ekonomi. Dari segi politis, kemandirian yang dimiliki oleh LPP dapat membuka peluang terjadi gesekan antara LPP dan pemerintah. Dari segi ekonomi, LPP tak jarang kesulitan menghadapi persaingan yang seringkali tak berimbang dengan lembaga penyiaran komersial baik dari segi program, peralatan, sumberdaya manusia dan keuangan.

Tantangan serupa juga dihadapi oleh LPP di Indonesia. Kendati Indonesia telah memiliki Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang memandatkan kehadiran LPP namun mandat ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya.

Sudah saatnya Indonesia memiliki televisi publik yang difungsikan sebagai wahana bagi masyarakat dalam memperdebatkan urgensi permasalahan sehari-hari. Dalam perspektif multibudaya, urgensi kehadiran TV publik di Indonesia terasa semakin penting mengingat banyaknya masalah konflik antaretnis yang diakibatkan oleh prasangka-prasangka dan perdebatan kultural antaretnis yang tidak terkomunikasikan dengan baik. TV publik harus menjadi ajang perdebatan semua lapisan masyarakat, sehingga semua pihak tergerak untuk memecahkan persoalan sehari-hari (Deddy Mulyana 179-180).

TV publik harus lebih mawas diri dalam memperlakukan kelompok-kelompok budaya dan politik yang dipandang sebelah mata oleh pemerintah pusat. Dalam siarannya, TV publik harus melaporkan lebih banyak realitas di lapangan daripada hasil wawancara dengan tokoh-tokoh politik. Jika wawancara tetap dilakukan, maka informannya adalah mereka yang langsung terlibat di lapangan. Melalui pelaporan yang jujur, adil dan fenomenologis, tv publik dapat mendorong khalayak untuk bersimpati dengan kaum lemah. Wacana yang sehat dapat berkembang untuk menemukan solusi terhadap problem yang ada.

Lebih jauh lagi, TV publik dapat mempromosikan pengetahuan, kesadaran, dan empati antarbudaya, menyoroti keragaman budaya Indonesia dan pentingnya saling pengertian antarbudaya. TV publik dapat menayangkan acara yang melukiskan gaya hidup berbagai kelompok suku atau ras. Hingga kini, kebanyakan karakter yang tergambar dalam TV Indonesia adalah mereka yang berasal dari kelas menengah perkotaan, berpendidikan tinggi, berasal dari kelompok etnik dominan seperti Jawa dan Sunda.

Dengan menganut kebijakan multibudaya, TV publik turut andil dalam mengatasi prasangka dan konflik antarbudaya (etnik, ras, agama) di Indonesia. Dengan berkembangnya otonomi daerah di setiap provinsi, TV publik juga dituntut untuk meninggalkan perspektif sentralistiknya dalam memahami realitas Indonesia. TV publik bahkan seyogyanya mempromosikan perkembangan ekonomi dan budaya yang adil di tiap provinsi. Dari sekian banyak nilai dan kepentingan masyarakat yang harus dipromosikan oleh TV Publik adalah nilai demokrasi (yang juga mengisyaratkan empati antar budaya, kemampuan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kemampuan untuk bekerjasama dengan suku dan budaya lain) harus menjadi pilihan utama, karena aspek ini sangat diabaikan oleh pemerintah kita selama ini. Dengan demikian, TV publik dapat membantu membangun kesatuan dan persatuan Indonesia dalam arti sesungguhnya meskipun pemerintahannya kelak desentralistik.

TVRI sebagai TV publik adalah suatu keniscayaan. Dalam rangka itu, TV Publik harus menjadi ajang perdebatan semua lapisan masyarakat sehingga semua pihak tergerak untuk memecahkan persoalan mereka sehari-hari ataupun yang terkait dengan kebijakan pemerintah melalui ruang publik dengan menyajikan

program acara yang disiarkan secara langsung dan masyarakat ataupun penonton di studio dapat langsung berinteraksi secara langsung mengenai suatu topik yang sedang hangat dibicarakan.

Dalam mewujudkan semua itu, dibutuhkan sumber daya yang banyak, kuat dan kreatif untuk memproduksi acara-acara TV yang cerdas, bermanfaat tetapi sekaligus menghibur. Dengan demikian, acara-acara TV publik dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Ini merupakan tantangan besar bagi TV publik dan seluruh pengelola.

Khusus untuk LPP TVRI, TVRI harus mendesain ulang dalam artian mendesain yang betul betul dapat diterjemahkan apa yang menjadi domain publi itu. Misalkan hiburan yang mempunyai kualitas tetapi tidak menyimpang menjadi tuntutan publik. Televisi publik tidak bersaing dengan televisi swasta dalam hal rating. Tetapi dalam hal lain dia bersaing. Secara kelembagaan, TVRI tidak bersaing dengan televisi swasta. Tetapi dalam segmen berita atau program, TVRI harus bersaing dengan televisi swasta.

Meski secara institusional tidak bersaing tetapi dalam segmen yang lebih khusus yakni ranah pemberitaan harus dapat bersaing dengan televisi lain. Artinya TVRI harus mampu mengikuti perkembangan tentang bagaimana mendapatkan berita secara cepat dan dapat melaporkannya langsung dari tempat kejadian.

Dalam mewujudkan peranannya sebagai Televisi publik yang dekat dengan rakyat, TVRI harus mampu menyediakan ruang publik melalui program-program acara yang melibatkan interaksi antara pembawa acara dengan masyarakat baik di rumah ataupun di studio.

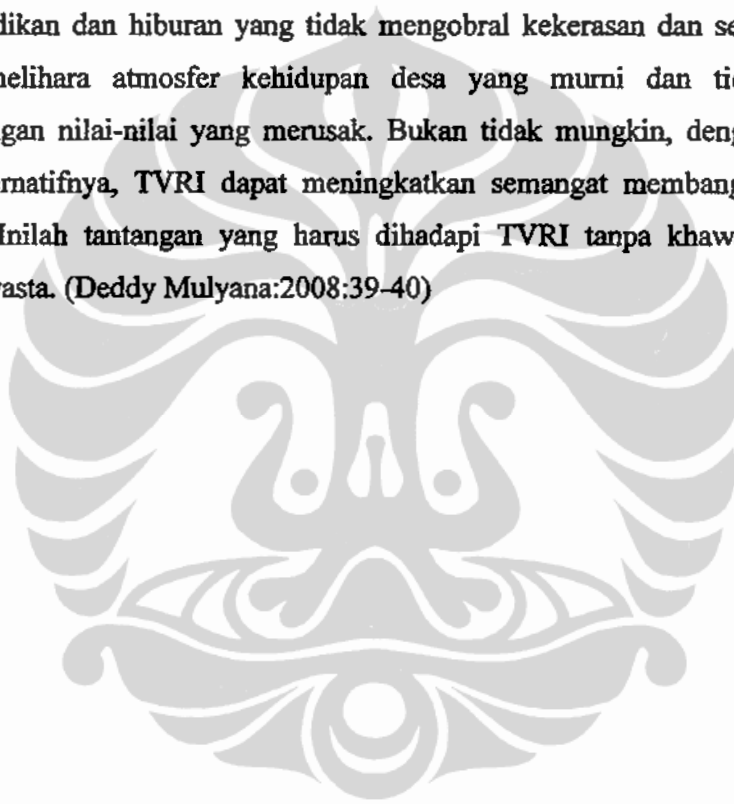
Jajaran Direksi TVRI harus memiliki komitmen yang kuat dalam memperbaiki kualitas tayangan dengan menyisihkan anggaran dari pemerintah.

Kualitas tayangan TVRI juga harus diperkuat dengan upaya penyelesaian pembangunan transmisi di Gunung Tela Bogor agar kualitas gambar yang diakses masyarakat dapat lebih jernih.

Dari segi keragaman tayangan, TVRI harus meningkatkan kualitas tayangannya melalui peningkatan kreativitas SDM dengan merekrut tenaga-tenaga baru mulai dari Reporter, Kameramen, audio man, para dubber, design grafis dan para

broadcaster yang mendukung sebuah tayangan dapat tampil di televisi. Hal ini dilakukan guna memperbaiki tampilan TVRI secara keseluruhan.

Jika dilihat dari segmentasi penonton TVRI, sebenarnya TVRI masih memiliki peluang untuk tetap eksis dan percaya diri diantara televisi-televisi swasta, yaitu dengan melihat masyarakat pedesaan sebagai khalayak pemirsanya yang potensial, terutama mereka yang belum terjamah oleh tv swasta. Seharusnya untuk merekalah sebagian besar acara TVRI ditujukan. Melalui program-program penerangan, pendidikan dan hiburan yang tidak mengobrol kekerasan dan seks, TVRI dapat memelihara atmosfer kehidupan desa yang murni dan tidak mencemarinya dengan nilai-nilai yang merusak. Bukan tidak mungkin, dengan siaran alternatifnya, TVRI dapat meningkatkan semangat membangun masyarakat desa. Inilah tantangan yang harus dihadapi TVRI tanpa khawatir tersaingi oleh tv swasta. (Deddy Mulyana:2008:39-40)



### DAFTAR PUSTAKA :

Sudibyo Agus, Citra Bung Karno. (1999), *Analisis berita pers orde baru*, Yogyakarta: Bigraf.

Sudibyo, Agus. (2004) *Ekonomi politik media penyiaran*, Yogyakarta: LKIs.

Sudibyo, Agus. (2004) *Politik media dan pertarungan wacana*. Yogyakarta: LKIS.

Cohen, Akiba. (1990) *Social conflict and television news*. New York : Sage Publications.

Sobour Alex, Analisis Teks Media. (2002) *Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Baksin, Askurifai. (2006) *Jutrnalistik televisi teori dan praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Kovach, Bill. (2006) *Sembilan elemen jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.

Mulyana, Deddy. (2008) *Komunikasi massa: kontroversi, teori dan aplikasi*. Bandung

Gazali Effendi, dkk. (2003) *Konstruksi sosial industri penyiaran*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia

Eriyanto. (2002) *Analisis Framing: suatu pengantar, pengantar buku analisis framing : konstruksi, ideology dan politik media*. Yogyakarta: LKIs.

Eriyanto. *Kekuasaan otoriter: dari gerakan penindasan menuju politik hegemoni*. Yogyakarta: LKIs.

Fairlough. *Ibnu Hamad*

Puji, Winarso. *Sosiologi komunikasi massa*. Prestasi Pustaka Publisher.

Puji, Winarso. (2005) *Sosiologi komunikasi massa*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Hidayat, Dedy. (2001) *Politik media dan pertarungan wacana*. Yogyakarta: LKIS.

- Panjaitan, Hinca. (1999) *Memasung televisi : kontroversi regulasi penyiaran di era orde baru*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Panjaitan, Hinca. *Membangun sistem penyiaran yang demokratis di Indonesia*.
- Siahaan, Hotman. *Pers yang gamang: Studi pemberitaan jajak pendapat Timor-Timur hal*.
- Howard, T. (2000). *Media power, professionals and policies*. London and New York: Routledge.
- Hamad, Ibnu. (2005) *Konstruksi realitas politik dalam media massa*. Jakarta : Granis.
- Imaji Media Massa: *Konstruksi dan makna realitas sosial iklan televisi dalam masyarakat kapitalistik*.
- Suprayoga Imam dan Tobroni. *Metodologi penelitian sosial-agama*
- James, C. (1992) *Mass media and society*. New York: Routledge.
- Creswell John W. *Research design: Quantitative and qualitative approach*. California: Sage Publication inc.
- Krishna Send an David T.Hill (2001). (Sirikit Syah, Institut Studi Arus Informasi, Penerjemah) Jakarta: PT. Sembrani Aksara Nusantara.
- Kompas. (2005) *BBM antara hajat hidup dan lahan korupsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Dewarso Lukas,dkk. (2008) *Mengelola kebebasan pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Paloma, Margaret. *Sosiologi kontemporer*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mary, Raine. (2004) *Editorial guidelines for the commonwealth broadcasting association*. Unesco.
- Masduki. (2005) *Kebebasan pers dan kode etik jurnalistik*. Yogyakarta: UII press.
- Masduki. (2007) *Regulasi penyiaran dari otoriter ke liberal*. Yogyakarta : LKIS.
- Schudson, Michael. (1996) *The power of news.*, London England: Harvard University Press.
- Mufid, Muhammad. (2005) *Komunikasi dan regulasi penyiaran*. Kencana.
- Qodari, Muhammad. *Papua merdeka dan pemaksaan skenario media*.



Lacey, Nick .(2000) *Narrative and genre: Key concepts in media studies*. London: Macmillan Press Ltd.

Fairlough Norman. *Media discourse*.

Norman K. Denzin dan Egon Guba. *Teori dan paradigma penelitian sosial*.

Nurudin. *Pers dalam lipatan kekuasaan*.

Uchjana, Onong. (2003) *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

OXFORD University Press. (2005) *Journalism ethics arguments and cases*

Shoemaker, Pamela J. (1996) *Theories of influences on mass media content*, USA: Longmann Publisher.

Pawito. (2007) *Penelitian komunikasi kualitatif*, Yogyakarta: LKIS.

Pawito. (2009) *Komunikasi politik: Media massa dan kampanye pemilihan*. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra.

Kitley, Philip. *Konstruksi budaya bangsa di layar kaca*. LSPP

Suwardi, Purnama. (2006) *Seputar bisnis dan produksi siaran televisi*. TVRI Sumatera Barat.

Rakhmat, Jalalludin. (1989) *Psikologi komunikasi masaa edisi kedua remaja karya*. Bandung.

Leo, Batubara Sabam. *Menegakkan kemerdekaan pers*, Jakarta: Dewan Pers.

Severin-Tankard. (2008) *Teori komunikasi massa*. Jakarta: Kencana.

Tesis, Anggiat. (2001) *Orientasi Pemberitaan TVRI pasca reformasi*

Nasution, Zulkarimien. (2007) *Panduan editorial untuk lembaga penyiaran publik*. Jakarta: UNESCO.

**Jurnal-Jurnal :**

*Thesis: Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi volume III/No.1/Januari-April Jakarta, 2004.*

*Thesis: Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi volume III/No.2/Mei-Agustus Jakarta 2004 .*

*Thesis: Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi volume III/No.3/September-Desember Jakarta 2004 .*

*Thesis: Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi volume IV/No.1/ Januari-April Jakarta 2005 .*

*Thesis: Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi volume IV/No.2/ Mei-Agustus Jakarta 2005 .*

**Artikel – aritkel:**

Kurniasih Budi (2009). *Indonesia akan kembali menguasai pasar gas dunia.* Tempo Interaktif

Ibnu Purna, Hamidi, Elis.(2009). *Pengembangan energi alternatif dalam rangka program diversifikasi energi.* Media Indonesia.

Media Indonesia (2008). *Presiden minta program konversi gas dituntaskan, mitan tanpa subsidi mulai diedarkan.* Media Indonesia.

Media Indonesia (2009). *Presiden minta direksi Pertamina belajar dari pengalaman.* Media Indonesia.

Wahyudin Munawir (2008). *Subsidi konversi minyak tanah disesalkan.* PKS Online

Kapanlagi.com (2008). *Ekonomi global jangan jadi alasan kenaikan harga BBM.* Kapanlagi.com

Media Indonesia. Com (2008). *Menaikkan harga BBM di tengah penderitaan rakyat.* Media Indonesia. com

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Hasil Wawancara Purnama Suwardi, General Manajer Berita LPP TVRI :

##### **Bagaimana latar belakang lahirnya Lembaga Penyiaran Publik?**

Sejumlah regulasi yang membuat LPP lahir, karena persaingan sangat ketat membuat program yang diminati masyarakat. Sebagai imbas dari persaingan industri televisi, sebuah televisi harus menampilkan program yang diminati masyarakat. Empat hal yang diminati dalam negara berkembang seperti Indonesia adalah. Bermuatan sensasi besar, dekat dengan pornografi, crime and violence untuk mengembalikan modal yang besar. Ketiga hal itu di negara maju ada tetapi di tempatkan di jam malam. Yang keempat yang ada di Indonesia yaitu klenik dan mistik.

Oleh karenanya diperlukan regulasi.

Industri televisi kan bermula dari kebijakan Open Sky Policy, bahwa udara kita terbuka, hal ini membuka kesempatan seluasnya untuk membuka industri pertelevisian asal punya modal.

Setelah tahun 2002, mulai tersentak kesadaran bahwa anak-anak lumpuh menonton televisi lebih dari enam jam sehari.. Membuat anak menjadi tidak peduli atau autis terhadap lingkungan. Selain itu juga merenggut ruang bermain, besosialisai anak. Dari tahun 80an kita dikejutkan dengan tradisi menonton yang kuat padahal tradisi baca kita belum kuat. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya budaya baca yang dimiliki masyarakat Indonesia. Di negara maju, seperti Inggris, meskipun deras informasi luas namun masyarakat dapat memilah. Di tahun 50an sudah diciptakan tv public, BBC. Inggris punya tradisi baca dari abad 16. Dengan mempunyai budaya baca yang kuat, ketahanan budaya sudah terjaga karena punya tradisi baca yang kuat. Undang2 tiga 2 tahun 2002, hanya diatur dalam tiga pasal. Sementara di negara maju seperti amerika mempunyai undang-undang yang mengatur khusus tentang keberadaan televisi publik. Dan selalu diandendum sesuai perkembangan zaman.

### **Bagaimana dengan kepemilikan Lembaga Penyiaran Publik ?**

LPP adalah lembaga yang melakukan pelayanan umum (*public services*) Stakeholder adalah semua pihak seperti pemerintah, masyarakat, legislatif, eksekutif dan yudikatif, kaum minoritas dan kaum yang termarginalkan. Tentunya dengan banyaknya stakeholder didalamnya, proporsi pemberitaan harus seimbang dan terukur. LPP harus tetap menayangkan pemberitaan tentang kebijakan pemerintah karena agar public mengetahui dan mendukung jalannya pembangunan. Beda dengan televisi swasta, yang diukur adalah profit oriented, sementara tv publik yang dikedepankan bukan keuntungan tapi adalah nilai-nilai universal, ketahanan budaya. Yang dikejar adalah kualitas program, jadi ada ukuran. Siaran tv publik harus mengukur secara jelas nilai-nilai yang terkandung dalam program acara yang disiarkan. Dalam pemberitaan yang ditampilkan harus diukur pula apakah menyesatkan, berimbang untuk public. Tv public tidak boleh melegitimasi sesuatu di luar kebiasaan dan nilai-nilai moral seperti tayangan banci, homoseksual atau lesbian. Karena akan membuat perilaku imitative bagi anak-anak. Realitas itu akan mengendap di dalam alam bawah sadar anak-anak yang melahirkan sikap permisif dan jadi perilaku biasa yang dapat ditolerir.

### **Bagaimana pola pemberitaan dalam Televisi Publik ?**

Pemberitaan untuk tv publik, *seek the truth and reported*. Di dalam melaporkan kita harus mengetahui garis imajiner yaitu garis kearifan atau wisdom dan tunduk pada verifikasi, terus melakukan cek and ricek. Bagaimapun TVRI adalah berita yang menjadi referentif untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya untuk mendapatkan perspektif yang lurus. TV publik adalah tv alternatif atau pilihan. TV publik biasanya konservatif karena itu yang dijaga. Yang memiliki cara berpikir yang lebih matang untuk mendapatkan informasi biasanya memilih menonton TVRI.

### **Lalu bagaimana dengan arah pemberitaan LPP TVRI dalam menyikapi kebijakan kenaikan BBM dan Konversi Minyak Tanah ke Gas?**

Dalam konteks minyak, TVRI secara institusional cenderung mendukung kebijakan tersebut. Karena dua negara yang ada di dunia yang masih

menggunakan minyak tanah yaitu Indonesia dan Tanzania. 65 triliun akan terselamatkan jika berpindah ke gas. TV publik mendukung kebijakan yang logis. Pertama adalah residu yang meningkatkan panas bumi, dan sumber daya yang tidak tergantikan, sementara gas berlimpah ruah di Indonesia. Logika-logika konversi harus dipahami. Suplai minyak tanah dikurangi.

**Lalu apakah pernah ada dalam sejarah TVRI mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak logis?**

Selama setahun ini belum ada kebijakan yang ditentang Televisi Publik. Namun jikapun ada, maka kita cara mengkritisi pemerintah adalah dengan solusi. Thailand dan Vietnam menggunakan bambu untuk menjadi kertas. TVRI dimasa lalu pernah mengupas hal tersebut, dan hal itu membuat sejumlah industri surat kabar, kertas, menteri perdagangan dan perindustrian marah. Karena dikhawatirkan membuat industri kertas menjadi lesu.

**Apakah dalam mengkritisi pemerintah, ada penghalusan makna yang digunakan dalam pemberitaan TVRI?**

Penghalusan kata atau eufimisme adalah salah karena akan mengaburkan makna. Itu biasanya terkait dengan komitmen idealism redaksional. Tapi yang jelas, harus bebas dari tekanan politik dan sosial, melindungi narasumber, cek and ricek.

Selain komitmen, harus ada editorial policy, yaitu pedoman penyiaran atau pedoman moral dan panduan profesi bagi para *broadcaster*. Karena salah satu dari tujuh dosa wartawan adalah pembunuhan karakter. Intinya yang harus dilindungi adalah kepentingan bangsa, TVRI sebagai satu-satunya lembaga strategis untuk membangsa dan lembaga budaya. Jangan direduksi dengan kepentingan satu golongan.

**Lalu kembali ke persoalan BBM, bagaimana LPP memberitakan isu tersebut?**

Pertama, menampilkan faktual, bahwa BBM naik, lalu diberikan alasan komprehensif seperti alasan kenaikan BBM dan konversi minyak tanah ke gas. Alasan yang dikemukakan adalah 65 triliun rupiah anggaran negara dapat terselamatkan. Tingkat efisiensi dalam rumah tangga jauh lebih besar, secara ekonomis.

**Bagaimana proyeksi pemberitaan TVRI setelah berubah statusnya menjadi LPP?**

TV publik sebagai control pemerintah untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Sebagai tv public harus berani menentang penguasa. Apabila tidak sesuai dan adanya tekanan politik ataupun kepentingan pihak tertentu misalnya kampanye suatu partai yang minta disiarkan secara langsung, kita harus mengargumentasikan dengan kuat. Mengedepankan objektivitas dan mengedepankan kebenaran, agar menjadi referensi dan panduan bagi publik. Sebelum LPP, lebih banyak tekanan yang tidak bisa dilawan. Sekarang setelah menjadi LPP menjadi lebih independen. Dan situasinya juga, pada saat itu pemerintahan juga otoriter. Dengan kata lain, TVRI setelah menjadi LPP bisa menjalankan kebebasan pers.

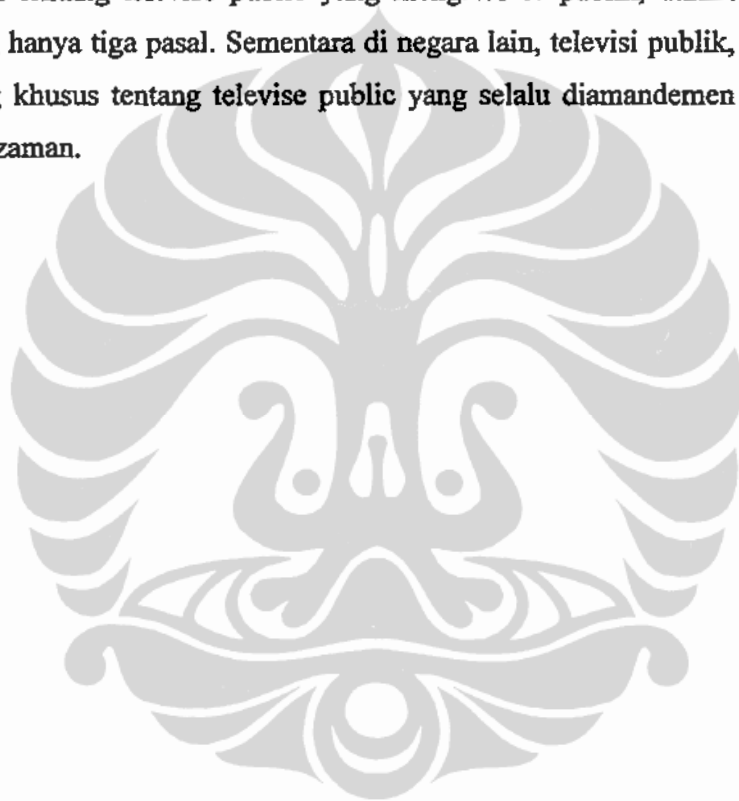
**Sebagai salah satu indicator dalam kebebasan pers, salah satunya adalah penyediaan ruang publik, lalu apakah saat ini LPP TVRI telah menyediakan itu bagi publik?**

Di TVRI saat ini banyak program live yang didalamnya telah melemahkan fungsi editing dan censorship. Dan menguatkan adanya interaksi antara pemirsa, penonton studio dengan para narasumber di studio. Saya rasa ini bentuk ruang publik yang dimiliki TVRI sekarang. Dalam kedepannya kita juga berupaya untuk menyajikan tayangan berita-berita yang akan disespon langsung oleh publik melalui interaksi telepon seperti program Suara Anda yang dimiliki Metro TV.

**Bagaimana harapan kedepan tentang lahirnya TVRI sebagai LPP ?**

Intinya adalah dalam program harus ada yang diserap yaitu berupa nilai, selain itu, kelahiran televisi publik, sebagai alasan untuk mengencounter terpaan tayangan yang menjual sensasionalisme dan lainnya. Inggris sudah ada tv publik sejak tahun 50-an. Ketahanan budaya di negara maju lebih kuat karena tradisi baca yang dimiliki masyarakatnya lebih kuat.

Di Indonesia, regulasi tentang televise public yang mengatur tv publik, dalam Undang-undang yang hanya tiga pasal. Sementara di negara lain, televisi publik, punya undang-undang khusus tentang televise public yang selalu diamandemen sesuai perkembangan zaman.



## Lampiran 2

### Hasil Wawancara dengan mantan Manajer Pemberitaan LPP TVRI, Sukirman

#### **Bagaimana arah pemberitaan atau kebijakan editorial TVRI setelah merubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik ?**

Jawaban saya belum tentu mewakili keinginan LPP TVRI sendiri. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seharusnya TVRI berubah karena perubahan status karena LPP TVRI adalah amanat dari Undang-undang nomor 32 tahun 2002. Kemudian turunlah PP no.11 tahun 2005 nah itulah terbentuknya LPP TVRI. Artinya LPP sudah mengalami berbagai perubahan yang kita sebut metamorphosis dari awalnya adalah Perjan kemudian dibawah Departemen Penerangan, kemudian menjadi Perjan lagi dan selama kali reformasi terjadi tiga kali perubahan kemudian barulah LPP TVRI. Jika dilihat dari perubahan itu, maka tentulah harus terjadi perubahan secara signifikan. Hanya persoalannya, di dalam prakteknya kita sulit untuk membedakan mana ranah untuk tv publik, mana ranah yang sebelumnya. Maka kita hanya berjalan sesuai blue print yang dikeluarkan Dewan Pengawas tetapi itu tidak membahas secara detail. Sementara pemberitaan itu sendiri setiap hari, bahkan setiap jam, menit dan detik mengalami perubahan. Yang kedua, Terkait dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, karena hal itu dinilai sebagai kebijakan yang diperuntukkan untuk kebaikan masyarakat, maka kita berpihak pada perubahan itu. Mengapa kita berpihak pada kebijakan pemerintah? Karena kita menilai ini baik untuk masyarakat Indonesia, baik dalam hitungan tatanan ekonomi artinya gas itu dibandingkan dengan konsumsi minyak tanah itu lebih murah bahkan dalam tatanan kehidupan bernegara di masa mendatang. Mengapa? Karena cadangan gas kita secara teoritis oleh para pakar adalah lebih banyak dibandingkan cadangan minyak. Oleh sebab itu kita mendukung konversi minyak tanah ke gas.



**Banyak masyarakat menilai kebijakan itu tidak populis atau tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Bagaimana LPP TVRI berupaya menyampaikan pemberitaannya?**

Kita meyakini kebijakan masyarakat, inilah tugas kita untuk meyakinkan masyarakat bahwa gas itu memang lebih menguntungkan untuk masyarakat. Dan di kemudian hari . dan ternyata memang terbukti. Dan pada saat bersamaan, kita juga mangakomodir kepentingan masyarakat, misalnya dengan menyampaikan pemnberitaan tentang harapan masyarakat terhadap kualitas tabung gas yang baik agar tidak menimbulkan ledakan.

**Perubahan signifikan seperti apa yang terjadi dalam pemberitaan TVRI setelah menjadi LPP?**

Saat ini TVRI akan merasa tertinggal apabila tidak menyiarkan berita berita yang memiliki news value, kalo dulu tidak merasa tertinggal, kalo tidak menyiarkan news value. Tetapi sekarang ia merasa tertinggal apabila tidak menyiarkan berita yang memiliki news value.

**Itu setelah menjadi LPP atau setelah adanya persaingan swasta?**

Setelah ada persaingan swasta, dan terjadi perubahan signifikan setelah menjadi LPP.

**Setelah menjadi LPP, bagaimana komposisi berita antara pemerintah dengan publik?**

Selagi itu mempunyai news value, itu tetap menjadi porsi yang pertama yang harus disiarkan. Kita tidak terpengaruh pada pemerintah. Walaupun masih ada laporan TVRI tentang kegiatan atau pidato presiden, itu sah sah saja karena televisi swasta juga menyiarkan itu. Komposisi sudah lebih besar publiknya dibandingkan pemerintah.

**Bagaimana LPP TVRI menjaga independensi dan imparsialitasnya terhadap tekanan politik tertentu?**

Pemerintah untuk saat ini di era reformasi, sudah memberikan kebebasan kepada TVRI. Hanya saja TVRI masih menimbang-nimbang ketika misalkan keinginan pemerintah tidak menyimpang dari ranah tv publik itu tetap disiarkan. Tetapi pada dasarnya baik undang-undang maupun PP sudah mengatakan tvri harus independen dan netral. Artinya sudah ada aturan baku secara konstitusional bahwa

kita adalah netral. Nah bagaimana menerjemahkannya di lapangan, nah kita juga artinya tidak mendapatkan tekanan yang sebenarnya di lapangan.

**Sejauh ini tidak ada?**

Sejauh saya menjadi manajer pemberitaan selama dua tahun tiga bulan, tidak pernah merasakan tekanan. Bahwa ada misalkan ini ada laporan khusus, tapi dalam hemat saya masih dalam porsi yang wajar. Karena pemerintah kan juga jarang bersuara di media Tvri. Beda dengan dulu, televisi dijadikan corong pemerintah.

**Sebagai wujud dari kebebasan pers, perlu disediakan apa yang disebut ruang public atau *public sphere*. Bagaimana Bapak melihat TVRI sekarang? Apakah telah cukup menyediakan ruang public?**

Kalau pendapat saya pribadi, bukan ketika saya menjadi manajer berita. TVRI sudah berupaya menyediakan ruang public walaupun menurut kaca mata saya pribadi, ruang public itu perlu ditambah. Yang patut harus kita appreciate adalah bahwa TVRI berupaya menyediakan ruang public itu lebih besar. Walaupun kenyataannya, ruang public ini harus ditambah. Hanya sekarang persoalannya adalah bagaimana menterjemahkan ruang public itu di layar. Kan kalo kita lihat di layar, hiburan di televise adalah music, sinetron, film dan ada informasi yang saat ini diwakili oleh pemberitaan, dan ada pula tayangan edukasi atau tayangan yang jelas mendidik. Tetapi dalam ketiga indicator ini juga tidak terpisahkan. Artinya bagaimana kita menyediakan informasi yang mengandung hiburan. Inilah yang dinamakan dalam pertelevisian merupakan package. Menterjemahkan package ini ada perbedaan antara TVRI dengan televisi swasta lainnya. Misalkan ketika artis tampil di televisi swasta boleh menggunakan pakaian yang berbau seronok, tetapi ketika di TVRI kita anjurkan untuk tidak seronok. Inilah bagian dari package. Demikian juga dengan halnya berita. Jika masih bisa dimengerti khalayak dengan tidak menyiarkan sesuatu yang bombastis, kemudian juga kita tidak menyiarkan berita yang misalkan walaupun mungkin secara.. TV public itu menurut saya bukan berarti harus mengikuti keinginan public. Jika mengikuti keinginan public yang real, berarti kita mengikuti selera pasar. Selera pasar misalkan infotainment itu banyak ratingnya. Jika ratingnya tinggi, berarti public banyak yang menonton

kan? Termasuk pada pemberitaan yang berbau klenik atau kriminal tingkat tinggi tidak pantas kita tayangkan.

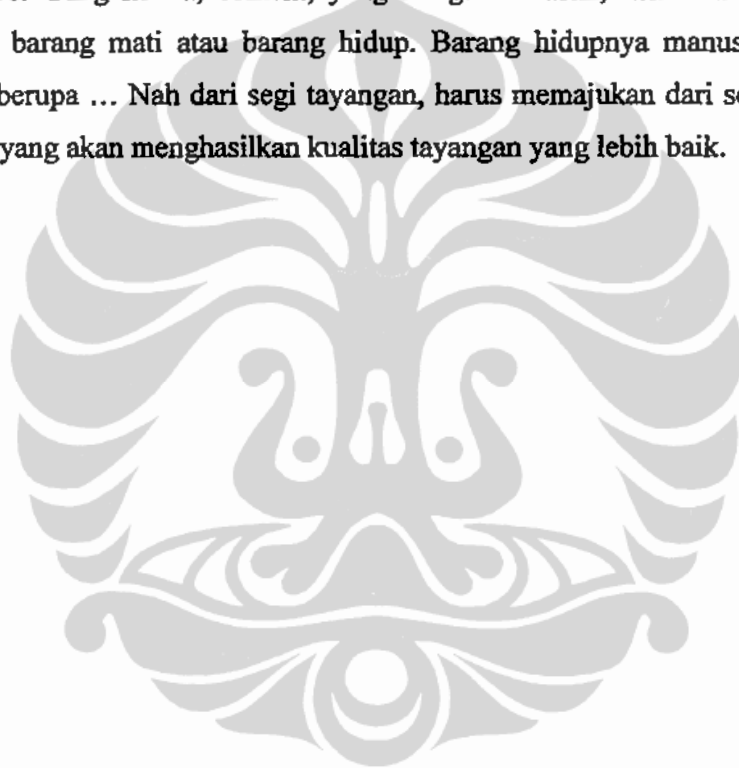
**Bagaimana TVRI memberitakan suatu berita yang dapat bersaing dengan televisi swasta lainnya?**

Dari segi berita yang mempunyai news value. Situ Gintung kita siarkan. Misalnya eksekusi Amrozi cs, ini merupakan berita yang menarik sejumlah masyarakat Indonesia bahkan masyarakat Internasional, dan ini tidak ada kaitannya dengan tekanan berita. Tetapi berita yang tidak memiliki news value dari masyarakat yang bersifat remeh temeh tidak kita tayangkan. Kita tidak mempunyai berita criminal, kita juga tidak mempunyai infotainment. Oleh karenanya jika menginginkan pemberitaan tentang Manohara, maka silahkan melihat di televise swasta tidak di TVRI. Tetapi bagaimana TVRI menyiarkan berita itu? TVRI boleh saja menyiarkan itu, katakanlah kurangpedulian terhadap kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena itu merupakan domain public. Tetapi bukan merupakan kasus kegenitan tertentu. Artinya jika TVRI tetap ingin menayangkan pemberitaan ini tentunya berdasarkan angle tertentu. Menurut kaca mata saya dalam angle yang lain Misalkan dari Manohara bisa saja kita ambil dari angle bagaimana kekerasan dalam rumah tangga, bahwa pejabat negeri Indonesia termasuk Kedutaan Malaysia menyikapi kasus ini. Yang mungkin di banyak terjadi yang mungkin saja diwakili oleh orang seperti Manohara. Kita tidak menayangkan perceraianya karena belum tentu kebenarannya.

**Perbaikan TVRI?**

Yang pertama artinya pimpinan TVRI harus mendesain ulang dalam artian mendesain yang betul betul dapat diterjemahkan apa yang menjadi domain public itu. Misalkan hiburan yang mempunyai kualitas tetapi tidak menyimpang menjadi tuntutan public. Perlu digarisbawahi, Televisi public tidak bersaing dengan televisi swasta dalam hal rating. Tetapi dalam hal lain dia bersaing. Secara kelembagaan, TVRI tidak bersaing dengan televise swasta. Tetapi dalam segmen berita atau program, TVRI harus bersaing dengan televise swasta. Ketika seorang reporter TVRI berada dalam satu tempat kejadian, dan di tempat tersebut terdapat

beberapa televisi swasta lainnya. Maka ketika itu TVRI tengah berada dalam ranah persaingan bagi... Bagaimana menterjemahkan. TVRI tidak mempunyai kriminal, meskipun mempunyai nilai yang tinggi. TVRI tidak boleh menayangkan sinetron yang isinya misalkan isu kawin lagi, materialistis, dan hedonis. Secara institusional tidak bersaing tetapi dalam segemn yang lebih khusus yakni ranah pemberitaan harus dapat bersaing dengan televisi lain. Contohnya televisi swasta live situ gantung, TVRI juga live.. Apa unsure persaingannya? Yakni, cepat dan siapa yang bisa live. Yang kedua, content, yang ketiga kemasan, kemasannya menyangkut siapa, barang mati atau barang hidup. Barang hidupnya manusia, barang mati dapat berupa ... Nah dari segi tayangan, harus memajukan dari segi manusianya (SDM yang akan menghasilkan kualitas tayangan yang lebih baik.



### Lampiran 3

#### Hasil Wawancara Fera Belinda, Reporter TVRI

##### **Bagaimana LPP TVRI menempatkan posisinya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah?**

Sebagai reporter TVRI, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, itu pasti pemberitaan kita harus mendukung pemerintah, namun kita juga sebagai media kita juga harus dapat menempatkan diri kita untuk mengkoreksi apakah kebijakan yang dijalankan pemerintah tersebut sudah berjalan sesuai aturannya atau tidak. Nah, hal itulah yang akan menjadi tugas kita, agar pemerintah dapat memperbaiki kebijakan yang mereka ambil demi kepentingan rakyat.

##### **Lalu bagaimana LPP TVRI menilai apakah kebijakan itu tepat untuk rakyat atau tidak?**

Yang jelas kita sebagai media harus dapat melihat ke berbagai arah, dan yang tentu yang paling penting adalah apakah kebijakan tersebut membawa kemaslahatan dan kebaikan terhadap masyarakat atau tidak. Jika memang itu lebih banyak membawa kebaikan untuk rakyat, maka itu tepat untuk kepentingan rakyat. Namun jika hal itu sebaliknya, malah membawa hal yang tidak baik nah berarti kebijakan tersebut tidak tepat untuk rakyat. Karena tentunya kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat memberikan pendidikan bagi rakyat itu sendiri karena membawa kebaikan di kemudian hari.

##### **Terkait dengan kenaikan BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, bagaimana reporter menempatkan dirinya?**

Hal itu kan pada kala itu, memang pemerintah dalam posisi yang sulit karena dihadapkan pada harga BBM di dunia meningkat tajam. Kita mengalami defisit anggaran sendiri. Dan pemerintah harus mengambil kebijakan salah satunya adalah konversi minyak tanah ke gas karena saat ini hanya Indonesia dan Nigeria yang menggunakan minyak tanah. Sementara produksi minyak tanah adalah yang paling mahal. Sehingga untuk mengurangi defisit, maka pemerintah harus mengambil kebijakan gas karena dinilai lebih praktis dan jauh lebih murah dan anggaran yang digunakan untuk memberikan subsidi terhadap minyak tanah itu

sendiri dapat digunakan untuk mensubsidi hal lain yang tentunya untuk kepentingan rakyat sendiri.

**Terkait dengan kebijakan itu, bagaimana reporter LPP TVRI menempatkan posisinya di tengah anggapan bahwa di satu sisi itu adalah kebijakan yang logis dan rasional, tapi di sisi lain LPP juga harus mengakomodir kepentingan rakyat?**

Sebagai media harus menjadi mediator antara pemerintah dan rakyat. Sebagai media juga mengerti bahwa kepentingan pemerintah tersebut adalah rasional dan logis demi kepentingan dan kemajuan rakyat di masa depan. Namun rakyat pun tidak serta merta menerima begitu saja. Sebagai media tentu harus memberikan pelajaran yang terbaik bagi rakyat. Ya mungkin tidak bisa secara langsung, karena harus pelan-pelan memberikan pengertian bahwa apa yang kita beritakan akan menjadi pendidikan bagi rakyat itu sendiri.

**Dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat gimana? Karena tentunya tidak dapat frontal kan sebagaimana LPP karena masih disusidi pemerintah?**

Kita sebagai media haruslah melakukan cek and balance sebelum melakukan kritik terhadap pemerintah dan kritik tidak dilakukan secara frontal seperti media-media swasta lainnya.. kita harus dengan bahasa yang elegan dan kita juga harus memberikan bukti bukti yang kuat terhadap apa keluhan dari masyarakat sendiri.. apakah benar jadi kita harus melakukan cover both side, keputusan yang diambil pemerintah seperti apa? Dan keinginan dari masyarakat seperti apa? Dan mungkin sebagai LPP kita tidak boleh memberikan kata kata yang terlalu keras, mungkin berupa anjuran.

Menurut pengalaman Fera sendiri bagaimana, apakah ada kebijakan redaksional tertentu dalam penggunaan bahasa? Apakah ada standar-standar tertentu?

Oya pasti, lugas dan dimengerti oleh orang awam. Dan juga kata-katanya tidak menyinggung dan memojokkan.. karena kalo menyinggung, kita sebagai tv pemerintah, siapa yang akan mengakomodir kebijakan pemerintah itu sendiri. Oleh karenanya kita harus mengkritik dan walopun sebagai tv pemerintah kita juga tidak dengan serta merta mendukung pemerintah, kalo itu tidak baik untuk rakyat, kita juga harus mengkritiknya.

**Pernah ga ada suatu kebijakan pemerintah yang Fera piker itu tidak tepat untuk rakyat? Dan bagaimana cara mengkritiknya?**

Sejauh saya menjadi reporter di TVRI, salah satu kebijakan pemerintah yang menurut saya kurang baik adalah penyaluran BLT sendiri. Menurut saya, uang BLT itu hanya dinikmati sesaat saja, satu dua hari habis. Kalo menurut saya itu lebih baik pemerintah memfokuskan dana BLT tersebut untuk lebih disalurkan kepada pendidikan dan kesehatan. Karena selama ini kan masyarakat selalu berteriak bahwa pendidikan itu biayanya mahal. Dan besar. Kesehatan juga.. Kesehatan juga sangat penting bagi kita kan? Jadi tidak ada lagi rakyat kecil yang berteriak, waduh anak saya tidak bisa sekolah, anak saya sakit tidak ada biaya untuk merawat. Walaupun BLT itu dalam penyalurannya tidak merata, karena banyak terdapat penyelewengan-penyelewengan.

**Tapi kan kebijakan itu diambil sebagai dampak dan antisipasi dalam menyikapi kenaikan BBM kan?**

Tapi kan percuma saja jika kebijakan BLT itu diambil tetapi pendidikan mereka tiak dapat dijangkau, kesehatan tidak terpenuhi, dan kebutuhan pokok semakin melambung tinggi. Lebih baik difokuskan pada tiga hal itu saja, pendidikan, kesehatan, dan bahan pokok dikontrol harganya agar tidak semakin meningkat.

**Seperti kita tahu, TVRI di masa lalu hanya menjadi media yang menyampaikan kebijakan pemerintah secara satu arah (*one way*), namun seiring perjalannya pada tahun 2006 TVRI telah berubah menjadi LPP. Nah, semenjak perubahan itu, pa yang Fera rasakan sebagai reporter?**

Kalo semenjak TVRRI menjadi LPP tentunya terdapat perubahan. Sebagai media kita mulai memberikan kritikan dan saran kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tidak hanya kita Cuma mengakomodir kebijakan pemerintah tersebut tanpa kita mengkoreksi apakah kebijakan yang diambil pemetintah itu sudah tepat atau tidak. Itu kan demi kepentingan rakyat. Nah kalo kita tidak mengontrol, kan pemerintah tidak tahu apakah kebijakan itu sudah benar atau tidak.

**Tetapi dalam arah pemberitaan, setelah menjadi LPP apakah TVRI lebih bebas bersuara atau tidak?**

Klo dibilang lebih bebas bersuara ya tidak, tetapi ada sedikit keterbukaan terhadap rakyat sendiri, terhadap pemberitaan. Kalo itu memang kurang baik kebijakan

yang diambil pemerintah otomatis kita akan memberitakan keinginan dari rakyat seperti apa sih, atas kebijakan pemerintah yg diambil.

**Bagaimana upaya reporter TVRI dalam menjaga keberimbangan berita dan independensinya terhadap tekanan tekanan politik?**

Kalau dunia politik itu pasti sangat dinamis dan semuanya pasti berujung pada kebesaran nama dan kepentingan masing-masing ya. Nah kita sebagai reporter kita harusnya ini juga dilakukan oleh semua reporter tidak hanya reporter LPP saja ya. Yang jelas kalo dunia politik itu sering menghancurkan hubungan baik dalam segala hal. Yang jelas apapun yang kita beritakan dalam politik itu tidak memicu perpecahan, disintegrasi bangsa maupun konflik diantara sesama.

**Kalo jaman dulu kan ada pesanan dari partai politik mana gitu, kalo sekarang bagaimana?**

Hal hal itu seperti sekarang mungkin masih ada. Tapi di masa kampanye kemarin, kita juga harus memberitakan partai-partai politik lain meskipun mereka tidak menjanjikan sesuatu hal apapun terhadap kita. Kita harus netral duduk berada di tengah-tengah sebagai media, meskipun mrk tidak member,an sesuatu apapun terhadap kita.

**Menurut Fera sebagai reporter, bagaimana proyeksi kedepan LPP TVRI? Apa perbaikan yang harus dilakukan LPP untuk menjadi media yang tetap menjadi referensi public?**

Yang jelas, isinya tentu pemberitaan dan informasinya adalah untuk demi kepentingan rakyat sendiri. Seperti kesehatan, pendidikan dan politik yang memberikan pendidikan bagi rakyat, bukan yang memicu perpecahan konflik atau disintegrasi bangsa ya. Namun sebaiknya, di masa yang modernisasi ini, LPP TVRI juga tidak boleh meninggalkan masa seperti itu, mereka juga harus mengembangkan kreativitas untuk mengemas berita itu lebih baik dan tampilan di layar itu juga lebih baik agar lebih menarik ditonton oleh pemirsa. Jika hal ini tidak dilakukan rasanya masyarakat akan bosan, tampilannya begitu-begitu saja meskipun pemberitaan kita jauh lebih baik daripada yang dulu.



## Lampiran 4

Contoh Naskah Berita LPP TVRI tentang Kebijakan Kenaikan BBM :



PARIPURNA DPR SAH-KAN HAK  
ANGKET

PROD : HARISMEN CS

24 JUNI 2008

FERA/MURDOK

PENYIAR.....

BETACAM START.....

SI: **JAKARTA, 24 JUNI'08**  
SIDANG PARIPURNA  
DPR SAH-  
KAN HAK ANGKET

**YUDDI CHRISNANDI**  
ANGGOTA FRAKSI  
GOLKAR

**LUKMAN HAKIM**  
SAIFUDDIN

SIDANG PARIPURNA DPR-RI SORE TADI AKHIR-NYA MENGESAHKAN PENGGUNAAN HAK ANGKET DAN MENOLAK HAK INTERPELASI ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA B=B=M 24 MEI LALU.///

===== **VOICE OVER** =====

SETELAH MELALUI LOBI ANTAR PIMPINAN FRAKSI DAN PIMPINAN DPR, SIDANG PARIPURNA DPR-RI SORE TADI AKHIR-NYA MEMUTUSKAN PENGGUNAAN VOTING UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN USULAN PENGGUNAAN HAK ANGKET DAN HAK INTERPELASI ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA B=B=M 24 MEI LALU.// DARI HASIL VOTING TERHADAP TIGA RATUS 60 ANGGOTA DPR-RI YANG HADIR, RAPAT PARIPURNA AKHIR-NYA MEMUTUSKAN PENGGUNAAN HAK ANGKET DAN MENOLAK HAK INTERPELASI.// SATU HAL YANG MENGEJUTKAN TERJADI SAAT PENGAMBILAN VOTING, YUDHI CHRISNANDI MERUPAKAN SATU-SATUNYA ANGGOTA FRAKSI GOLKAR YANG SETUJU PENGGUNAAN HAK ANGKET.// SEDANGKAN FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN, FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA DAN FRAKSI DAMAI SEJAHTERA YANG SEMULA MENOLAK PENGGUNAAN HAK ANGKET AKHIR-NYA MENYETUJUI PENGGUNAAN HAK ANGKET.///

..... **SOUND BITE** .....

..... **SOUND BITE** .....

HAK ANGKET DISETUJUI OLEH DUA RATUS 33 ANGGOTA DPR

<b>KETUA FRAKSI PPP</b>	DARI 10 FRAKSI YANG HADIR PADA SIDANG PARIPURNA.// FRAKSI GOLKAR DAN FRAKSI DEMOKRAT MERUPAKAN DUA FRAKSI YANG MENOLAK PENGGUNAAN HAK ANGKET DAN MENYETUJUI PENGGUNAAN HAK INTERPELASI.// SEDANGKAN DELAPAN FRAKSI LAI-NYA MENYETUJUI PENGGUNAAN HAK ANGKET DAN MENOLAK HAK INTERPELASI.///
-------------------------	---





PARIPURNA DPR SAH-KAN HAK  
ANGKET

PROD : RINI P CS

25 JUNI 2008

FERA/MURDOK

PENYIAR.....

KEPUTUSAN PENGGUNAAN HAK ANGKET ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA B=BM DICAPAI MELALUI MEKANISME VOTING TERHADAP TIGA RATUS 60 ANGGOTA DPR-RI DARI 10 FRAKSI YANG HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA DI GEDUNG DPR-JAKARTA SELASA KEMARIN.// DPR AKAN SEGERA MEMBENTUK PANITIA KHUSUS GUNA MENYELIDIKI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERSEBUT.//

===== VOICE OVER  
=====

BETACAM START.....

PERSETUJUAN PENGGUNAAN HAK ANGKET DILUAR DUGAAN KARENA AWAL-NYA KEKUATAN FRAKSI PENDUKUNG DAN PENENTANG BERIMBANG.// KETUA DPR - AGUNG LAKSONO LANGSUNG MENYATAKAN RAPAT DISKORS DAN MEMINTA DIADAKAN LOBI ANTAR PIMPINAN FRAKSI.// LOBI ANTAR PIMPINAN FRAKSI AKHIR-NYA MENYETUJUI KEPUTUSAN DIAMBIL MELALUI MEKANISME VOTING.// DARI TIGA RATUS 60 ANGGOTA DPR YANG HADIR, DUA RATUS 33 ANGGOTA MENDUKUNG PENGGUNAAN HAK ANGKET DAN SERATUS 27 ANGGOTA MENOLAK.// ATAS DISAHKAN-NYA PENGGUNAAN HAK ANGKET DALAM RAPAT PARIPURNA, DPR AKAN SEGERA MEMBENTUK PANITIA KHUSUS GUNA MENYELIDIKI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM 24 MEI LALU.//

**SI: JAKARTA, 24 JUNI'08**  
**SIDANG PARIPURNA DPR**  
**SAH-**  
**KAN HAK ANGKET**

**AGUNG LAKSONO**  
**KETUA DPR-RI**

..... SOUND BITE  
.....

SEMUA ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PARTAI GOLKAR MENOLAK USULAN PENGGUNAAN HAK ANGKET DAN MENYETUJUI HAK INTERPELASI.// YUDHI CHRISNANDI MERUPAKAN SATU SATU-NYA ANGGOTA

	FRAKSI PARTAI GOLKAR YANG MENYETUJUI PENGGUNAAN HAK ANGKET.///
<p><b>PENYIAR.....</b></p> <p><b>BETACAM</b></p> <p><b>START.....</b></p> <p><b>S.I.: JAKARTA 7 MEI 2008</b></p> <p><b>MASALAH PRO KONTRA</b></p> <p><b>KENAIKAN BBM</b></p> <p><b>YUNUS</b></p> <p><b>MASYARAKAT</b></p> <p><b>ROHMAN</b></p> <p><b>MASYARAKAT</b></p> <p><b>AHMAD</b></p> <p><b>MASYARAKAT</b></p>	<p>RENCANA PEMERINTAH MENAIKKAH HARGA B-B-M DALAM WAKTU DEKAT MENIMBULKAN SEJUMLAH POLEMIC DI KALANGAN MASYARAKAT.// MASYARAKAT PADA UMUMNYA KEBERATAN TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM, NAMUN MEREKA DAPAT MENERIMA KEBDAKAN YANG AKAN SEGERA DIREALISASIKAN PEMERINTAH TERSEBUT.//</p> <p>.....VOICE</p> <p>OVER.....</p> <p>PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO AWAL PEKAN INI MEMASTIKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK B-B-M AKAN SEGERA DILAKUKAN.// NAMUN PRESIDEN BELUM MENYEBUTKAN SECARA PASTI WAKTU PENERAPAN KEBIJAKAN UNTUK MENAIKKAN HARGA BBM INI.// KENAIKAN HARGA BBM MERUPAKAN DAMPAK TERUS NAIKNYA HARGA MINYAK DUNIA YANG SAAT INI HAMPIR MENCAPAI 120 DOLAR AMERIKA PER BAREL.// AKIBATNYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DIKHWATIRKAN AKAN MEMBENGKAK KARENA TIDAK SANGGUP MENANGGUNG SUBSIDI BBM YANG DAPAT MELONJAK MENCAPAI 200 TRILYUN RUPIAH.// RENCANA PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM, DITANGGAPI MASYARAKAT SECARA BERAGAM.// ADA MASYARAKAT YANG MENYETUJUI RENCANA PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM NAMUN TIDAK SEDIKIT JUGA MASYARAKAT YANG MENOLAK.//</p> <p>.....SOUND</p> <p>UP.....</p> <p>.....SOUND</p> <p>UP.....</p> <p>.....SOUND</p> <p>UP.....</p> <p>PANTAUAN TIM LIPUTAN TVRI DI BEBERAPA SPBU DI</p>

<p><b>SUKIJEM</b> <b>MASYARAKAT</b> <b>DARSONO</b> <b>MASYARAKAT</b> <b>SULANDARI</b> <b>MASYARAKAT</b></p>	<p>JAKARTA, BANYAK KENDARAAN YANG DIKATEGORIKAN MOBIL MEWAH NAMUN MASIH MENGGUNAKAN BBM BERSUBSIDI YAITU JENIS PREMIUM.// PADAHAL SEHARUSNYA BBM JENIS PREMIUM HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI KALANGAN MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH.// SELAIN PREMIUM DAN SOLAR, PEMERINTAH JUGA BERENCANA MENAIKKAN HARGA MINYAK TANAH MENJADI 2 RIBU 5 RATUS RUPIAH PER LITER DARI 2 RIBU RUPIAH PER LITER.// MESKI DEMIKIAN PEMERINTAH AKAN MEMBERIKAN KOMPENSASI KENAIKAN BBM INI KEPADA SETIAP KELUARGA BERUPA BANTUAN LANGSUNG TUNAI -BLT- PLUS YAITU PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBESAR 100 RIBU DITAMBAH BANTUAN PANGAN TERDIRI ATAS MINYAK GORENG DAN GULA.// ADANYA KEBIJAKAN BLT PLUS DITANGGAPI PESIMIS OLEH MASYARAKAT KARENA SEBELUMNYA PEMERINTAH PERNAH MELAKUKAN HAL SERUPA TIGA TAHUN LALU, NAMUN BELUM CUKUP EFEKTIF MENANGANI MASALAH PEREKONOMIAN MEREKA.// MESKI DEMIKIAN MASYARAKAT MASIH MENARUH HARAPAN DENGAN AKAN DITERAPKANNYA PROGRAM BLT PLUS INI.//</p> <p>.....SOUND</p> <p>UP.....</p> <p>.....SOUND</p> <p>UP.....</p> <p>.....SOUND</p> <p>UP.....</p>
<p><b>ALVIN LIE, M.SC</b> <b>ANGGOTA KOMISI VII FPAN</b></p>	<p>SEMENARA ITU ANGGOTA KOMISI TUJUH DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL ALVIN LIE MENJELASKAN PEMERINTAH HENDAKNYA MELAKUKAN PENGHEMATAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENGURANGI DAMPAK KENAIKAN BBM.//</p> <p>.....SOUND</p> <p>UP.....</p> <p>PEMERINTAH TELAH MENYIAPKAN TIGA SKENARIO</p>

KENAIKAN HARGA BBM YAKNI 20 PERSEN, 25 PERSEN DAN MAKSIMAL 30 PERSEN.// DENGAN KENAIKAN HARGA BBM RATA-RATA 30 PERSEN, PEMERINTAH DAPAT MENGURANGI TEKANAN BEBAN SUBSIDI SAMPAI SEBESAR 35 TRILYUN RUPIAH.//

Lampiran 5

Contoh Naskah Berita LPP TVRI tentang Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas



**MINYAK TANAH MASIH LANGKA**

15 APRIL 2008

**PROD: TJAHYONO ADI CS**

**FERA/HARIS**

**PENYIAR.....**

RATUSAN WARGA MEMADATI SALAH SATU PANGKALAN MINYAK TANAH DI KELURAHAN PASAR MANGGIS KECAMATAN SETIABUDI JAKARTA SELATAN.// SEBAGIAN WARGA DIANTARANYA BAHKAN RELA ANTRI SEJAK SUBUH DEMI MENDAPATKAN LIMA LITER MINYAK TANAH DENGAN HARGA DUA RIBU 600 RUPIAH PER-LITER.//

**BETACAM START.....**

===== **VOICE OVER** =====

HINGGA SAAT INI KELANGKAAN MINYAK TANAH MASIH SERING TERJADI HAMPIR DI SELURUH WILAYAH, TAK TERKECUALI DI KOTA JAKARTA.// SEPERTI YANG TERJADI DI SALAH SATU PANGKALAN MINYAK TANAH DI DAERAH SETIABUDI – JAKARTA SELATAN.// RATUSAN WARGA SEJAK PAGI BAHKAN SUBUH HARUS RELA ANTRI DEMI MENDAPATKAN MINYAK TANAH.// MENURUT WARGA,

**SI: JAKARTA, 15 APRIL '08**

**MINYAK TANAH MASIH LANGKA**

Universitas Indonesia

<p><b>SI: <u>FADILAH</u></b> <b>WARGA</b></p>	<p>ANTRIAN SEPERTI INI SELALU TERJADI SETIAP PASOKAN MINYAK TANAH DATANG KE PANGKALAN TERSEBUT.// DAN, SETIAP ORANG HANYA DIJINKAN MEMBELI SEBANYAK LIMA LITER MINYAK TANAH DENGAN HARGA DUA RIBU 600 RUPIAH PER-LITER.//</p> <p>..... <b>SOUND BITE</b> .....</p>
<p><b>SI: <u>MIMIN</u></b> <b>WARGA</b></p>	<p>..... <b>SOUND BITE</b> .....</p> <p>MENURUT PEMILIK PANGKALAN MINYAK TANAH – AUDI, SEBELUM PEMERINTAH MELAKUKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS, PANGKALAN MILIK-NYA MENDAPATKAN PASOKAN MINYAK TANAH SEBANYAK 12 KALI SETIAP BULAN MASING-MASING SEBANYAK 5 RIBU LITER.// NAMUN, SAAT INI PANGKALAN MINYAK TANAH MILIK-NYA HANYA MENDAPATKAN DUA KALI PASOKAN SETIAP BULAN DAN WAKTUNYA PUN TIDAK DAPAT DITENTUKAN.///</p> <p>..... <b>SOUND BITE</b> .....</p>
<p><b>SI: <u>AUDI</u></b> <b>AGEN PANGKALAN MI-TAN</b></p>	<p>PARA WARGA MENAMBAHKAN MEREKA RELA ANTRI BERJAM-JAM KARENA JIKA MEREKA MEMBELI MINYAK TANAH DITINGKAT PENGECEK HARGA-NYA MENCAPAI 6 RIBU 500 RUPIAH HINGGA 7 RIBU RUPIAH PER-LITER.///</p>

**TUBAGUS HARYONO**  
**KEPALA BPH MIGAS**

DARI PENYALAHGUNAAN MINYAK TANAH OLEH SEBAGIAN  
OKNUM YANG BERKEPENTINGAN.///

.....SU.....

TUBAGUS MENAMBAHKAN/ UNTUK MENGATASI  
KELANGKAAN MINYAK TANAH/ BPH MIGAS BEKERJASAMA  
DENGAN PERTAMINA AKAN SEGERA MELAKUKAN  
DISPARITAS HARGA DAN MENYALURKAN DISTRIBUSI  
MINYAK TANAH SECARA MERATA KE BERBAGAI DAERAH  
DI INDONESIA.///

NOVI NURRANI / KIKI ROZAKHI MELAPORKAN.///






**BRANAS**

HARGA SEMBAKO PASCA  
KENAIKAN BBM

PROD : PRAMONO CS

<b>PENYIAR</b> .....	PEMIRSA, MESKIPUN HARGA BBM NAIK SEKITAR 28 PERSEN, HARGA BEBERAPA KEBUTUHAN POKOK DI SEJUMLAH PASAR TRADISIONAL DI JAKARTA JUGA MENGALAMI KENAIKAN NAMUN TIDAK SEBESAR KENAIKAN HARGA BBM.////
<b>BETACAM START</b> .....	<p style="text-align: center;">..... <b>VOICE OVER</b> .....</p> PASCA KENAIKAN HARGA BBM, HARGA BAHAN KEBUTUHAN POKOK DI SEJUMLAH PASAR TRADISIONAL DI JAKARTA MEMANG MELAKUAKN PENYESUAIAN, MESKIPUN TIDAK SEBESAR KENAIKAN HARGA BBM./// PENYESUAIAN HARGA INI BAHKAN SUDAH TERJADI SEMINGGU SEBELUMNYA.// DI PASAR KEBAYORAN LAMA – JAKARTA SELATAN DAN PASAR BENDUNGAN HILIR – JAKARTA PUSAT.// KENAIKAN HARGA BAHAN KEBUTUHAN POKOK BERKISAR TIGA HINGGA LIMA PERSEN.// HARGA MINYAK GORENG CURAH NAIK DARI 11 RIBU MENJADI 11.500 RUPIAH PER-KILOGRAM.// BERAS KWALITAS SATU MENJADI 5 RIBU DARI YANG SEBELUM-NYA 4.500 RUPIAH PER-KILOGRAM.// SEDANGKAN TEPUNG SAGU MENGALAMI KENAIKAN YANG CUKUP TINGGI DARI 4.500 MENJADI 5.500 RUPIAH PER-KILOGRAM.//
<b>SI : JAKARTA, 24 MEI'08</b> <b>HARGA SEMBAKO</b> <b>MENGALAMI</b> <b>PENYESUAIAN</b>	<p style="text-align: center;">..... <b>SOUND BITE</b> .....</p> KONDISI SERUPA JUGA DIRASAKAN PARA KONSUMEN.// SEPERTI YANG DIALAMI SRI MULYANI, SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA, IA HARUS PANDAI MENGATUR KEUANGAN AGAR KEBUTUHAN TETAP TERPENUHI.///
<b>SI : JOKO</b> <b>PEDAGANG</b>	<p style="text-align: center;">..... <b>SOUND BITE</b> .....</p> SELAIN BAHAN KEBUTUHAN POKOK, HARGA SAYUR MAYUR DAN AYAM POTONG JUGA MENGALAMI KENAIKAN YANG SIGNIFIKAN./// CABAI MERAH YANG SEBELUMNYA DIJUAL 14
<b>SI : SRI MULYANI</b> <b>PEMBELI</b>	

	RIBU MENJADI 20 RIBU RUPIAH PER-KILOGRAM.// KENTANG DARI TIGA RIBU 500 MENJADI LIMA RIBU RUPIAH PER-KILOGRAM.// SEDANGKAN AYAM POTONG NAIK DARI 19 RIBU MENJADI 22 RIBU RUPIAH PER-KILOGRAM.// DARI BEBERAPA KEBUTUHAN POKOK, HANYA HARGA TELUR AYAM RAS YANG MENGALAMI PENURUNAN DARI 12 RIBU 500 MENJADI 12 RIBU RUPIAH PER-KILOGRAM.///
--	--



PENYIAR,.....

RENCANA KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (B-B-M) YANG MULAI DIBERLAKUKAN AKHIR MEI INI TIDAK HANYA BERDAMPAK PADA SEJUMLAH ASPEK NEGARA/ JUGA RAKYAT KECIL KHUSUSNYA PARA PEDAGANG MAKANAN.//

.....VO.....

BETACAM

START.....

**SI : JAKARTA, 11 MEI**

**2008**

**DAMPAK KENAIKAN**

**BBM BAGI**

**MASYARAKAT**

KEBIJAKAN MENAIKKAN HARGA BBM DISEBABKAN PENGURANGAN SUBSIDI BBM DARI PEMERINTAH.// SUBSIDI BBM YANG MENCAPAI SEKITAR 260 TRILIUN RUPIAH DIAMBIL DARI APBN.// UNTUK MENYELAMATKAN ANGGARAN NEGARA/ PEMERINTAH BERENCANA MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERMASUK MINYAK TANAH YANG DIBERLAKUKAN AKHIR BULAN INI.// BAGI SEBAGIAN MASYARAKAT KHUSUSNYA PARA PEDAGANG MAKANAN/ KEBIJAKAN INI DIRASAKAN MEMBEBANI MEREKA DI TENGAH MELONJAKNYA HARGA SEJUMLAH BAHAN POKOK.// HAL INI MENYEBABKAN BANYAKNYA WARUNG MAKAN YANG TIDAK MEMBUKA WARUNGNYA KARENA SEPI PEMBELI.//

.....SU.....

**( 04 : 26 : 33 – 04 : 26 : 42 )**

.....SU.....

**( 04 : 29 : 30 – 04 : 29 : 43 )**

**INA**  
**PEMILIK WARTEG**

.....SU.....

**TUMIYO**  
**PEDAGANG MAKANAN**

**( 04 : 31: 11 – 04 : 31 : 22 )**

**TINA**  
**PEMILIK WARTEG**

MASYARAKAT BERHARAP PEMERINTAH DAPAT MENINJAU KEMBALI KEBIJAKAN MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK AGAR TIDAK MEMBEBANI PEREKONOMIAN MEREKA.// BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) YANG RENCANANYA AKAN DIBERLAKUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN MENJADI TUMPUAN HARAPAN BAGI MEREKA.//  
NOVI NURRANI / YOSEPH NOVRIANSYAH MELAPORKAN.//



**MINYAK TANAH & LPG LANGKA**

**4 APRIL 2008**

**PROD: TJAHYONO ADI CS**

**FERA/MURDOK**

<b>PENYIAR.....</b>	<p>KELANGKAAN MINYAK TANAH DIRASAKAN MAKIN MEMBERATKAN MASYARAKAT.// SEMENTARA, GAS ELPIJI JUGA MAKIN SULIT DIDAPAT.///</p>
<b>BETACAM START.....</b>	<p>===== <b>VOICE</b> <b>OVER</b> =====</p>
<p><b>SI: JAKARTA, 4 APRIL 2008</b> <b>MINYAK TANAH &amp; LPG LANGKA</b></p>	<p>KEBIJAKAN PEMERINTAH MELAKUKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS DINILAI PARA WARGA SANGAT TERBURU-BURU DAN TIDAK SIAP.// TERBUKTI, SAAT INI MINYAK TANAH MENJADI BARANG LANGKA DAN MAHAL.// SEDANGKAN, GAS ELPIJI SEBAGAI PENGGANTI MINYAK TANAH, SAAT INI JUGA SULIT DIDAPAT DAN HARGA-NYA KIAN MELAMBUNG.// SEPERTI YANG TERJADI DI SEBUAH PANGKALAN MINYAK TANAH DAN GAS ELPIJI DI DAERAH JERUK PURUT – JAKARTA SELATAN, SEJAK 4 BULAN LALU PANGKALAN INI TIDAK PERNAH MENDAPAT PASOKAN MINYAK TANAH LAGI DARI PERTAMINA.// KINI, PANGKALAN TERSEBUT HANYA MENJUAL MINYAK TANAH SECARA ECERAN DENGAN HARGA 6.500 RUPIAH PER-LITER.// ITUPUN HANYA SEBANYAK 200 LITER PER-HARI YANG IA DAPATKAN DARI PEDAGANG MINYAK TANAH KELILING.// KEADAAN SEPERTI INI TENTU MEMBUAT WARGA SEMAKIN SULIT MENGHADAPI BEBAN HIDUP.///</p>
<p><b>SI: YAYIE AL-AMIN</b> <b>AGEN MINYAK TANAH &amp; LPG</b></p>	<p>..... <b>SOUND</b> <b>UP</b> .....</p>
<p><b>SI: ENDANG</b> <b>WARGA</b></p>	<p>..... <b>SOUND</b> <b>UP</b> .....</p>
	<p>KONDISI YANG SAMA JUGA DIRASAKAN SEJUMLAH PEDAGANG MINYAK TANAH KELILING.// MEREKA</p>

**SI: SUKARDI**  
**PEDAGAN MI-TAN**  
**KELILING**

MENGELUH SULIT-NYA MENDAPATKAN MINYAK TANAH.//  
 HAL INI SANGAT BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN  
 MEREKA YANG MENJADI TIDAK MENENTU.///

..... **SOUND** **UP**

.....  
 PARA PEDAGANG MENGAKU SEBELUM-NYA MEREKA BISA  
 MENJUAL MINYAK TANAH SEBANYAK 300 HINGGA 350  
 LITER PER-HARI DENGAN KEUNTUNGAN MENCAPAI 200  
 RIBU RUPIAH.// TAPI KINI MEREKA HANYA MENDAPATKAN  
 PASOKAN SEKITAR 80 LITER UNTUK JANGKA WAKTU DUA  
 HINGGA TIGA HARI.///

PENYIAR..... KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGKONVERSI  
 PENGGUNAAN MINYAK TANAH KE GAS SEJAK BULAN  
 OKTOBER 2007 DITANGGAPI BERAGAM OLEH  
 SEJUMLAH MASYARAKAT.// BERIKUT LAPORAN  
 BETACAM START..... SELENGKAPNYA.//

**JAKARTA, 07 JUNI 2008**

**SOSIALISASI KONVERSI  
 MITAN KE GAS MASIH  
 KURANG**

=====VOICE

OVER=====

KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS YANG  
 DILAKUKAN PEMERINTAH SEJAK OKTOBER 2007  
 LALU MAMFAATNYA SUDAH BANYAK DIRASAKAN  
 OLEH MASYARAKAT.// SEORANG PEDAGANG BAKSO  
 DI PASAR PALMERAH JAKARTA BARAT MASMAN  
 MISALNYA, MESKI BARU MENDAPATKAN TABUNG  
 GAS DAN KOMPOR SUBSIDI SEJAK DUA MINGGU  
 LALU IA MERASA CUKUP TERBANTU.// TABUNG GAS  
 ISI TIGA KILOGRAM BERWARNA HIJAU ITU TELAH  
 MENEMPEL DI GEROBAK BAKSONYA  
 MENGGANTIKAN KOMPOR MINYAK TANAH YANG  
 SEBELUMNYA IA SELALU BAWA.// MASMAN YANG  
 TELAH BERJUALAN SEJAK TAHUN 1984 LALU  
 MENJELASKAN UNTUK MENGGUNAKAN TABUNG GAS  
 TIGA KILOGRAM IA HARUS MERUBAH DUDUKAN  
 KOMPOR TERLEBIH DAHULU.// MASMAN JUGA  
 MENGATAKAN IA MERASA SANGAT TERBANTU  
 DENGAN ADANYA TABUNG GAS TIGA KILOGRAM  
 BANTUAN PEMRINTAH KARENA SAAT INI MINYAK  
 TANAH HARGANYA CUKUP MAHAL, 6000 RUPIAH  
 PERLITER.// MASMAN JUGA MENAMBAHKAN  
 DENGAN MENGGUNAKAN TABUNG TIGA KILOGRAM  
 IA BISA MENGHEMAT SEMBILAN RIBU RUPIAH  
 PERHARI.//

**MASMAN**  
 PEDAGANG BAKSO

=====SOUND

BITE=====

BERBEDA DENGAN MASMAN SEORANG IBU RUMAH TANGGA YANG JUGA BERJUALAN SAYUR MAYUR SURIM MENGATAKAN, HARGA GAS ELPIJI TIGA KILO GRAM SUDAH NAIK DARI HARGA SEBELUMNYA 14 RIBU RUPIAH MENJADI 15 RIBU RUPIAH PERTABUNGNYA.// MESKI MARMIN TELAH MENGGUNAKAN TABUNG GAS TIGA KILOGRAM, NAMUN JIKA HARUS MEMILIH IA LEBIH SUKA

**SURIM**  
IBU RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN KOMPOR MINYAK TANAH ALASANNYA, IA SUDAH TERBIASA MENGGUNAKAN KOMPOR MITAN.// MARMIN JUGA MASIH KUATIR DENGAN BANYAKNYA KEBAKARAN YANG TERJADI AKIBAT PENGGUNAAN KOMPOR GAS.// IA MENILAI MAKANAN YANG DI MASAK DENGAN KOMPOR MINYAK JUGA LEBIH ENAK.// DISAMPING ITU IA JUGA MENGELUHKAN DENGAN KUALITAS KOMPOR SELANG YANG KURANG BAIK.//

=====SOUND

BITE=====

**HAJI YUSUF MAR ALI**  
PEDAGANG MINYAK TANAH

DISISI LAIN KONVERSI GAS KE MINYAK TANAH BERDAMPAK KEPADA AGEN PENJUAL MINYAK TANAH SEPERTI HAJI YUSUF MAR ALI.// AGEN PENGECER MIYAK TANAH YANG TELAH BERJUALAN MINYAK TANAH SEJAK TAHUN 1969 INI MEMILIKI DUA PANGKALAN DI DAERAH PALMERAH MENJELASKAN IA TIDAK PUNYA MODAL UNTUK BERALIH MENJADI AGEN GAS.// NAMUN SAAT INI HAJI YUSUF JUGA MENJUAL KOMPOR GAS TIGA KILOGRAM 50 BUAH PERHARI.// SEBELUMNYA HAJI YUSUF BISA MENJUAL 5000 LITER MINYAK TANAH PER HARI DENGAN KEUNTUNGAN SEKITAR SATU JUTA RUPIAH, NAMUN SEKARANG 5000 LITER BARU HABIS TERJUAL SETELAH TUJUH HARI.//

=====SOUND

BITE=====

**DADI YONO**  
**PEDAGANG GAS**

BERBEDA DENGAN HAJI YUSUF SEORANG  
 PEDAGANG GAS TIGA KILOGRAM DI KAWASAN  
 PALMERAH LAINNYA DADI YONO MENGATAKAN IA  
 SANGAT MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH  
 YANG MELAKUKAN KONVERSI MITAN KE GAS.//  
 MENURUTNYA KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN  
 MEMBERIKAN BANTUAN GAS TIGA KILOGRAM  
 MASYARAKAT BISA MENGHEMAT BIAYA  
 DIBANDINGKAN MENGGUNAKAN MINYAK TANAH.//  
 MODAL KECIL TIDAK MENJADI PENGHALANG  
 KARENA IA MENDAPAT PINJAMAN YANG DIBERIKAN  
 PEMERINTAH SEBANYAK 80 TABUNG SEHINGGA  
 USAHANYA DAPAT TERUS BERJALAN.// UNTUK  
 MENYAKINKAN KONDISI TABUNG YANG DIJUAL  
 BAIK DADI SELALU MENGUJINYA DENGAN  
 SERANGKAIAN TEST BERIKUT MENIMBANG BERAT  
 GAS.//

=====SOUND

BITE=====

NAMUN DADI MENGAKUI PEMERINTAH MASIH  
 KURANG MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA  
 MASYARAKAT UNTUK KONVERSI MITAN KE GAS  
 SHINGGA SEBAGIAN MASYARAKAT KUATIR  
 MENGGUNAKAN KOMPOR GAS.// MUCHLIS DAN  
 AGUS MURDOKO MELAPORKAN.//



<p><b>PENYIAR</b> .....</p> <p><b>BETACAM START</b>.....</p> <p><b>JAKARTA, 24 MEI 2008</b> <b>RAKYAT MISKIN BISA CAIRKAN</b> <b>DAN BLT SENILAI 100 RIBU</b> <b>RUPIAH</b></p> <p><b><u>BACHTIAR HAMSAH</u></b> <b>MENTERI SOSIAL</b></p> <p><b><u>ABURIZAL BAKRIE</u></b> <b>MENKO KESRA</b></p>	<p>PEMERINTAH HARI INI MULAI PUKUL 10 PAGI PENCAIRAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI – BLT- SUDAH DAPAT DICAIRKAN DI SEPULUH KOTA DAN PADA HARI BERIKUTNYA DILAKUKAN DI 24 KOTA LAINNYA.// SEMENTARA KOMPENSASI ATAS KENAIKAN HARGA BBM PEMERINTAH TELAH MENAMBAH EMPAT PROGRAM TAMBAHAN BAGI PERLINDUNGAN SOSIAL YANG DIANTARANYA MENAMBAH BERAS RASKIN 15 KILOGRAM SELAMA SATU TAHUN.//</p> <p>=====ON SCREEN=====</p> <p>BERSAMAAN PENGUMUMAN KENAIKAN HARGA BBM TADI MALAM MENTERI KORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT ABURIZAL BAKRI DAN MENTERI SOSIAL BAHTIAR HAMZAH MENEGASKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI- BLT- HARI INI SEJAK PUKUL 10 PAGI SUDAH BISA DICAIRKAN MELALUI KANTOR POS DI SEPULUH KOTA.// BACHTIAR HAMZAH MENAMBAHKAN BAHWA SEJAK TANGGAL 15 JULI LALU KARTU BLT TELAH DIDISTRIBUSIKAN.//</p> <p>=====SOUND BITE=====</p> <p>PADA KESEMPATAN YANG SAMA MENKOKESRA MENGATAKAN PEMERINTAH TELAH MEMPERSIAPKAN BERBAGAI PROGRAM TAMBAHAN UNTUK MENGURANGI DAMPAK KENAIKAN BBM YANG TERBAGI MENJADI TIGA KELOMPOK YAITU KELOMPOK PERTAMA UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKT PEDESAAAN DAN MASYARAKAT PINGGIRAN PERKOTAAN DAN KELOMPOK KEDUA DENGAN PROGRAM</p>
--	--

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEDANGKAN  
KELOMPOK KETIGA UNTUK PENGEMBANGAN USAHA  
KECIL MENEGAH.//

=====SOUND

BITE=====

SEMENTARA MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI  
MENGATAKAN PEMERINTAH MENGANGGARKAN 135  
KOMA DUA TRILIUN RUPIAH PADA APBNP 2008  
UNTUK SUBSIDI BBM DENGAN ASUMSI MINYAK  
DUNIA SEBESAR 100 DOLLAR AMERIKA PERBAREL.//  
KENAIKAN HARGA BBM TERPAKSA DIPERLUKAN  
GUNA MENGAMANKAN PROGRAM LAINNYA SEPerti  
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR.// MUCHLIS DAN AGUS RIYADI  
MELAPORKAN.//



KENDALA PEMBAGIAN DAN  
PENCAIRAN KARTU BLT

PROD:

25 MEI 2008  
MUCHLIS/ FAT MURSA

**PENYIAR**

BETACAM  
START.....  
**JAKARTA, 25 MEI 2008**  
**KENDALA PENYALURAN  
DAN PENCAIRAN BLT**

**ENEH  
WARGA PENJARINGAN**

**M TAMAMI  
KETUA RT16 BLOK C RW  
017**

PEMBAGIAN DAN PENCAIRAN BANTUAN TUNAI LANGSUNG –  
BLT- MASIH MEMILIKI KENDALA DILAPANGAN.// MESKI  
MASYARAKAT MISKIN MERASA TERBANTU, MEREKA  
MENGHARAPKAN NILAI BLT DITAMBAH NILAINYA KARENA  
TIDAK SESUAI DENGAN KENAIKAN HARGA SEMBAKO.//

=====VOICE OVER=====

PENCAIRAN BANTUAN TUNAI LANGSUNG KEPADA  
MASYARAKAT MISKIN TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH SEJAK  
KEMARIN.// MESKI BERJALAN DENGAN BAIK PELAKSANAAN  
PENCAIRAN BLT MASIH MEMILIKI KENDALA DILAPANGAN.//  
SEORANG WARGA JALAN LUAR BATANG PENJARINGAN  
JAKARTA UTARA ENEH MISALNYA IA KECEWA KARENA HARI  
INI TIDAK BISA MENCAIRKAN DANA BLT.// SEBELUMNYA IA  
TIDAK MENGETAHUI KANTOR POS PLUIT HARI INI TUTUP .//

=====SOUND BITE=====

KENDALA LAIN DALAM PELAKSANAAN BLT ANTARA LAIN  
ADALAH PADA SAAT PENDAFTARAN KARTU BLT YANG TIDAK  
BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL SESUAI DENGAN YANG  
TERTERA DI KTP.// BAHKAN KETUA RT 16 BLOK C RW 17  
KELURAHAN PENJARINGAN KECAMATAN PENJARINGAN M  
TAMAMI BERINISIATIF SENDIRI TETAP MEMBERIKAN KARTU  
BLT KEPADA WARGA YANG BERDOMISILI DI  
LINGKUNGANNYA MESKI TIDAK MEMILIKI KTP DAN KARTU  
KELUARGA JAKARTA.//

=====SOUND BITE=====

=====SOUND BITE =====  
SEJUMLAH WARGA JUGA BELUM MENDAPATKAN INFORMASI



KENDALA PEMBAGIAN DAN  
PENCAIRAN KARTU BLT

PROD:

25 MEI 2008  
MUCHLIS/ FAT MURSA

**PENYIAR**

**BETACAM  
START.....  
JAKARTA, 25 MEI 2008  
KENDALA PENYALURAN  
DAN PENCAIRAN BLT**

**ENEH  
WARGA PENJARINGAN**

**M TAMAMI  
KETUA RT16 BLOK C RW  
017**

PEMBAGIAN DAN PENCAIRAN BANTUAN TUNAI LANGSUNG –  
BLT- MASIH MEMILIKI KENDALA DILAPANGAN.// MESKI  
MASYARAKAT MISKIN MERASA TERBANTU, MEREKA  
MENGHARAPKAN NILAI BLT DITAMBAH NILAINYA KARENA  
TIDAK SESUAI DENGAN KENAIKAN HARGA SEMBAKO.//

=====VOICE OVER=====

PENCAIRAN BANTUAN TUNAI LANGSUNG KEPADA  
MASYARAKAT MISKIN TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH SEJAK  
KEMARIN.// MESKI BERJALAN DENGAN BAIK PELAKSANAAN  
PENCAIRAN BLT MASIH MEMILIKI KENDALA DILAPANGAN.//  
SEORANG WARGA JALAN LUAR BATANG PENJARINGAN  
JAKARTA UTARA ENEH MISALNYA IA KECEWA KARENA HARI  
INI TIDAK BISA MENCAIRKAN DANA BLT.// SEBELUMNYA IA  
TIDAK MENGETAHUI KANTOR POS PLUIT HARI INI TUTUP .//

=====SOUND BITE=====

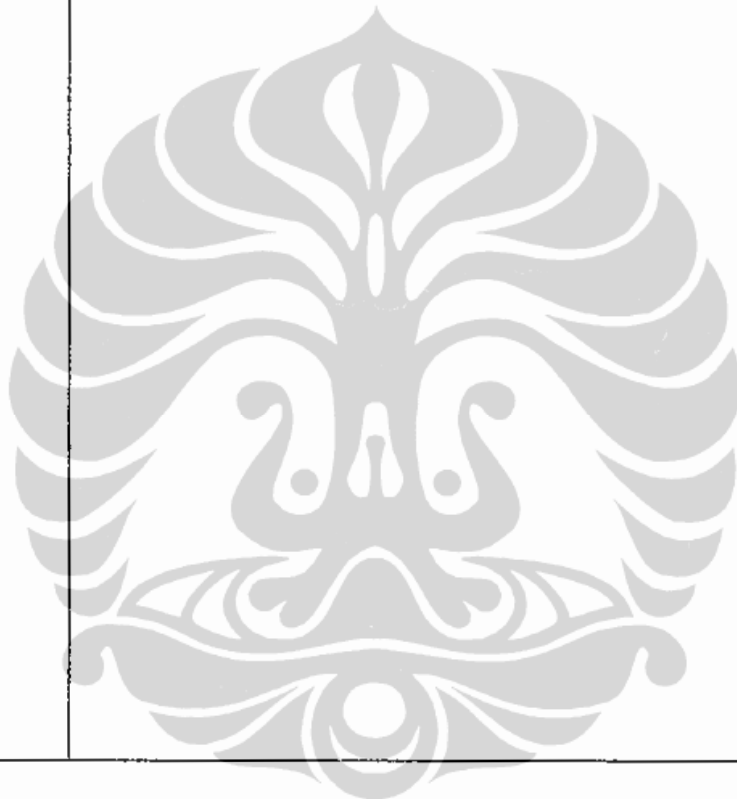
KENDALA LAIN DALAM PELAKSANAAN BLT ANTARA LAIN  
ADALAH PADA SAAT PENDAFTARAN KARTU BLT YANG TIDAK  
BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL SESUAI DENGAN YANG  
TERTERA DI KTP.// BAHKAN KETUA RT 16 BLOK C RW 17  
KELURAHAN PENJARINGAN KECAMATAN PENJARINGAN M  
TAMAMI BERINISIATIF SENDIRI TETAP MEMBERIKAN KARTU  
BLT KEPADA WARGA YANG BERDOMISILI DI  
LINGKUNGANNYA MESKI TIDAK MEMILIKI KTP DAN KARTU  
KELUARGA JAKARTA.//

=====SOUND BITE=====

=====SOUND BITE =====

SEJUMLAH WARGA JUGA BELUM MENDAPATKAN INFORMASI

<p><b>M. AZIR</b> <b>WARGA PENJARINGAN</b> <b>UTARA</b></p>	<p>ADANYA BANTUAN PEMBERIAN BERAS SEBANYAK 15 KILOGRAM SEBAGAI SATU PAKET BANTUAN DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK MENGURANGI DAMPAK KENAIKAN BBM.// MUCHLIS SIMANJUNTAK DAN FATH MURSA MELAPORKAN.//</p>
---	--



BRANAS

**TARGET PENYALURAN TABUNG LPG****PRAMONO, WARDAHNIA CS**

12-11-08

ROSE /  
DEDY A.

**PENYIAR,.....** MESKIPUN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL MASIH RAGU, NAMUN PERTAMINA OPTIMIS, TARGET PENYALURAN TABUNG GAS ELPIJI PADA TAHUN 2008, SEBANYAK 15 JUTA TABUNG, DAPAT TERPENUHI.//

**BETACAM  
START,.....**

----- SOUND UP -----

**CH  
BALARAJA, TANGERANG  
TARGET PENYALURAN  
TABUNG LPG**

TARGET PENYALURAN 15 JUTA TABUNG LPG AKAN DAPAT TERPENUHI, KARENA TABUNG GAS LPG AKAN TERUS DIPRODUKSI.// SELAIN ITU PERTAMINA MASIH AKAN MEMPEROLEH DELAPAN JUTA TABUNG TAMBAHAN DARI BERBAGAI PABRIK.// OPTIMISME INI DISAMPAIKAN VICE PRESIDEN GAS DOMESTIK WAHYUDIN AKBAR DI SELA KUNJUNGAN KERJA KE PABRIK TABUNG GAS TIGA KILOGRAM PT. PELANGI INDAH CANINDO, BALARAJA, TANGERANG/// NAMUN, DIREKTUR JENDERAL MIGAS EVITA LEGOWO MERAGUKAN PEMENUHAN TARGET PENYALURAN TABUNG GAS UNTUK TAHUN 2008 DAPAT TERCAPAI.//

**SI: EVITA H. LEGOWO  
DIRJEN MINYAK DAN GAS  
BUMI**

----- SOUND BITE -----

EVITA LEGOWO MENAMBAHKAN TARGET AWAL UNTUK KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS LPG ADALAH PADA TAHUN 2012, TAPI DIPERCEPAT PADA TAHUN 2010 DAN DIPERCEPAT

LAGI PADA TAHUN 2009.//



**Universitas Indonesia**

PENYIAR,.....

KETUA DPR RI AGUNG LAKSONO MEMINTA PEMERINTAH UNTUK MEMBATALKAN RENCANA MENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK –BBM- KARENA DITENGAH KONDISI PEREKONOMIAN YANG SULIT SAAT INI DINILAI DAPAT MENAMBAH BEBAN MASYARAKAT //

BETACAM

START.....

**JAKARTA, 6 MEI**  
**2008**

KETUA DPR RI  
AGUNG LAKSONO  
MENANGGAPI  
KENAIKAN HARGA  
BBM

.....VO.....

PEMERINTAH BERENCANA UNTUK MENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK –BBM- BERSUBSIDI DALAM WAKTU DEKAT.// HAL INI UNTUK MENCUKUPI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NASIONAL –APBN- SERTA MENGATASI MASALAH PEREKONOMIAN AKIBAT PENGARUH KENAIKAN HARGA MINYAK DUNIA.// MENURUT KETUA DPR RI AGUNG LAKSONO PEMERINTAH SEHARUSNYA Mencari kebijakan lain untuk mengatasi masalah APBN bukan dengan menaikkan harga BBM.// karena menurutnya kenaikan harga BBM akan berdampak kenaikan inflasi yang akan diikuti kenaikan bahan pokok lainnya sehingga beban masyarakat khususnya masyarakat kecil semakin berat.//

**AGUNG LAKSONO**  
**KETUA DPR RI**

=====SOUND UP=====

AGUNG LAKSONO MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK MENGHINDARKAN KENAIKAN HARGA BBM SALAH SATUNYA DENGAN MEMPERBAIKI INFRASTRUKTUR MIGAS SEHINGGA PRODUKSI MINYAK DALAM NEGERI MENINGKAT.// SIGIT TRIYUGO DAN ALFIAN FAJAR MELAPORKAN MELAPORKAN.//



